

SIMPUL

Perencana

Volume 24 Tahun 12 Maret 2015

MAJU BERSIH KERJA BEBAS SISTEM DIALOG TRIMARTA DAYASAING TRIMARTA PROGRAM PEMBANGUNAN PINGGIRAN BEBAS KURRIKULUM SISTEM 2015 KARAKTER NAWA CITA TRISAKTI PATRIOTISME DEMOKRATIS 2015 2019 INDONESIA SEJAHTERA PINTAR MAJU REFORMASI BERSIH BANGKIT MAJU DEMOKRATIS TERPERCAYA BANGKIT KEBHINEKAAN PROPORSIONAL REVOLUSIONAL WARGA BERSIH BANGKIT TRIMARTA KEBHINEKAAN

**MENERJEMAHKAN NAWA CITA
MENJADI KERJA NYATA**



BEASISWA CONFERENCE/ MAGANG

INTERNATIONAL CONFERENCE/ WORKSHOP/SEMINAR DI JEPANG

DURASI

2 hari sebelum + jumlah hari acara + 1 hari setelah acara.

TOPIK

Peserta diharuskan mencari dan mendaftar sendiri ke forum - forum internasional di Jepang dengan topik :

Economic Development; Development studies; Economics; Public Administration Public Policy; Urban and Regional Planning; Public Health; Infrastructure Transportation Management; Environmental; Natural resource Management International Trade /Finance; International Development/studies

PEMBIAYAAN

Instansi Asal

1. Tiket daerah asal ke Jakarta
2. Akomodasi selama di Jakarta
3. Living Allowance di Jakarta

Pusbindiklatren

1. Uang pendaftaran (Termasuk gala dinner/welcome/tour party apabila ada)
2. Tiket ke Jepang Pulang - Pergi
3. Asuransi perjalanan
4. Transport lokal di Jepang
5. Living Allowance selama di Jepang

PORSEDUR

1. Calon peserta menunjukkan bahwa karya tulisnya (*abstract, extended abstract, full paper*) telah diterima oleh panitia
2. Calon peserta menyampaikan pengajuan untuk pembiayaan kepada atasan (*minimal eselon II*) di instansi masing - masing
3. Peserta melakukan pendaftaran *online* melalui www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
4. Peserta mengisi dan melengkapi formulir yang sudah ditandatangani oleh atasan dikirim ke Pusbindiklatren melalui Biro Kepegawaian
5. Berkas formulir yang dilampiri dengan dokumen - dokumen yang dipersyaratkan dan informasi tentang penyelenggaraan acara, bukti diterima, tanda terima biaya (apabila telah membayar), *copy abstrak/extended abstrak, full paper*
6. Proses seleksi oleh Tim Pusbindiklatren Bappenas
7. Pengajuan dan pembayaran dana kepada peserta
8. Pelaksanaan acara
9. Pelaporan oleh peserta

SYARAT ADMINISTRATIF

a.	Pengusulan dari Instansi	Minimal UKE II
b.	Unit Kerja	Perencanaan
c.	PNS 100% Golongan III/a Minimal	2 Tahun
d.	Pendidikan Minimal	S1
e.	Umur Maksimal	2 th sebelum pensiun
f.	TOEFL Minimal (Kecuali bagi lulusan S2/S3 luar negen tanpa syarat TOEFL)	500

Informasi kegiatan International conference/workshop/seminar dapat dilihat di:
www.conferencealerts.com ; www.allconference.com; www.internationalseminar.org

Untuk Info lebih lanjut dapat dilihat di:

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

atau Hubungi kami di: Email: pusbindiklatren@bappenas.go.id

Telp (021)31928280, 31928285, 31928279

Atau masing - masing unit kerja Biro SDM/Pusdiklat:

STAFF ENHANCEMENT/ MAGANG DI JEPANG

Pembiayaan:

1. Tiket Internasional pulang - pergi dari Jakarta - negara tujuan (tiket dari Jakarta ditanggung instansi peserta)
2. Transport lokal di Jepang
3. Living Allowance di Jepang
4. Akomodasi di Jepang
5. Asuransi perjalanan

Prosedur:

1. Calon peserta mendaftarkan kepada instansi/pejabat yang menangani bidang pengembangan SDM/Kepegawaian
2. Peserta melakukan pendaftaran melalui online ke website pusbindiklatren Bappenas
3. Peserta mengisi dan melengkapi formulir dan apabila sudah lengkap dan ditandatangani oleh atasan dikirim ke Pusbindiklatren melalui Biro Kepegawaian
4. Berkas formulir yang dikirim berisi dokumen - dokumen yang dipersyaratkan dan informasi tentang proposal, fotokopi nilai TOEFL/EILTS atau copy ijazah S2/S3 luar negeri
5. Seleksi administrasi oleh Tim Pusbindiklatren Bappenas
6. Pelaksanaan Diklat
7. Pelaporan oleh peserta
8. Implementasi action plan
9. Workshop

TOPIK

1. *Regional and Urban Planning;*
2. *Waste Management;*
3. *Public Private Partnership (PPP), dan*
4. *Local Economic Regional Development (LERD)*

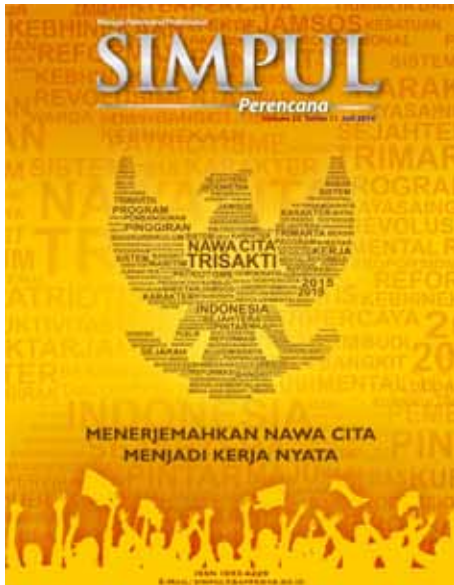
DURASI

Satu (1) bulan atau tiga (3) bulan

SYARAT ADMINISTRATIF

a.	Pengusulan dari Instansi	Minimal UKE II
b.	Unit Kerja	Perencanaan
c.	PNS 100% Golongan III/a Minimal	2 Tahun
d.	Pendidikan Minimal	S1
e.	Umur Maksimal	2 th sebelum pensiun
f.	TOEFL Minimal (Kecuali bagi lulusan S2/S3 luar negen tanpa syarat TOEFL)	500

Detil persyaratan dan ketentuan dapat dilihat: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
Atau masing - masing unit kerja Biro SDM/Pusdiklat:



SIMPUL PERENCANA

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas.

PELINDUNG: Menteri PPN/Kepala Bappenas

PENANGGUNG JAWAB: Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas

TIM PELAKSANA

PEMIMPIN UMUM: Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas.

PEMIMPIN REDAKSI: Wiwit Kuswidiati

DEWAN REDAKSI: Wignyo Adiyoso, Zamilah Chairani, Meily Djohar, Hari Nasiri Mochtar, Guspika, Edy Purwanto,

REDAKTUR PELAKSANA: Wiky Witarni, Maslakah Murni, Rita Miranda, Edy Susanto, Dwi Harini Septaning Tyas, Feita Puspita Murti

DISTRIBUSI/SIRKULASI: Eko Slamet Suratman

ADMINISTRASI/KEUANGAN: Nita Agustin

EDITOR : Setio Utomo dan Tim Simpul

GRAFIS & LAYOUT : Herlambang

TENAGA PENDUKUNG: CH. Nunik Ispriyanti, Sukranto, Jajang Muhari

ALAMAT REDAKSI :

Pusbindiklatren Bappenas

Jl. Proklamasi No.70, Jakarta 10320

Telp. (021) 319 28280, 319 28285, 319 28279

E-Mail: simpul@bappenas.go.id

Redaksi menerima tulisan yang berhubungan dengan perencanaan. Tulisan bisa dikirim kapan saja.

Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

Kerja dan Blusukan

Blusukan, istilah lain dari turun ke bawah atau inspeksi mendadak menjadi tren dalam pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Zaman orde baru blusukan diistilahkan turun ke bawah atau inspeksi mendadak. Model ini menjadi gaya pemerintahan saat ini dan memang bukan hal baru karena sejak menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang menggunakan gaya dan pendekatan blusukan untuk melihat langsung permasalahan di lapangan dan langsung memberikan pemecahannya. Jokowi yang mengaku lebih suka ke lapangan di banding di belakang meja juga mengajak para pembantunya untuk lebih sering turun ke lapangan atau melakukan blusukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Dari sisi positif, gaya ini memang akan secara langsung menemu kenali persoalannya di lapangan. Hal ini sesuai dengan identifikasi selama ini yang sebagian para ahli pembangunan menyatakan bahwa bangsa kita bagus di tingkat konsep tapi lemah di tingkat implementasi. Tentu banyak hal yang menyebabkan lemahnya implementasi sebuah kebijakan pembangunan dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan cara blusukan sebagai sarana kontrol, monitoring dan evaluasi. Meski sudah menjadi Presiden dengan rentang kendali wilayah yang sangat luas, namun Jokowi tetap saja melakukan gaya blusukan dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan alasan luasnya rentang kendali, wilayah dan persoalan maka Jokowi mengatasinya dengan blusukan yang menggunakan *e-blusukan*. Hal itu dilakukan ketika berdiskusi dengan para TKI dan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia.

Gaya blusukan ini juga menular kepada para pembantunya, untuk mengimbangi kinerja pemimpinnya, maka para Kabinet Kerja Jokowi juga rajin melakukan blusukan untuk melihat langsung persoalan di lapangan. Dalam beberapa hari kerja setelah di angkat sebagai menteri, beberapa pembantu presiden langsung melakukan blusukan. Menteri tenaga kerja, misalnya, melakukan blusukan dan sampai melompat pagar untuk melihat kondisi langsung situasi sebuah rumah penampungan TKI yang dilaporkan bermasalah. Begitu juga dengan para menteri lainnya.

Blusukan sebenarnya hanya sebuah cara atau pendekatan dalam melaksanakan, mengevaluasi dan mengontrol sebuah pelaksanaan kebijakan pembangunan, khususnya di era Jokowi. Yang penting adalah semuanya dilakukan untuk mewujudkan janji presiden pada saat kampanye, yaitu merealisasikan visi-misi presiden untuk masa kepemimpinan 2015-2019.

Visi –misi yang dikenal sebagai Nawa Cita itu harus di dukung oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah, swasta, akademisi, *Civil Society* dengan kemampuan dan sesuatu situasi dan kondisi masing-masing.

Bagaimana aparat pemerintah di pusat, aparat di daerah, kepala daerah, CSO memandang Visi dan Misi pemerintah baru. Apa yang mereka lakukan untuk mendukung tujuan nasional ini?, apa masukan, saran dan kritik mereka agar visi misi Presiden Jokowi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan akhirnya ?

Simpul Edisi 24 ini mencoba menggali dan menjelaskan pertanyaan di atas. Semoga edisi kali ini menjadi awal dan bekal untuk memahami bagaimana proses dan dinamika untuk pelaksanaan Nawa Cita tersebut. Selamat Membaca.

Cakrawala:



Dr. Ir. Fattah Jasin, MS
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur

Setiap pemimpin itu harus punya mimpi. Mimpi itu menjadi syarat dan kunci utama. Pemimpin itu harus visioner. Dalam dimensi perencanaan, mimpi itu harus dicapai selama 25 tahun. Kita sudah menyiapkan dokumen (RPJP) baik nasional atau daerah. RPJP yang 25 tahun itu di bagi secara bertahap dalam lima tahunan. Kemudian di detailkan dalam tahunan yaitu RKP, Rencana Kerja Pemerintah....**Hal 8**



Ir. Sarwo Handayani, M.Si
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Sebetulnya seorang kepala daerah yang terpilih menjadi gubernur dalam menjalankan pemerintahannya dalam periode yang telah ditetapkan harus mengacu kepada RPJMD dan itu sudah menjadi peraturan. Pasti itu berlaku umum ke semua daerah. ...**Hal 16**



Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc
Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

Setiap lima tahun menyusun RPJMN, tidak seperti dahulu GBHN. RPJMN mengacu pada RPJPN. Setelah perubahan sistem politik yang dulu presiden dipilih oleh MPR, sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Dulu MPR menerbitkan GBHN sekarang tidak, maka presiden yang sekarang ini adalah amanat rakyat. Kalau dulu istilahnya presiden mandataris MPR....**Hal 23**



Dr. Telisa Aulia Falianty, SE, M.E
Ketua Program Studi MPKP Universitas Indonesia

RPJMN yang sedang difinalisasi memang sedang mengakomodasi visi misi presiden baru. Tiga Poin utama dari visi misi tersebut adalah berdikari di bidang ekonomi, berkedaulatan di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya...**Hal 38**



Sri Palupi
Ketua Institut Ecosoc

Saya kira itu intinya Trisakti ya. Yang pertama soal ekonomi, kalau kita lihat sepuluh tahun pemerintahan SBY, ekonomi kita di puji – puji asing, khususnya dengan melihat indikator ekonomi makronya. Mulai dari pertumbuhan ekonominya, status negara layak utang, kita masuk 16 besar ekonomi dunia, kita juga sudah masuk ke negara dengan pendapatan menengah. Tapi dibalik itu semua, ada “air mata” dibalik pujian dunia....**Hal 30**



FX. Hadi Rudyatno
Walikota Solo

Tentu saja berbeda dengan ketika beliau menjadi Walikota Solo. Sekarang visi dan misi beliau dalam Nawa Cita itu berasal dari tiga itu kan maksudnya, Trisakti itu. Kita akan mendukung sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kita di Solo, dengan kabupaten kan beda. Terjemahan Trisakti di daerah juga harus disesuaikan....**Hal 44**



KH. Prof. Dr. Said Aqil Siradj, MA
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Karena posisi Indonesia yang diapit dua negara besar Australia serta China, yang non muslim. Kalau kita tidak pandai – pandai *memanage* berbagai aliran Islam, bisa terjebak kepada kekerasan, kepada radikalisme. Itu yang diharapkan oleh mereka yang tidak senang dengan Islam dan ada alasan untuk menghantam....**Hal 52**

LAINNYA :

hal.		hal.	
3	DARI KAMI	71	AKADEMIKA
5	GERBANG	73	OPINI
60	LIPUTAN	83	SELINGAN
69	SOSOK ALUMNI		

MEREALISASIKAN VISI DAN MISI PEMERINTAH BARU DENGAN KERJA, KERJA DAN KERJA

Janji telah diucapkan, kontestasi telah dimenangkan, kewenangan dan kekuasaan telah dipegang, kini saatnya hingga 5 tahun ke depan, pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla merealisikannya. Saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 20 Oktober 2014, untuk masa jabatan 2015-2019, Presiden Joko Widodo dalam sambutan pertamanya dihadapan sidang MPR RI menyatakan akan merealisasikan semua visi-misi yang telah menjadi janjinya melalui kerja, kerja dan kerja.

Visi misi Presiden Joko Widodo secara prioritas dirangkung dalam 9 agenda utama yang akan dijalankan dalam masa kepemimpinan selama 5 tahun ke depan. Visi-misi yang dikenal sebagai Nawa Cita tersebut akan direalisasikan dengan kerja bersama kabinetnya. Struktur kabinet yang berisi para professional dan politisi diharapkan dapat membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan untuk merealisasikan Nawa Cita tersebut. Tentu setiap pemimpin memiliki gaya, cara atau *style* yang berbeda dalam melaksanakan pemerintahannya, Presiden Jokowi yang dikenal dengan gaya “blusukannya” sudah mulai “diikuti” jajaran kabinetnya. Secara positif, model blusukan memberikan masukan dan gambaran akan persoalan nyata di lapangan dan langsung memberikan respon dan pemecahannya. Cara ini juga mencegah dan menghindari informasi yang seringkali disebut “asal bapak senang (abs)”.

“Dalam era keterbukaan dan serba cepat ini memang sudah saatnya semua pemimpin dan pejabat di negeri ini memberikan teladan melalui kerja nyata. Dengan status yang disandang, mereka akan menjadi panutan (*figure public*) yang dapat memberikan efek dan pengaruh secara luas.”

Dalam beberapa bulan masa pemerintahannya, ada beberapa hal yang sudah dilakukan secara mendasar oleh pemerintahan baru. Dalam bidang pemerintahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan surat perintah agar semua jajaran pemerintahan baik di pusat dan daerah melakukan penghematan dan efisiensi. Pelarangan rapat-rapat di luar kantor sepanjang kantor pemerintahan memiliki ruang rapat adalah salah satu cara penghematan tersebut. Presiden Jokowi sendiri, sebagai kepala negara telah melakukan pertemuan di tiga *event* internasional, di mana pada even tersebut Presiden Jokowi menyampaikan visi dan kebijakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menciptakan dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Melalui pertemuan-pertemuan Presiden Jokowi mengundang negara-negara luar untuk bekerja sama dengan Indonesia guna melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia secara besar-besaran. Ini dilakukan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antar daerah dan ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam negeri sendiri pemerintah baru juga melakukan berbagai pembenahan, dalam bidang Kelautan dan Perikanan, misalnya, pemerintah melakukan pemberantasan pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan nelayan asing melalui tindakan tegas. Peneggelaman kapal-kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* sudah menjadi tindakan nyata. Ini ditujukan untuk mengurangi kerugian negara dan memberi kesempatan kepada nelayan local untuk dapat menangkap ikan lebih banyak dan mendapatkan peningkatan penghasilann nelayan.

Hal lain yang dilakukan oleh pemerintahan baru adalah penertiban dan perbaikan tata kelola energi, tenaga kerja Indonesia, pertambangan. Di bidang pendidikan dan kesehatan juga akan menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Dalam era keterbukaan dan serba cepat ini memang sudah saatnya semua pemimpin dan pejabat di negeri ini memberikan teladan melalui kerja nyata. Dengan status yang disandang, mereka akan menjadi panutan (*figure public*) yang dapat memberikan efek dan pengaruh secara luas. Tentu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan kabinetnya merupakan suatu kenyataan dan keharusan yang memang selayaknya dilakukan oleh pemimpin di negeri ini. Dengan segudang permasalahan yang ada dan tantangan di depan mata yang begitu berat, apa yang



dilakukan sudah seharusnya bukan suatu “pencitraan”. Bila dilihat secara politis tentu saja, akan terdengar dan dapat di interperasikan secara berbeda.

Apa yang dilakukan oleh presiden dan para pembantunya harus mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Demi kepentingan dan tujuan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kepentingan nasional harus menjadi pegangan dan dapat mengurangi perdebatan, perselisihan yang hanya mengatasnamakan kepentingan yang lebih kecil. Semua komponen bangsa harus bahu membahu membangun Indonesia lebih baik di tengah tantangan yang lebih berat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Beberapa tantangan di dalam negeri, misalnya, masih tingginya kesenjangan, besarnya jumlah masyarakat miskin, belum meratanya dan rendahnya kualitas kesehatan, serta rendahnya indeks kemampuan pelajar Indonesia adalah hal yang harus di atasi bersama. Belum lagi masalah besarnya ketergantungan bangsa kita terhadap impor bahan pangan, energy, dan pendukung industry. Tantangan dari luar yang harus dihadapi adalah semakin terbukanya sistem perekonomian di dunia dan terbukanya arus informasi yang tanpa batas. Kondisi ini disamping menjadi peluang bagi bangsa Indonesia juga membawa dampak tersendiri. Sistem perekonomian terbuka, misalnya dalam kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlaku dalam tahun 2015, akan membawa konsekwensi terhadap perlunya peningkatan kualitas dan kesiapan SDM bangsa kita untuk berkompetisi dalam karir, profesi dan dunia kerja di bidang tertentu dengan SDM dari seluruh negara ASEAN. Tentu kita tidak ingin menjadi “kuli” di negeri sendiri. Sedangkan keterbukaan dan kebebasan informasi yang dapat di akses oleh siapa saja dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku dan karakter bangsa Indonesia, karena tidak semua hal sesuai dengan budaya dan karakter bangsa.

Untuk menjalankan dan merealisasikan semua visi dan misi pemerintah baru dalam 5 tahun ke depan tentu bukanlah pekerjaan mudah dan ringan. Perlu kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas semua komponen bangsa dan aparat sipil pemerintahan sebagai ujung tombaknya. Kerja besar ini juga perlu didukung segenap jajaran pemerintah baik di pusat dan di daerah. Pemerintah daerah harus mendukung program nasional ini dan menyesuaikan dengan dinamika, potensi dan kondisi daerah masing – masing. Meski tidak selalu mulus, namun pekerjaan besar pembangunan nasional harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar tercapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Blusukan*, meski menjadi trend, hendaknya benar-benar sarana untuk menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan dan bukan “pencitraan” sebagaimana selentingan yang terdengar. Bagaimanapun, 5 tahun ke depan terletak di tangan kita semua khususnya aparat pemerintah sebagai pengelola negara ini dan waktu akan menjawab semuanya di mana rakyat akan menjadi saksinya.

“Ada wacana yang mendorong agar proses perencanaan dan penganggaran dapat disatukan agar dihasilkan *output* yang baik, efektif dan tepat sasaran.”





Dr. Ir. Fattah Jasin, MS

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur

“Jawa Timur
butuh Revolusi
Fiskal biar *gap* -
nya gak terlalu
besar”

Sejak 20 Oktober 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla secara resmi dilantik dan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa bakti 2015-2019. Mereka akan memimpin bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Kini saatnya merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan dalam kampanye pemilihan presiden lalu. Janji-janji dalam kampanye lalu yang menjadi visi dan misi presiden terpilih dituangkan ke dalam satu konsep yang disebut Nawa Cita. Dalam merealisasikan Nawa Cita yang juga menjadi tujuan nasional selama lima tahun ke depan akan diikuti oleh seluruh komponen bangsa. Bagaimana berbagai komponen bangsa memandang Nawa Cita tersebut dan bagaimana mereka terlibat dalam mensukseskan tujuan nasional yang terkandung dalam Nawa Cita tersebut? apa tantangan dan hambatannya? dan bagaimana mengatasainya? Berikut penuturan Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur Bapak Dr. Ir. RB. Fattah Jasin, MS (FJ) Kepada Simpul di ruang kerjanya.

Setiap Pemimpin Itu Harus Punya Mimpi

Simpul : Bagaimana pemerintah daerah Propinsi Jatim memandang Visi dan Misi Pemerintah Baru (Nawa Cita)?

FJ :Setiap pemimpin itu harus punya mimpi. Mimpi itu menjadi syarat dan kunci utama. Pemimpin itu harus visioner. Dalam dimensi perencanaan, mimpi itu harus dicapai selama 25 tahun. Kita sudah menyiapkan dokumen (RPJP) baik nasional atau daerah. RPJP yang 25 tahun itu di bagi secara bertahap dalam lima tahunan. Kemudian di detailkan dalam tahunan yaitu RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Berangkat dari visi yang merupakan sebuah mimpi dan keinginan itu harus dicapai ketika Kepala Daerah/Presiden melalui misi yang menjadi tugas pokok di bawahnya. Di Jakarta ada kementerian yang mengeksekusi, kalau provinsi dan kabupaten kota itu SKPD. Saya kira masing – masing berangkatnya dari mimpi, keinginan atau cita – cita yang akan disesuaikan dengan potensi wilayah. Dokumen – dokumen yang harus disiapkan oleh pemerintah di bawahnya baik di kabupaten atau pemerintahan kota itu tidak boleh tumpang tindih, karena dari segi proses kita tahu dari RPJP, RPJMN atau RPJMD itu melalui sebuah proses yang bernama Musrenbang. Jadi seperti masa transisi pemerintahan Jokowi walaupun di kampanye sudah kelihatan visi – misinya, juga kira – kira lima tahun mau kemana, Bappenas atau ibu Menteri yang terdahulu itu sudah menyiapkan sebuah dokumen perencanaan teknokratik, ini dibahas bersama – sama dengan daerah, dengan kita. Jadi memberikan kesempatan untuk mengakomodir menjadi satu kesatuan, bahwa di Jawa Timur sudah diatur sedemikian rupa untuk mendukung negara, untuk mendukung Republik ke arah seperti itu, apakah di bidang

ekonomi, menyangkut investasi, pertanian dan industrinya. Juga hal - hal yang terkait dengan sosial – budaya dan pendidikan serta kesehatan.

Simpul : Jadi sudah tidak ada masalah dalam untuk mendukung dan mensukseskan visi misi pemerintahan baru ?

FJ : Ya. Semuanya sudah diatur sedemikian serupa sehingga pada saat presiden membuat sebuah rancangan jangka panjang maupun jangka menengah, yang di daerah sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada penyesuaian karena sudah dilibatkan prosesnya lebih awal. Dari musyawarah, tinggal nanti menyusun dokumen yang menjadi dasar untuk mengeksekusi baik di daerah ataupun pusat. Bappenas juga akan berangkat pada sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan oleh RPJM. Tinggal mengeksekusi, melalui rencana strategik dari kementerian dan SKPD. RPJMD kan untuk kepala daerah, jadi cita – citanya untuk presiden apa. Kemudian cita – cita menteri harus menyesuaikan dengan presiden. Misalnya ini pengalihan subsidi BBM yang dianggap konsumtif ke produktif, cita – citanya beliau ingin membangun infrastruktur irigasi karena targetnya tiga tahun

harus swasembada maka kementerian dan daerah ikut mendukung dan mengarah kesana.

Simpul : Bagaimana prosesnya sejauh ini ?

FJ : Kalau di kita sudah, karena gubernur setelah tiga bulan dilantik dia harus menyelesaikan RPJMD.

Simpul : Apakah ada penyesuaian?

FJ : Ya seperti yang saya katakan tadi, apapun yang menjadi visi dan misi presiden yang terangkum dalam RPJP dan RPJM itu pasti masukannya juga dari daerah yang walaupun sudah ada dokumennya. Misalkan tol laut, sebenarnya diambil dari kebijakan yang terkait dengan maritim. Jawa Timur pasti ada di dokumen RPJMD terkait dengan perikanan dan kelautan misalnya, karena kita garis pantainya terpanjang di Indonesia. Laut kita berbatasan dengan Sulawesi Selatan, jadi seperti di dokumen kita walau titik baliknya presiden lebih kepada Kemaritiman, di sini sudah ada. Kegiatannya, tinggal eksekusinya nanti, mana yang menggunakan kabupaten/kota, mana yang menggunakan dana provinsi, mana yang dari APBN. Jadi tidak ada masalah karena di dokumen – dokumen itu indikasi yang teknisnya nanti ada di dokumen yang lain. Karena indikasi dalam lima tahun itu belum mencerminkan



“Dokumen RPJM dan RPJP itu banyak ke arah politis, itu bukan panduan untuk pelaksanaan di lapangan, itu menjadi indikasi program. Itu menjadi tanda – tanda ini *loh* kira – kira kegiatan yang tidak *sector oriented*, jadi jangan berpikir *ego sector*. Karena kalau berpikir dari situ, uang tidak akan pernah cukup.”

sebuah kegiatan yang mau di eksekusi. Kita tiap tahun ada Musrenbang untuk merencanakan. Mana yang prioritas.

Simpul : Dengan Kabinet baru dan kebijakan baru bagaimana mitra – mitra dinas memandangnya, apakah ada yang baru?

FJ : Pasti ada yang baru. Contoh, sekarang ada Menko Kemaritiman, yang fokus kepada kemaritiman, dulu ada tapi belum maksimal. Tapi presiden bermimpi punya tol laut. Orang dulu tertawa, karena dikira tol laut infrastruktur yang berhubungan dengan jalan. Padahal tidak, karena wilayah kita kepulauan dan lautnya begitu potensi yang besar. Bicara laut kan tidak selalu bicara tentang perikanan, sumber daya ada, di sana ada migas, rumput laut, wisata bahari. Oleh karenanya tinggal dikanalisis, dimodifikasi, diperkuat, diarahkan,



sehingga warna dari APBN berubah. Sesuai dengan mimpinya di visi – misinya. Juga nomenklaturnya baru. Kementerian yang nomenklaturnya baru adalah Agraria dan Kemaritiman. Ini kan sudah menjadi kementerian tersendiri. Dampaknya ke bawah, tetapi permasalahan agraria kan sudah dilakukan walaupun dulu agraria itu BPN, tata ruang itu ada di kementerian PU (Pekerjaan Umum). Tinggal mengelompokan kepada nomenklatur dan struktur, memang oleh pemerintahan sekarang itu di siapkan. Jadi saya istilahkan dokumen RPJM dan RPJP itu banyak ke arah politis, itu bukan panduan untuk pelaksanaan di lapangan, itu menjadi indikasi program. Itu menjadi tanda – tanda ini loh kira – kira kegiatan yang tidak *sector oriented*, jadi jangan berpikir *ego sector*. Karena kalau berpikir dari situ, uang tidak akan pernah cukup. Jadi harus bicara soal program.

S : Bagaimana pengaruhnya di pemda dalam hal ini. Khususnya menyangkut hubungan kerja dengan mitra legislatif ?

FJ : Pasti berpengaruh termasuk dengan dewan, karena dewan itu kan punya tiga fungsi. Hak *budgeting*, hak legislasi dan pengawasan. Jadi kita bicara anggaran, ujung – ujungnya bicara soal kesepakatan, karena produk dari sebuah kebijakan anggaran kalau di daerah itu peraturan daerah. Ini dibahas antara pemerintahan dan dewan. Di Jakarta, APBN juga undang – undang, jadi kalau ada hal – hal yang strategis, pasti melibatkan dewan. Karena eksekutif dan legislatif

menjadi satu kesatuan. Jadi kalau pemerintah itu eksekutif, tapi kalau pemerintahan itu kita dengan dewan.

Simpul : Bagaimana hubungan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan di Jawa Timur?

FJ : Kalau di Jawa Timur, tidak ada masalah dan pembahasan RAPBD 2015 sudah selesai. APBD Jawa Timur setiap tahun, setiap bulan 10 itu sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah. Kita ini pasti tiga besar yang selesai dahulu. Ini kalau tidak ada sesuatu kalau versi daerah akan dijalankan karena sudah mengacu kepada RPJM gubernur, untuk mengeksekusi tahun 2015 saya kira ada yang bisa langsung jalan karena kementerannya tidak ada perubahan nomenklatur, tapi ada yang harus disesuaikan dua kementerian dijadikan satu.

Simpul : Perubahan seperti apa dengan adanya kementerian baru?

FJ : Kalau di daerah tergantung kebutuhan, bisa terpisah atau tidak. Kalau di daerah yang penting ada salurannya, kalau masalah penggabungan juga tergantung daerah, bukannya tidak sinkron tapi sebenarnya yang bagus harus menyesuaikan. Struktur di daerah itu tergantung peraturan daerah. Kalau struktur organisasi itu tergantung dari Kemenenpan, kalau Kemenenpan membuat

peraturan pemerintah, itu kan mengikat. Seperti PP 41 kemarin ya, struktur organisasi yang berubah total itu aba – aba dari pemerintah. Peraturan daerah kan *ga* boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Aba – aba dari kementerian, misalnya, menyuruh berubah Lingkungan Hidup (LH) menjadi satu dengan kehutanan itu selesai. Tapi ketika itu tidak diatur, daerah boleh memilih, dan itu tergantung urgensinya. Koordinasinya supaya mudah ya mengikuti apa yang di Jakarta itu diatur.

Simpul : Apakah ada kendala?

FJ : Mungkin menyangkut dengan pembiayaan daerah, kalau digabung saya kira lebih praktis dan efisien. Tetapi kalau harus di pecah itu beda, contoh, dinas cipta karya dengan tata ruang itu satu. Sekarang *ga* tahu nanti BPN, apakah BPN menjadi sebuah kementerian yang urusannya diserahkan kepada daerah. Ini kan juga belum ada keputusan politik, karena BPN masih menjadi instansi pusat. Jadi kepala Kanwil itu masih dari pusat, Kanwil BPN di Jawa Timur ini ada lima Kanwil. Kanwil keuangan, perbendaharaan, Kanwil agama, Kanwil Kumham, Kanwil BPN itu. Nanti keputusan politiknya seperti apa. Itu kan biaya, kalau itu menjadi sebuah

“Kita *tidak* ada KIH dan KMP, kita koalisi Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur terkenal dengan APBD untuk rakyat..”

organisasi dari organisasi digabung itu bagus. Apakah dari asetnya atau dari pembiayaannya. Ya nanti kita harus menunggu dari Menpan, harusnya segera buat formulasi karena tahun 2015 tinggal sebulan. Kalau tidak anggarannya *ga* bisa dipakai karena nomenklaturnya berbeda.

Simpul : Apa kendala secara politis?

FJ : Kalau di pusat, saya bisa membayangkan tingkat kesulitan di pusat melihat kondisi sekarang walaupun sekarang sudah dianggap



clear karena semua sudah di bagi – bagi peran, namun kalau terkait substansi saya kira belum tentu. Kalau di daerah, khususnya Jawa Timur saya yakin walaupun secara politik beda. Kalau Jawa Timur antara depan dengan belakang kan sama. Yang terjadi praktek di sini adalah koalisi Jawa Timur, jadi Koalisi Merah Putih (KMP) atau Indonesia Hebat (KIH) di sini menyatu.

Simpul : Terjadi pembelahan legislatif terjadi di Jakarta yang juga akan merepotkan. Bagaimana potensinya di Jatim?

FJ : Proses pembahasan APBD itu memang tidak mudah. Butuh perjuangan, bagaimana gubernur bisa meyakinkan koalisi – koalisi di Jawa Timur agar mereka sepakat dan tidak mengikuti Senayan. Kita tidak ada KIH dan KMP, kita koalisi Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur terkenal dengan APBD untuk rakyat. Kan tergantung kepala daerahnya juga, kalau di sini para dewan diajak bicara sama beliau, walaupun 68 persen orang baru, hanya 32 persen yang lama. Itu *nggak* mudah. Kalau koalisi yang paling besar di sini PKB yang paling *gede*. Tapi nyatanya dalam pembentukan pertama kali mereka mengadakan paripurna untuk menunjuk ketua Pansus untuk pembentukan Tatib. Bukan dari Indonesia Hebat, orang Golkar, setelah di lantik satu bulan setelah itu selesai alat kelengkapan dewan, udah selesai APBD sudah ada di Kementerian. Jadi pak Gubernur komunikasinya enak, kalau mau menyampaikan nota keuangan sebelumnya ketemu itu tiga kali dengan ketua fraksi dengan ketua dewan, yang penting informalnya. Itu kesepakatan – kesepakatan, jadi hak apa yang mereka inginkan digali.

Simpul : Proses ini bisa berjalan baik?

FJ : Kita akomodir kebutuhan mereka (dewan). Bappeda sebagai kepanjangan dari gubernur sangat berperan termasuk tim anggaran yang ketuanya Sekda. Saya wakil, teknisnya kita yang mengatur. Dapilnya mana, programnya apa. Sekarang ini kan anggaran kinerja, yang namanya *money follow program* pak bukan sebaliknya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita (Bappeda) *kan juru masak*. Jadi kita paham.

Simpul : Sikap dewan di Provinsi Jatim ?

FJ : 180 derajat terbalik. Karena itu tadi, koalisi Jawa Timur. Semua menyatu dan tidak ada masalah.

Simpul : Apa kebijakan pembangunan di Jatim yang pro rakyat ?

FJ : Kita ini kan bukan orang yang ahli di bidang ekonomi, di bidang sosial – budaya, di infrastruktur. Maka satu, kita punya Dewan Riset



Daerah (DRD), professor – professor ada disitu. Ada orang dari Unibraw, ITS, Unair, terdapat para ahli – ahli di bidangnya, jadi pak gubernur untuk kebijakan strategis lalu untuk *paper academics* para ahli dari universitas tadi yang buat. Lalu masuk ke kita, di jabarkan oleh kita. Pak Gubernur membiayai ini, dan besar untuk biayanya hampir 10 milyar, *focus group discussion*, jadi ilmunya itu seperti itu. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), apa yang harus dilakukan? Teknokratiknya ada di kita sedangkan substantifnya ada di mereka, mereka membuat *policy input*.

Simpul : Apakah ini untuk semua kebijakan pembangunan di Jatim ?

FJ : Untuk semua kebijakan ya. Tapi saya harus memonitor yang di RPJM itu ada yang namanya indikator kinerja utama. Itu, APBD sekian banyaknya, triliunan itu indikatornya apa. Ukurannya apa? Indeks keberhasilannya seperti apa? Kan harus benar kalau *tidak* kan dihujat sama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kita punya kelompok – kelompok. Indikator kita kan pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jadi pasti kalau pertumbuhan ekonomi ini bidang saya yang ekonomi bekerja sama dengan komunitasnya. Itu ada bidang sosial – budaya, kemudian ada bidang



“Selain IPM, pak Gubernur konsen sekali masalah *gender*, yang namanya APE, Jawa Timur masuk terus delapan tahun beruntun menerima penghargaan. Gender di sini itu luar biasa, di RPJM ada, mungkin bapak tidak akan menemukan di Indonesia Gender itu mau diapakan.”

infrastruktur. Kita juga berharap *gender* ini luar biasa, selain IPM, pak Gubernur konsen sekali masalah *gender*, yang namanya Anugrah Parahita Ekapraya (APE), Jawa Timur masuk terus delapan tahun beruntun menerima penghargaan. Gender di sini itu luar biasa, di RPJM ada, mungkin bapak tidak akan menemukan di Indonesia Gender itu mau diapakan. Di Jawa Timur mau diberdayakan untuk konsep mengembangkan usaha, koperasi. Di setiap desa dan kelurahan ada 486, ini dibiayai oleh Gubernur, dikasih 50 juta. Ini khusus untuk perempuan, salah satu koperasi wanita yang terbesar omsetnya di Indonesia itu ada di Jawa Timur, Setia Bakti Wanita. Itu ada di Surabaya, omsetnya sudah hampir 300 milyar setahun. Itu Koperasi Serba Usaha, punya mess, ada retail, dia ada sepuluh unit usaha.

Simpul : Apa peran besar Provinsi yang mendukung Kabupaten/ Kota?

FJ : Banyak hal, atas nama undang – undang, gubernur itu juga memberikan bantuan keuangan diluar pajak dan retribusi. Jadi,

yang namanya bantuan keuangan itu biasanya yang diusulkan oleh bupati, masalah infrastruktur, alat kesehatan, kemudian dari kegiatan ekonomi produktif untuk peningkatan UKM – UKM.

Simpul : Seberapa besar bantuannya?

FJ : Kalau saya total, hampir dua triliun yang disampaikan ke kabupaten/kota. Besarnya tergantung kemampuan fiskalnya dan jumlah penduduknya, semakin dia *tidak* mampu semakin besar bantuannya jadi tidak proporsional tapi juga tergantung PAD-nya. Semakin kecil PAD semakin besar kita bantu.

Simpul : Kalau dewan sudah setuju, bagaimana peran pengawasan eksternal ?

FJ : Sekarang ada undang – undang keterbukaan publik, jadi semua yang ada di program sudah ada di website, sehingga orang bisa melihat. Dari situ nanti kalau dia ingin *trace* kemana bisa saja, termasuk media juga.

Simpul : Apa kendala pokok pembangunan di Jatim?

FJ : Satu, menyangkut SDM, khususnya SDM di SKPD. Kita melihat *money follow function* tapi di SKPD berbeda dan kemampuan *planner*-nya itu masih terbatas. Yang lain itu saya kira infrastruktur termasuk tanah, bagaimana puluhan tahun konsesi jalan tol itu sudah dipegang oleh investor tapi *gak* bisa kerja. Jawa Timur itu sedang mengembangkan jalan lintas selatan, mulai dari Banyuwangi, Jember, Lumajang tapi masih sulit dilaksanakan karena persoalan tanah. Beda dengan di China, ketika pemerintah mau membangun apapun, masyarakat pasti patuh. Ada ego sektoral. Kemarin pak Chairul Tanjung, ingin coba kalau memang tanah negara, proyeknya negara, ini perlakuannya berbeda. Tapi terbalik kalau di sini, kalau swasta yang minta kok *gampang*. Juga ada masalah keterbatasan fiskal, APBD Jawa Timur kan terbatas, hanya 23 triliun untuk 38 kabupaten/kota.

Simpul : Apa harapan lima tahun kedepan pada pemerintahan baru?

FJ : Ada beberapa hal, yang menyangkut revolusi mental misalnya. Dalam kampanyenya ingin merubah mental masyarakat, mental bangsa dan negara ini. Bagi Jawa Timur, itu yang pasti ingin ada revolusi fiskal. Bayangkan provinsi seperti Jawa Timur, pendapatannya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), 80 persen dari situ dan itu sangat terbatas. Jawa Timur hanya punya 23 triliun, untuk belanja

“Senayan (DPR RI) harus memberikan kewenangan dengan porsi yang lebih besar kepada Jatim Mungkin hampir dari cukai 100 triliun ke negara, dari Jawa Timur, Sampoerna itu 20 Triliun, kemudian Gudang Garam. Jadi totalnya kira – kira 50 Triliun sendiri masuk ke negara. Kembalinya hanya dua persen.”

pegawai, hampir 45 persen. Jadi praktis dari itu, dikurangi dari bagi hasil ke kabupaten/kota. Saya membagi uang untuk program itu hanya delapan triliun, berat. Harus meng-*cover* jalan yang sampai 1800 km, kemudian irigasi harus kita rawat, perumahan. Senayan (DPR RI) harus memberikan kewenangan dengan porsi yang lebih besar kepada Jatim. Mungkin hampir dari cukai 100 triliun ke negara, dari Jawa Timur, Sampoerna itu 20 Triliun, kemudian Gudang Garam. Jadi totalnya kira – kira 50 Triliun sendiri masuk ke negara. Kembalinya hanya dua persen. Jawa Timur ini kalau di Amerika Serikat itu Texas-nya. Migas itu potensi pertama di Riau atau Bontang, nomor tiga kan di sini. Sekarang di *off shore* Gresik sampai Madura. Bawahnya Jawa Timur ini *lengoh tok* (*semua minyak*). Gula juga hampir 48 persen stok nasional dari Jawa Timur. Jagung, lima juta ton kita. Itu hampir 40 persen. Tembakau, 60 persen stok nasional dari sini. Garam itu 50 persen dari sini.

Simpul : Berapa persen Jawa Timur memberikan kontribusi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional?

FJ : Kita setelah DKI Jakarta. Kita kan Produk Domestik Regionalnya 1.036 Triliun, ini nomor dua setelah DKI Jakarta. Dan juga tiap tahun naik, pertumbuhan kita dari BPS, 6,0, jauh di atas nasional.



Ir. Sarwo Handhayani, M.Si

Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2013 - 2014

“RPJMD itu sendiri tentunya harus mengakomodir janji – janji kepada masyarakat sewaktu dalam masa kampanye. Jadi dengan kata lain kalau dikemas kan menjadi visi – misi.”

Sarwo Handayani, Birokrat Karir Pemda DKI yang sangat menguasai tentang pembangunan dan probelamatiknnya. Beliau menganggap bahwa tidak ada permasalahan yang berarti bagi DKI terhadap penyesuaian program pembangunan DKI dan sinergitasnya dengan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Tentu saja ini beralasan, karena sebelum terpilih menjadi Presiden RI periode 2015-2019, Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI masa bakti 2012-2017. Bagaimana pandangan Ir. Sarwo Handayani, M.Si (SH) pembangunan DKI dan pemerintah pusat, berikut penuturan di ruang kerjanya di Balai Kota DKI :

Dalam Pemerintahan Baru Lembaga Perencana Harus Lebih Kuat

Simpul : Bagaimana ibu menterjemahkan visi dan misi pemerintah baru kedalam pembangunan daerah (RPJMD), khususnya DKI sebagai Ibukota negara ?

SH : Sebetulnya seorang kepala daerah yang terpilih menjadi gubernur dalam menjalankan pemerintahannya dalam periode yang telah ditetapkan harus mengacu kepada RPJMD dan itu sudah menjadi peraturan. Pasti itu berlaku umum ke semua daerah. RPJMD itu sendiri tentunya harus mengakomodir janji – janji kepada masyarakat sewaktu dalam masa kampanye. Jadi dengan kata lain kalau dikemas kan menjadi visi – misi. Visi – misi ini dipertimbangkan sewaktu mengukuhkan menjadi acuan kerja itu mau *ga* mau haru melihat rencana jangka panjangnya. Jadi dengan kata lain kita punya rencana jangka panjang, kemudian di potong – potong menjadi lima tahun – lima tahun. Sewaktu calon kepala daerah mau menyampaikan visi – misi, dia juga harus *ngintip* ke kami, jadi sewaktu saya menjadi kepala Bappeda, calon – calon Gubernur memang minta bahan. Untuk visi misi presiden kita tinggal menyelaraskan saja dengan yang sudah ada.

Simpul : Jadi waktu tahun 2012 itu RPJMD DKI itu sudah ada sebelum Presiden baru ?

SH : Tidak, kan sudah habis masa jabatannya. Jadi kita sedang



“Seorang calon kepala daerah waktu mau kampanye *ngintip lah* ya. Minta masukan dari pemerintah daerah saat itu. Kemudian yang terpilih itu, istilahnya itu tinggal menyesuaikan dengan Gubernur yang terpilih. Jadi *tidak* bikin merombak total.”

mempersiapkannya, tapi kan sudah ada lima tahunannya,. Penggalan – penggalannya kan sudah ada. *Nah*, itu tentunya seorang calon kepala daerah waktu mau kampanye *ngintip lah* ya. Minta masukan dari pemerintah daerah saat itu. Kemudian yang terpilih itu, istilahnya itu tinggal menyesuaikan dengan Gubernur yang terpilih. Jadi *tidak* bikin merombak total, yang diupayakan masuk ke dalam itu penekanannya ada di mana, mungkin yang tadinya prioritas satu menjadi prioritas dua. Terus juga biasanya tata cara mencapainya, itu ada tata cara penekanan – penekanan yang harus dituangkan didalam RPJMD. Nah, untuk gubernur terpilih Pak Jokowi dan Pak Ahok, dulu kita lakukan begitu. Jadi begitu beliau menjabat, kalau *nggak* salah ada waktu tiga bulan kalau *gak* salah, dalam waktu itu kita harus menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama dan disahkan secara hukum.

Simpulan : *Bagaimana dengan adanya gap waktu antara Jabatan Kepala Daerah dan Presiden ?*

SH : Jadi nanti kalau pertanyaannya bagaimana dengan presiden. Memang *nih* kurun waktunya daerah, Jakarta dengan Presiden itu beda, beda dua tahun. Ada *gap* dua tahun. Saya dengan isu beberapa waktu yang lalu tentang wacana kalau bisa Presiden dan Gubernurnya dalam satu kurun yang sama. *Lah*, sekarang kalau berbeda

“Visi – misi kira –
kira penekanan
– penekanan baru
untuk Indonesia,
tentunya semua
daerah akan
menyesuaikan.
Kita kan kenal ada
midterm review untuk
semua rencana lima
tahunan, RPJM, juga
untuk RPJP.”

bagaimana? Menurut hemat saya itu bukan menjadi masalah, jadi nanti Pak Presiden dan Wakil Presiden punya visi – misi kira – kira penekanan – penekanan baru untuk Indonesia, tentunya semua daerah akan menyesuaikan. Kita kan kenal ada *midterm review* untuk semua rencana lima tahunan, RPJM, juga untuk RPJP. Harusnya *sih* kesempatan itu harus bisa dipakai untuk daerah dalam men-*judge* kebijakan baru yang datang dari tingkat yang lebih tinggi.

Simpulan : Jadi hanya penekanan dan prioritas yang disesuaikan dan berubah?

SH : Iya, tapi bisa juga yang baru, contohnya waktu pemerintahan Jokowi jadi Gubernur itu tentang kesehatan, cuman memang *stressing* yang tadinya *ga* kelihatan. Beliau konsennya dibanjir dan macet yang menjadi promadona DKI lah. Terus yang beliau *stressing* itu tentang pendidikan, ada kartu pintar Jakarta, transportasi semisal MRT, pariwisata, saya rasa hampir semua digarap. Jadi memang penekanan, penekanan kan kajiannya permasalahan pasti kan harus dijawab seperti ini ya, sekarang beliau memilih mana *nih* yang menjadi warna pemerintahannya. Kalau transport dan banjir itu memang mau tidak mau itu siapa pun gubernurnya harus menyesuaikan dengan ini. Ini hajat hidup orang banyak.

Simpulan : Apakah ada sesuatu yang bisa diharapkan “lebih” dari presiden untuk Pemda DKI ?

SH : Iya, itu saya pikir jadi salah satu peluang buat DKI mendapatkan

perhatian lebih, bahwa kita ini ibu kota, yang bisa didudukkan seperti yang dalam undang – undang. Tapi sebetulnya kita *tidak* egois, kita juga memperhatikan kemampuan pemerintah pusat. Jadi kasarnya begitu, *kok* kita dibantu sebanyak ini ya, saudara kita yang di timur itu uang segitu bisa buat apa. Jadi walaupun pemerintah pusat memberikan perhatian yang besar kepada DKI, tapi mengingat kita berupa negara kesatuan. Gap itu *nggak* boleh *njomplang*. Kita pikir Jakarta itu lebih baik mengeksplorasi “sumber daya” yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi misalnya infrastruktur. Infrastruktur ini kan maunya di bantu pemerintah pusat 49 persen, kalau begitu habis *dong*. Bagaimana Jakarta harus berpikir agar investor berkontribusi lebih banyak di dalam pembangunan, sementara pemprov juga harus lebih cerdas mengemas program – program infrastruktur itu dalam paket kerjasama yang saling menguntungkan dalam investor.

Simpulan : Apakah ada kendala dengan prioritas pembangunan nasional bagi DKI ?

SH : Saya pikir, setiap kebijakan pusat itu kan berlaku umum, jadi daerah tentunya meng-*adjust* sesuai dengan kondisi di tempatnya masing – masing. Kalau berkaitan dengan kemaritiman, saya tangkap berkaitan dengan komunikasi, kemudian kedua dengan sumber daya kelautannya, lalu yang ketiga keamanannya. Kita kan punya Kepulauan Seribu, dulu daerah tertinggal, sebabnya apa? Karena komunikasi yang miskin, kapalnya terbatas, *nggak* ada subsidi, orang itu kalau mau menikmati pendidikan di Jakarta luar biasa harus menempuh perjalanannya. Supaya komunikasi antara Jakarta daratan dan Kepulauan juga baik kita mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai objek wisata, Nah saya pikir itu bukan menjadi kebijakan yang bertentangan, kita malah senang bisa mendorong komunikasi daratan dan kepulauan itu tidak ada hambatan. Semudah kita mencapai dari daratan ke daratan lainnya. Tapi kita juga *ga* egois, kita juga harus mensupport kebijakan pusat, Jakarta mau kemana *gitu* kan. Harus dihubungkan dengan tol maritim, kapal cepat atau apa *gitu*. Ya Jakarta harus mendukung kebijakan itu. Kita juga punya pantai sepanjang 32 kilometer, kalau untuk pelabuhan, semisal kita sedang merencanakan memperkuat hubungan antar pulau itu dengan dermaga atau pelabuhan yang ada di Muara Angke. Itu kan bisa di *upgrade* terus juga karena wisata kita tidak hanya ingin wisata penumpang, kita juga menyiapkan pelabuhan wisata. Rencananya kita akan membuka dekat Pluit, jadi dekat pantai Mutiara.



“Harusnya semua kepala daerah terutama, lurah, camat itu perannya lebih besar dari yang sekarang, maksudnya semisal ada usulan jalan tertentu harus diperbesar, lurah itu yang benar – benar tahu.”

Simpul : Soal giant wall itu bagaimana bu?

SH : Kita bersama pemerintahan pusat merencanakan itu, karena kan teluk Jakarta itu tidak hanya di Jakarta, ada Jawa Barat dan Banten. Jadi bagaimana mengamankan Pantai Utara Jawa dengan melihat karakteristik permasalahan setempat. Jadi apa yang kita lakukan nanti dengan *giant wall* mungkin nanti akan menjadi pembelajaran kota-kota pantai seperti, Semarang, dan kota – kota yang di pinggir Pantai Utara Jawa harus juga dilakukan hal yang mirip lah. Tapi kalau daerahnya luas, kenapa harus menguruk.

Simpul : Jadi ini juga implikasi dengan adanya kebijakan kemaritiman ini bu?

SH : Iya, tapi kita kan *ga bisa ujug – ujug (tiba-tiba)*, semisal pemerintah bilang begini terus saya buka ini, kan kita lihat juga karena itu akan diolahkan, dijadikan rencana jangka panjang pemerintah pusat, nanti pasti ada arahan untuk DKI. Jadi masing – masing bagi bolanya ada di pemerintah pusat.

Simpul : Jadi itu belum bu ya?

SH : Belum, ya begitu itu jadi daerah akan mengkonsolidasikan dengan itu, pasti Bappenas bergerak. Daerah diundang, kami butuh satu hal yang menyeluruh dibutuhkan oleh Indonesia

Simpul : Dukungan dari DPRD itu sendiri bagaimana?

SH : Mungkin kalau DPR saya agak *surprise* juga, melihat dewan nasional ya. Kalau DPRD lebih beretika, *nggak* seheboh itu. Saya yang dari pemerintahan pusat agak *shock* karena sepertinya tidak ada etika ya. *Tidak* usah etika di DPR lah, etika kita sebagai bangsa Indonesia. Alhamdulillah di Jakarta tidak seperti itu.

Simpul : Bagaimana partisipasi warga dalam pembangunan ?

SH : Semua kita libatkan dalam musrenbang dan efektif, yang saya rasakan selama ini usulannya terlalu banyak. Kemudian harusnya semua kepala daerah terutama, lurah, camat itu perannya lebih besar dari yang sekarang, maksudnya semisal ada usulan jalan tertentu harus diperbesar, lurah itu yang benar – benar tahu kalau itu memang harus diperbesar. Jadi lurah itu bisa menjadi saringan untuk kebutuhan wilayahnya sendiri. Sebetulnya konsep yang ingin DKI wujudkan itu lurah dan camat itu menjadi *estate manager*. Kalau *estate manager* itu kan baik, mereka itu sebagai perencana, pengawas, pengendali, segala macam lah.

“Akar permasalahan kota kan urbanisasi, memang. Orang lebih ingin mendapatkan peluang untuk hidup lebih baik kan, daerah *gak* punya sumber ya kenapa tidak ke Jakarta.”

Simpul :Bagaimana kelompok yang menolak Gubernur DKI ?

SH : Masih bisa dirembuk, demo juga *ga* apa – apa, kita kan bisa komunikasi. Kenyataannya memang demo tidak hanya jumat, tapi juga hampir setiap hari.

Simpul :Bagaimana peran pengawasan eksternal ?

SH : Semua berawal dari perencanaan, pelaksanaan tidak *ujug – ujug* dilakukan. Perencanaannya kan disusun, dokumennya juga dari *bottom up* dan *top down* planning itu juga setahun sebelumnya. Di dalam menyusun perencanaan kita juga mengacu pada peraturan - peraturan yang dikeluarkan oleh Bappenas. Kita itu sudah melakukan pendekatan ke masyarakat. Jadi kan ada politis, ada teknokratis, ada segala macam itu. Itu kita lakukan semuanya, sudah jelas tuntunannya dari Bappenas. DKI itu punya pedoman perencanaan pembangunan. Jadi, waktunya kapan, caranya bagaimana, kita punya. Kalau kita menjalankan itu,sebetulnya semua *stakeholder* itu terwakili, termasuk aspirasinya. Bisa juga sih lima orang yang *ujug – ujug* menamakan apa, bilang belum diajak *ngomong* masalah tersebut. Ya mungkin, itu tidak masuk kedalam kelompok itu, tapi kan kita tidak bisa memasukan semuanya. Semisal bahas tentang profesi, kita urutin *nih* yang terdaftar resmi sebagai organisasi profesi kita undang, yang LSM juga kita undang. Kita ambil kan, kita punya daftarnya. Mungkin belum tersosialisasi. Tapi ya kalau memang aspirasinya bagus kenapa *tidak*.

Simpul : Apa yang menjadi kendala yang signifikan dalam pembangunan katakanlah merealisasikan perencanaan pembangunan DKI?



SH : Akar permasalahan kota kan urbanisasi, memang. Orang lebih ingin mendapatkan peluang untuk hidup lebih baik kan, daerah *gak* punya sumber ya kenapa tidak ke Jakarta. Kalau menyelesaikan masalah itu, tentu ya kita tidak bisa sendiri kan. Jakarta berbuat, kota lain juga berbuat, kalau kota lain tidak mampu ya harus ada bantuan dari pemerintahan pusat. Itu yang namanya pemerataan pembangunan, macam – macamnya banyaklah contohnya. Jakarta sendiri apa yang harus diperbuat? Kita nanti suatu saat, kita kan *ga* punya modal, kita buat saja bambu di kolong jembatan. Nanti suatu saat kita sudah punya rumah susun sewa itu yang kayak gitu kita *sweeping*, mereka kita suruh harus masuk ke rumah sewa. Tapi sewaktu kita menyusuri rumah di pinggir sungai, ternyata mereka sudah 30 tahun di sana. Kalau begitu tetap kita suruh mereka pindah ke rumah sewa lalu tempat mereka kita rubah menjadi taman. Kalau rumah susunnya sudah lengkap kita yakin bahwa itu yang *keleleran* sudah *gak* ada lagi.



Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc

Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja
Kementerian PPN/Bappenas

“RPJMN itu untuk membantu presiden menjalankan visi misinya”

Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia. Di lembaga ini disusun konsep arah kebijakan pembangunan nasional untuk jangka panjang (20 tahun) yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN menjadi petunjuk kemana arah pembangunan nasional Indonesia selama 20 tahun ke depan. Dari RPJPN ini kemudian diturunkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) lima tahunan sesuai dengan masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Bagaimana Bappenas menterjemahkan RPJPN kedalam RPJMN dan menyesuaikan dengan visi misi seorang presiden yang baru terpilih. Berikut penjelasan Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc di ruang kerjanya.

Pembangunan Itu Untuk Membangun Manusia

Simpul : Apa perbedaan dalam penyusunan rencana pembangunan yang dulu dan sekarang ?

AH : Setiap lima tahun menyusun RPJMN, tidak seperti dahulu GBHN. RPJMN mengacu pada RPJPN. Setelah perubahan sistem politik yang dulu presiden dipilih oleh MPR, sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Dulu MPR menerbitkan GBHN sekarang tidak, maka presiden yang sekarang ini adalah amanat rakyat. Kalau dulu istilahnya presiden mandataris MPR. Oleh karena itu, proses perencanaan menjadi berbeda. Kalau dahulu presiden melaksanakan apa yang dimandatkan MPR, sekarang presiden melaksanakan janji – janji selama kampanye. Pembangunan itu harus berkesinambungan dari satu level ke level yang lebih baik lagi. Karena presiden itu dipilih lima tahun oleh rakyat.

Simpul : Untuk menjamin keberlanjutan itu darimana?

AH : Kalau misalkan sekarang presidennya A, orangnya lari ke kanan, lalu kemudian lima tahun berikutnya presiden B, berbalik lagi arahnya ke kiri. Oleh karena itulah disusun Undang – Undang pembangunan jangka panjang. Jadi RPJP itu memberi koridor arahnya itu harus selalu selaras dengan tujuan berbangsa yaitu pembukaan UUD 1945, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam menjaga ketertiban dunia, dan segala macam. Jadi, visi utama negara itu, lalu kita punya visi dalam 20 tahun, kemudian itulah sebagai koridor setiap presiden dalam lima tahun itu tidak boleh melenceng dari itu. Itu untuk menjaga kesinambungan dan arah. Kemudian, ada perubahan presiden A dan presiden B. Supaya sistem



hasil evaluasi perjalanan RPJM yang kemarin. Tahun lalu kan walau RPJM belum selesai, kita sudah punya bahan evaluasinya. Kita punya *mid-term review* itu sebagai salah satu dasar untuk kita tahu program – program apa yang kira – kira sudah bagus berjalannya, lalu program – program yang perlu kerja keras untuk melaksanakannya dan juga yang sulit untuk dicapai. Itu menjadi bahan pertimbangan menyusun RPJM yang kemarin, jadi waktu kita *review* RPJM itu kita kasih warna merah, kuning, hijau. Merah, ada masalah ada sebuah isu yang terjadi. Dari kita lihat hasil evaluasi itu kemudian kita rancangam teknokratik RPJMN tersebut. Jadi dasarnya “ilmiah”, pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Dari kajian – kajian *background study* dan dari hasil evaluasi RPJM yang sedang berjalan, kita susunlah itu. Inilah fungsinya Bappenas sebagai *think tank*. Kemudian rancangan teknokratik ini menjadi alat untuk penyusunan RPJM yang sesungguhnya, karena pendekatan ini teknokratiknya pendekatan pengetahuan.

Simpul : Ada proses penyesuaian antara visi misi presiden dan rancangan RPJMN ?

AH: Kampanye calon presiden dalam pencalonannya itu sebetulnya adalah proses perencanaan. Jadi beliau

perencanaan itu berjalan dengan baik, tersistematika terus akhirnya berjalan dengan baik kita punya Undang – Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disitu diatur bagaimana perencanaan di tingkat pusat, lima tahunan seperti apa, jangka panjang seperti apa, jangka menengah seperti apa, lalu juga daerahnya. Pembangunan nasional itu bukan yang pusat, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat saja tapi juga pembangunan dilakukan oleh bangsa ini. Termasuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Jadi SPPN inilah yang menjadi pemersatu, untuk membangun arah RPJP itu bisa dijaga.

Simpul: Bagaimana penyusunan RPJMN yang sesuai dengan visi misi presiden baru?

AH : RPJMN harus diselesaikan tiga bulan pasca presiden dilantik. Waktu tiga bulan itu kan sempit, Bappenas sebagai badan perencanaan pembangunan nasional mesti mempersiapkan diri dahulu. Jadi harus kita persiapkan yang baik, oleh karena itu sejak tahun sebelumnya sudah dimulai dengan kajian – kajian untuk membicarakan isu – isu strategis pembangunan. Lalu juga dilihat

“Pembangunan nasional itu bukan yang pusat, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat saja tapi juga pembangunan dilakukan oleh bangsa ini. Termasuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota.”

berjanji atau berkampanye akan mengembangkan program ini, program itu. Misalnya sekarang ingin memperkuat kedaulatan pangan, lalu kemaritiman dikembangkan. Itu adalah janji – janji politik. Dan janji – janji politik itu harus ditampung dalam perencanaan nasional, sehingga nanti RPJM yang kita miliki adalah gabungan antara janji – janji kampanye politik tersebut dengan pengetahuan dan analisis. Inilah yang kita jadikan RPJM, kemudian prosesnya tentu saja bukan Bappenas sendirian tapi kita juga menampung pendapat para ahli. Kita adakan diskusi diberbagai Universitas di Indonesia, mulai dari yang diujung Sumatera ada Universitas Andalas sampai dari Papua ada Universitas Cendrawasih. Jadi kita diskusikan dengan semuanya itu lalu timbullah teknokratiknya. Teknokratik ini kita *mix* dengan unsur dari politik maka muncul rancangan awal RPJM. Kita terus menggali *stakeholder* terkait. Kita juga sudah merencanakan dalam waktu dekat ini Musrenbangkan. Akhirnya kan sebelum *finish* nanti di Musrenbang-kan, tapi menyiapkan ini kita adakan dulu Musrenbang di tingkat regional di lima tempat, rencananya adalah di kota Palu untuk wilayah Sulawesi, lalu di kota Ambon untuk di Papua dan Maluku Utara, lalu juga di Tarakan, untuk kawasan Kalimantan, lalu di Belitung untuk kawasan Sumatera, dan untuk Jawa, Bali serta Nusa Tenggara akan diadakan di Lombok. Jadi itu prosesnya, setelah masukan dari itu sambil kita lakukan diskusi diberbagai wilayah tersebut. Setelah kita punya RPJM kita Rakorbangpus-kan terlebih dahulu, artinya kita sampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga, daerah juga hadir, Bappeda juga. Begitu kita sampaikan nanti berdasarkan rancangan awal ini, kementerian dan lembaga (K/L) ini menyusun rancangan Renstra K/L. Jadi inilah yang menjadi rancangan K/L untuk rancangan Renstra untuk lima tahun kedepan. Untuk menjamin unit perencana konsisten dengan RPJMN maka akan ada yang namanya penelaahan bersama – sama dengan Bappenas. Jadi untuk cek konsistensi bahwa program – program, isu – isu strategis pembangunan itu tertampung di sana.

Simpul : Jadi mereka semua konsultasi dengan Bappenas, dari K/L juga konsultasi dengan Bappenas?.

AH: Lebih kepada ditelaah bersama – sama, itu wajib. Seperti konsultasi seorang pasien yang harus datang ke dokter. Jadi dia harus datang ke deputi sektor di Bappenas yang menjadi mitra kerjanya. Nanti gabungan antara Renstra K/L berupa program – program yang lebih rinci lalu hasil dari Musrenbang di lima kota tadi akan digabungkan dengan rancangan awal tadi menjadi rancangan RPJMN. Nanti kemudian RPJMN yang sudah agak matang ini kita diskusikan lagi terakhir kalinya dalam Musrenbangnas.

“Janji – janji politik itu harus ditampung dalam perencanaan nasional, sehingga nanti RPJM yang kita miliki adalah gabungan antara janji – janji kampanye politik tersebut dengan pengetahuan dan analisis.”





“Kampus ini tempat orang yang punya sumber pengetahuan yang besar. Jadi kalau kita tidak terkait dengan mereka bisa tersesat.”

Simpul : Apa targetnya ?

AH : Nanti disitu akan ada perbaikan – perbaikan lagi, ada masukan – masukan lagi. Musrenbangnas ini yang diundang bukan hanya pemerintah tapi juga organisasi masyarakat sipil, dari Universitas – Universitas, para akademisi. Karena bagaimanapun juga di seluruh dunia ini dasar – dasar pengetahuan yang menjadi basis pengambilan keputusan kan dari kampus. Kampus ini tempat orang yang punya sumber pengetahuan yang besar. Jadi kalau kita tidak terkait dengan mereka bisa tersesat. Setelah Musrenbangnas selesai, kita rekapitulasi hasilnya seperti apa, kita rangkum dalam bentuk RPJM, kita sampaikan dalam sidang kabinet. Setelah itu apakah presiden setuju, kalau setuju akan ditetapkan maka itulah yang akan kita lakukan lima tahun kedepan.

Simpul : Itu harus diajukan juga ke DPR ya pak?

AH : RPJMN ini adalah dukungan secara legal aspek dibentuk

dalam Peraturan Presiden (Perpres). Jadi karena Perpres menjadi domain pemerintah, inilah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebetulnya tanpa konsultasi dengan DPR pun hak presiden, hak pemerintah. Jadi RPJMN ini kan menjadi acuan dalam membuat RKP tahunan, dari RKP itu menjadi landasan dalam pembahasan APBN ke DPR.

Simpul : Jadi sebagai dokumen perencanaan nggak perlu persetujuan DPR?

AH : Kalau dari peraturan perundang – undangan *nggak* ada. Ini adalah *domain* pemerintah, tapi bahwa kemudian ini perlu disosialisasikan, tidak masalah. Sosialisasi tidak hanya kepada DPR, tapi juga kepada masyarakat luas. Lalu bagaimana dengan daerah dan Renstra, tadi Renstranya kan sudah ada. Jadi setelah RPJMN ini ditetapkan dalam bentuk Perpres, maka seluruh Renstra K/L disesuaikan dengan itu. Kita kan juga berpikir jangan – jangan ada kebijakan tertentu yang harus masuk pada saat sidang kabinet. Kalau ada perubahan yang *significant* K/L harus menyesuaikan dengan Renstra ini. Jadi nanti ada proses penyalarsan Renstra K/L, dan itu dilaksanakan secara bilateral dengan Bappenas. Jadi seperti tadi saat mereka menyusun rancangan K/L-nya disesuaikan lagi dengan itu, bersama – sama dengan Bappenas. Lalu untuk yang daerah kan ada yang RPJMD, yang agak rumit karena RPJMD ini masa berlakunya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, ada yang saat RPJMD mau diterbitkan, ada yang baru mau buat, bisalah, sebagai referensi. Tapi bagi yang sudah berjalan dua atau tiga tahun nanti akan ada sebuah proses penyesuaian – penyesuaian juga.

Simpul : Apakah daerah perlu penyesuaian terhadap RPJMN yang baru ?.

AH : RPJMN diatur dalam PP no. 40 tahun 2014. Nanti itu prosesnya mengikuti itu. Ada sidang kabinet, dan kita juga bergantung kepada Peraturan Menteri terkait dengan pedoman penyusunan RPJMN.

Simpul : Kalau kaitannya dengan fungsi pengawasan RPJMN diluar pemerintahan semisal LSM pak?

AH : Memang manajemen itu kan berawal dari *planning*, lalu ada implementasi, lalu ada evaluasi. Dari evaluasi itu ada *planning* lagi. Pelaksanaan nanti kan harus ada pengawasan, itu kan proses manajemen secara umum. Evaluasi bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu dari internal pemerintahan sendiri, juga masyarakat. Asal jelas yang dievaluasi, usulan masyarakat kita terima. DPR juga bisa

“Kita sudah
buat matriks itu.
Prabowo – Hatta,
programnya seperti
ini, lalu Jokowi
– Jusuf Kalla,
programnya itu.
Kemudian Jokowi
– Jusuf Kalla yang
jadi kita sudah
ambil anjang –
anjang.”

melihat. Dari situ maka setiap tahun waktu pengalokasian anggaran, termasuk juga RKP, itu kan menjadi bagian dari dinamika diskusi. Jadi kalau kita mau membangun 1000 km jalan misalnya, hanya tercapai 500 km? Apakah karena anggarannya yang kurang atau karena manajemennya yang salah. Seperti semisal ada kalau tahun lalu dikasih 100 rupiah saja tidak habis hanya paling 70 rupiah saja kok tahun depan minta 200, itu walau pun jelas usulannya akan meningkatkan ini atau itu. Tapi kemampuan manajemennya kurang, ya akan jadi salah satu pertimbangan dalam alokasi penganggaran.

Simpul : Bagaimana menjaga konsistensi visi misi presiden baru terhadap RPJPN?

AH : Sebetulnya kita menyusun RPJMN ini adalah untuk membantu Presiden. Kita kan kementerian di bawah Presiden, kita kan bagian dari pemerintah. Menyusun perencanaan lima tahun, sehingga janji – janji beliau yang direncanakan dalam kampanye itu bisa terlaksana. Tapi kita menjaga bahwa program – program ini akan mengarah kepada pencapaian tujuan nasional yang ada dalam RPJP. Jadi prosesnya adalah dulu ada dua calon Presiden, kita sudah buat matriks itu. Prabowo – Hatta, programnya seperti ini, lalu Jokowi – Jusuf Kalla, programnya itu. Kemudian Jokowi – Jusuf Kalla yang jadi kita sudah ambil anjang – anjang. Ada yang berbeda dalam RPJMN kita dengan yang lalu, yang lalu kan ada bidang – bidang lalu prioritas dari satu sampai 12 itu. Lalu untuk saat ini kita prioritasnya ada pada Nawa Cita. Kalau dibaca pada dokumen kampanye itu, visi – misi yang kita ambil dari yang dideposit di KPU. Ini kita buat

struktur seperti sebelumnya, bidang – bidangnya. Sekarang bidang prioritasnya adalah dari Nawa Cita itu. Untuk menjamin Nawa Cita itu konsisten dengan RPJP kita lakukan pemetaan, apakah yang di programkan ini ada *gak* dalam RPJP ini. Itu kan ada delapan bidang dalam RPJP, lalu Nawa Cita ada *gak* dekat. Itu untuk memudahkan kita, kita catat disitu dan masuk di teknokratik apa. Sehingga kita bisa mengelompokkan, sehingga sesuai dengan struktur yang ada selama ini. Jadi nanti kalau dilihat RPJM kita bidang – bidangnya berbeda. Bukan hanya mirip dengan Nawa Cita-nya, tapi memang Nawa Cita-nya. Jadi struktur bukunya sama seperti Nawa Cita-nya, Cita pertama adalah seperti ini, programnya seperti ini.

Simpul : Bagaimana kaitannya dengan program presiden sebelumnya?

AH : Dari hasil analisa itu kemudian masuk sebagai bahan penyusunan kebijakan. Jadi kebijakan dan strategi itu sudah mempertimbangkan dari hasil yang kemarin. Juga termasuk pertimbangan dari kendala dan hambatannya. Jadi semisalkan ada sebuah program yang tidak berhasil, oleh karena itu dilakukan perbaikan kebijakan dan strateginya.

Simpul : Jadi perbedaannya lebih kepada struktur dan skala prioritas ?

AH : Yang penting pembangunan itu untuk membangun manusia. Jadi bukan untuk pameran PDB-nya sekian. Tapi apakah kesejahteraannya baik dan manusia ini tidak hanya dilihat dari segi kekayaannya. Oleh karena itu ada yang namanya revolusi mental. Seringkali kita lihat sesuatu yang sama tetapi sebenarnya berbeda. Termasuk juga arahan dari pimpinan tentang RPJM di mana ingin meningkatkan peran Indonesia Timur, 30 tahun ini kan kontribusi Jawa dan Sumatera tidak berubah, sekitar 80 persen, jadi hanya 20 persen saja. Ini hati – hati juga ya, kalau di politisir bahaya juga. PDB itu kan produk domestik bruto, yang memproduksi itu kan manusia. Manusia kan 60 persen ada di Jawa. Jadi ada masalah distribusi penduduk, sebetulnya itu juga yang dilihat. Itu hal yang penting, bagaimana penduduk itu tidak hanya berkumpul di Jawa dan Sumatera. Jadi kemudian kemarin pak Menteri mengatakan Jembatan Selat Sunda stop, karena cara berpikrinya adalah bukan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tetapi bagaimana distribusi keseimbangannya. Kalau Jembatan Selat Sunda itu dibuat dalam lima atau sepuluh tahun selesai maka Jawa dan Sumatera akan maju pesat. Timur ketinggalan, dan itu bisa berimplikasi pada politik, juga ketimpangan antar budaya.

“Yang penting pembangunan itu untuk membangun manusia. Jadi bukan untuk pameran PDB-nya sekian. Tapi apakah kesejahteraannya baik dan manusia ini tidak hanya dilihat dari segi kekayaannya. Oleh karena itu ada yang namanya revolusi mental.”

Simpul : Bagaimana dengan peran swasta?

AH : Jadi kan begini, kalau kita mempelajari pembangunan. Ada pepatah ada gula ada semut, kita tinggal mengasihkan gula di sana. Supaya ada gula di sana, pemerintah dulu lah. Sekarang Indonesia ini produsen Sawit terbesar di dunia. Sawit bukan tanaman asli Indonesia, aslinya Afrika. Dulu tahun 80’an kita hanya punya beberapa ratus hektar itu karena apa? Kita pakai Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN). Zaman orde baru ya, Bappenas juga melihat minyak nabati ini potensi besar, lalu di kembangkan melalui PTPN, program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan sebagainya. Pembangunan nasional kan tidak semua dibangun oleh pemerintah. Pemerintah itu fokus kepada barang – barang publik. Jadi bukan untuk membangun yang privat. Swasta tidak mau investasi jika tidak ada *return*. Jadi, seperti bangun jalan tol, swasta boleh tapi tanahnya tetap milik negara. Supaya swasta mau bangun jalan, jalan itu untuk publik, sekarang karena daya beli sudah tinggi, bayar tol. Jadi swasta diberi insentif supaya mau bangun jalan tol. Dia dapat untung dari situ, tapi juga masyarakat terbantu dengan transportasi lancar, kalau lancar logistik lebih murah sehingga barang lebih murah.



“Supaya swasta mau bangun jalan, jalan itu untuk publik, sekarang karena daya beli sudah tinggi, bayar tol. Jadi swasta diberi insentif supaya mau bangun jalan tol.”

Simpul : Bagaimana dengan anomali pertumbuhan ekonomi tinggi tapi ternyata indeks GINI melebar, bagaimana bisa hal itu terjadi?

AH: Memang terjadi ya, pertumbuhan kita baik, secara makro pertumbuhan kita bagus. Tapi memang ada kejadian indeks GINI naik. Indeks GINI kan menggambarkan pembagian kue. Kuenya semakin besar, jadi kalau indeks GINI semakin kecil maka dibaginya semua rata. Tapi kalau membesar berarti tidak rata. Ada kelompok tertentu yang dapatnya sedikit, kelompok yang sedikit dapat banyak. Oleh karena itu saat ini pemerintah lebih fokus pembangunan kepada manusia. Semua naik, jadi ada kelompok yang pendapatannya 100 rupiah per tahun ada juga yang cuman 100 juta rupiah. Setelah itu tahun berikutnya yang 100 rupiah ini naiki menjadi 110 rupiah. Tapi yang 100 juta itu naik jadi 110 juta, sehingga selisihnya kan tambah naik juga. Sama – sama naik tapi jumlahnya lebih banyak, ditambah lagi jumlah orangnya lebih sedikit. Itu yang membuat indeks GINI naik.



Sri Palupi

Ketua Institut Economic and Social Council (Ecosoc)

“Negara mengabaikan karena ekonomi kita melayani uang bukan melayani kehidupan. Kalau negara peduli, negara akan malu.”

Dalam alam demokrasi adanya Civil Society yang kuat merupakan syarat untuk berjalannya demokrasi secara baik. Dengan fungsinya sebagai penyanggah yang ikut memperkuat demokrasi Civil Society diharapkan tetap kritis dan mendorong proses berjalannya demokrasi dalam pemerintahan secara baik. Begitu juga di Indonesia, Civil Society Organization (CSO) diharapkan tetap menjadi pilar keempat bersama media untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang baik. Bagaimana peran dan pandangan CSO di Indonesia dalam memandang pelaksanaan pemerintahan selama ini, khususnya paska terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2015-2019? Berikut pandangan Sri Palupi (SP) kepada Simpul, aktivis social dalam wadah ECOSOC yang senantiasa mengkritisi dan memberikan saran kepada pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan di Indonesia.

JOKOWI HARUS BERANI KELUAR DARI MAINSTREAM

Simpulan : Apa pandangan saudara terhadap Nawa Cita Presiden baru?

SP : Saya kira itu intinya Trisakti ya. Yang pertama soal ekonomi, kalau kita lihat sepuluh tahun pemerintahan SBY, ekonomi kita di puji – puji asing, khususnya dengan melihat indikator ekonomi makronya. Mulai dari pertumbuhan ekonominya, status negara layak utang, kita masuk 16 besar ekonomi dunia, kita juga sudah masuk ke negara dengan pendapatan menengah. Tapi dibalik itu semua, ada “air mata” dibalik pujian dunia.

Simpulan : Mengapa?

SP : Indeks GINI-nya meningkat mendekati titik kritis, titik kita sudah 0,4 sedangkan titik kritisnya 0,5. Tingkat kemiskinan juga meningkat mayoritas di pedesaan. Jadi pujian itu kalau disebut prestasi, itu dicatat sebagai dasar penderitaan rakyat, eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan. Basis perekonomian kita ada dua, eksploitasi sumber daya alam dan sektor konsumsi. SDA basisnya tambang dan kelapa sawit, konsumsinya di sektor perkotaan. Disitulah letak pertumbuhan yang menerima pujian itu dibaliknya ada air mata. Eksploitasi SDA berdampak pada kerusakan lingkungan dan bencana, termasuk perampasan ekonomi rakyat. Tanah – tanah rakyat diambil, keberadaan rakyat tidak diakui. Kita lihat dalam program *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), jadi dalam program ini daerah – daerah Indonesia di kapling – kapling, ini untuk tambang, ini



“Ekonomi kita melayani kebutuhan asing, kita mengekspor bahan – bahan mentah yang kemudian masuk ke pasar kita kemudian kita beli lebih mahal.”

untuk perkebunan, tapi disitu tidak kita lihat di mana hak kelola rakyat. Di mana rakyat itu akan hidup, bencana di sana – sini. Sehingga ada ketidakadilan yang luar biasa dengan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, mengabaikan pemerataan. Yang terjadi ya, pembangunan berpusat di perkotaan, desa ditinggalkan, lalu pembangunan berpusat di Jawa, luar Jawa diabaikan, pertumbuhan berpusat di Indonesia barat, Indonesia timur diabaikan. Ada persoalan ketidakadilan yang serius.

Simpul : Masalah lain?

SP: Ekonomi kita ini paradoks. Kita disebut negara maritim, negara pertanian, tetapi mayoritas pangan kita bergantung dari import. Jadi ironis, perumbuhan kelas menengah kota kita yang tinggi tidak diikuti oleh pertumbuhan industri dalam negeri. Artinya kebutuhan konsumsi dipenuhi dari luar, karena kita mengalami deindustrialisasi. Sepuluh tahun terakhir ini sangat terasa kita mengembangkan ekonomi perbudakan.

Simpul : Maksudnya ?

SP: Mengapa saya katakan demikian, karena ekonomi kita melayani kebutuhan asing, kita mengekspor bahan – bahan mentah yang kemudian masuk ke pasar kita kemudian kita beli lebih mahal. Sama seperti petani di desa – desa yang menjual pisangya kemudian dia membeli pisang goreng yang diolah orang lain. Bagaimana tidak bergantung kepada utang, defisit terus. Kemudian, persoalan sumber daya alam yang kita sedot untuk memenuhi kebutuhan asing. Bahkan kita menjual anak – anak dan perempuan kita menjadi TKI, dan membiarkan anak – anak kita masuk kedalam sistem perbudakan. Dalam sepuluh tahun terakhir TKI keluar negeri

itu meningkat sampai 300 persen.

Simpul : Bukankah TKI menambah devisa, dan di Indonesia susah lapangan pekerjaan ?

SP: Ya persis seperti itu, ekonomi kita melayani uang bukan melayani kehidupan. Kita *nggak* peduli apakah anak meninggal, menderita. Yang penting kita bisa jual mereka, kita bisa mendapatkan devisa yang tinggi. Tapi kita tidak pernah peduli, mereka meninggalkan keluarganya. Biaya sosial ini yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara. Negara mengabaikan karena ekonomi kita melayani uang bukan melayani kehidupan. Kalau negara peduli, negara akan malu. Zaman Soekarno, jangan sampai kita menjadi budak bangsa lain, atau budak diantara bangsa – bangsa. Tapi lihat target pembangunan kita. Kita cukup bahagia dengan minimal warga kita dapat hidup dengan minimal satu dolar sehari. Sebagai bangsa yang bermartabat kita malu. Kalau kita lihat datanya, kita lihat Indonesia termasuk dalam jajaran yang terbesar sebagai negara pemasok anak dan organ tubuh selain India. Layak kah Indonesia yang dulu dicitakan sebagai bangsa yang besar. Kata Soekarno, bangsa yang tidak berharap hidup dengan sekian sen. Nah kita kali ini kan malah mengalami kemerosotan. Tujuan kita mengatasi kemiskinan begitu rendahnya, cukup dengan warga satu dolar sehari.

Simpul : Bagaimana sebaiknya ke era Jokowi ?

SP: Ini terjadi sejak zaman Orde Baru, dan begitu massifnya dengan program MP3EI, jual murah, jual cepat, jual habis Sumber Daya kita. Itu yang saya kira yang harus dikoreksi oleh Jokowi. Saya senang dengan Jokowi mengajukan Trisaktinya itu. Kalau kita

lihat penanggulangan kemiskinan, antara jumlah uang yang di keluarkan dengan tingkat jumlah orang yang dientaskan dari kemiskinan tidak seimbang. Antara kebijakan ekonomi kita tidak berperspektif penanggulangan kemiskinan, jadi terpisah antara penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonominya menghasilkan orang – orang miskin, kemudian ditutup itu dengan program – program penanggulangan kemiskinan, sehingga saya ingat tahun 2005 pemerintahan SBY mengoreksi indikator kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi tidak *macth*, ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, angka kemiskinannya kok meningkat. Artinya memang kebijakan ekonominya tidak berperspektif penanggulangan kemiskinan, justru melahirkan kemiskinan. Termasuk APBN-nya tidak *pro – poor budget*, yang namanya *pro – poor budget* adalah baik penerimaan maupun pengeluaran berperspektif penanggulangan kemiskinan. Indikator kemiskinan kita terlalu rendah dan juga tidak manusiawi. Dengan uang sejumlah digaris kemiskinan itu orang dipandang bisa membiayai seluruh hidupnya . Itu sebuah kejahatan, kejahatan negara karena mereka yang di luar itu tidak mendapatkan akses penanggulangan kemiskinan. Buruh jelas *nggak* masuk dan kita lihat jumlah keluarga yang bergantung di sekitar garis kemiskinan, jauh lebih besar. Sedikit saja mereka kena bencana, sudah jatuh miskin.

Simpul : Kalau situasinya seperti itu, apa yang salah, sistem atau pengelolaannya?

SP: PDB kita itu di *support* oleh tidak sampai satu persen korporasi, sementara pelaku ekonomi mayoritas itu adalah usaha kecil menengah, dan itu tidak mendapatkan akses, modal. Karena pendekatan ekonomi kita berpihak kepada korporasi. Pada kalangan atas, sistem ekonomi kita lebih kapitalis daripada negara – negara kapitalis, lebih liberal daripada negara – negara liberal. Sekarang negara liberal saja masih *ngasih* subsidi, masih mengatur ekonominya, memberikan proteksi. Kita ini kan sudah seperti menjual semuanya, apa sih yang tidak kita jual, semuanya dijual, tidak ada proteksi. Bahkan anak – anak saja sendiri dijual, apalagi sumber daya alam.

Simpul : Kalau seperti itu, di mana ekonomi pancasila?

SP: Pancasila kan sudah diamandemen dengan Undang – Undang Dasar termasuk basis ekonomi kita yang berbasis sosialis. Sudah digerogeti, pancasila sudah ditanggalkan. Pasal 33 sudah sejak zaman Soeharto tidak dipakai. Artinya kan sudah

“Kesedihan saya, kelas menengah tidak kritis terhadap kebijakan Jokowi, itu yang saya khawatirkan. Karena lebih mudah kita mengkritik presiden yang tidak didukung rakyat dari pada presiden yang didukung oleh rakyat.”

sejak lama kita mengkhianati Pancasila. Oleh karena itu ketika Jokowi mengatakan Trisakti, itu memberikan harapan. Bahwa kita benar – benar kembali kepada jadi diri kita. Kembali kepada cita – cita yang dahulu dirumuskan oleh pendiri bangsa ini. Sesuai tertera dalam pembukaan Undang – Undang Dasar.

Simpul : Trus apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah baru ?

SP: Satu, mereka berani atau tidak dalam menjalankan konsep Trisakti tersebut.

Simpul : Bagaimana mengawalnya agar berjalan sesuai janjinya?

SP : Saat ini pemerintah didukung oleh rakyat kelas menengah. Yang menggerakkan kelas menengah, kelas menengah tidak terdampak oleh BBM, mereka *support* kenaikan BBM tapi mereka tidak berpikir tentang dampak. Dan ini kesedihan saya, kelas menengah tidak kritis terhadap kebijakan Jokowi, itu yang saya khawatirkan. Karena lebih mudah kita mengkritik presiden yang tidak didukung rakyat dari pada presiden yang didukung oleh rakyat. Justru ini menurut saya mengkhawatirkan, bukan membanggakan. Karena kelas bawah tidak bisa bersuara, tertutup oleh kelas menengah yang mendukung habis – habisan Jokowi. Kehilangan daya kritis karena mendukung Jokowi. Siapa kemudian bersuara terhadap persoalan – persoalan di bawah.

Simpul : Contohnya ?

SP : Yang jelas buat saya, ketika Jokowi pidato di APEC, dan mengatakan kelapa sawit sebagai produk unggulan, itu bagi saya yang dikatakan Trisakti tidak terwujud, padahal sebelumnya mengatakan tentang industri ekonomi kreatif, itu buat saya

alternatif. Jokowi tidak akan melakukan eksploitasi tapi ternyata dia harus “bayar hutang” kan. Salah satu orang yang membiayai Jokowi, itu orang – orang yang berasal dari industri sawit. Itu yang maksud saya adalah sebuah keberanian, apakah Jokowi berani untuk keluar dari *mainstream*. Karena beresiko besar, republik ini sudah dikuasai oleh mafia di mana – mana. Dan Jokowi praktis sendirian. Parlemen, partai, semua sudah dikuasai oleh mafia. Mana partai yang tidak dikuasai oleh korporasi? Semua dikuasai oleh korporasi dan itu menghimpit Jokowi dari mana pun. Kalau dia berani dan mengoreksi dari kesalahan 10 tahun yang lalu.

Simpulan : Bagaimana dengan sindiran media asing yang menggambarkan Jokowi “memasak” untuk orang asing ?

SP: Justru saya dengan kenaikan BBM, kekhawatiran saya di depan mata, Jokowi tidak keluar dari *mainstream*. Kalau Jokowi belum membuktikan mampu mengelola sektor Migas. Berantas korupsi, paling tidak setahun lah buktikan dahulu Jokowi kerja, baru kita ikhlas Jokowi buat kebijakan cabut subsidi BBM. Jadi kita tahu bahwa program tiga kartu itu benar, tidak seperti yang terdahulu, kan BLT itu sama dengan yang sebelumnya, beda nama saja, pencitraan juga. Itu yang saya katakana agak khawatir. Apakah Jokowi mampu mengoreksi, karena apa? Orang yang mau melakukan koreksi itu adalah orang yang mampu atau melihat jauh kedepan karena hasilnya tidak akan dirasakan lima tahun pemerintahan dia. Tetapi dia membangun fundamental ekonomi yang *sustainable* kedepan.

Simpulan : Jadi maksud Saudara menggali sumber – sumber yang lain katakanlah yang belum efektif?

SP: Satu, dia sudah melalui dengan efektivitas birokrasi. Tapi itu kan sudah selayaknya dan sepatasnya. Tetapi pendekatan ekonominya belum dilakukan, mulai dari membenahi izin – izin. Di mana di Kalimantan Tengah, kita baru saja riset soal kelapa sawit dan HAM. Dari sekitar 300 korporasi sawit yang beroperasi hanya 85 yang memenuhi persyaratan perizinan. Kemudian coba lihat pajak, sudah tidak ada ketidakadilan. Bandingkan kalangan atas dengan menengah, justru dari kalangan menengah ke bawah. Artinya ada pajak yang harus diefektifkan kemudian ada efisiensi birokrasi, pengelolaan APBN lebih efektif. Itu kan bisa, paling tidak setahun lah. Kalau yang sekarang, saya mengatakan sempurna nanti kalau tidak ada perubahan penderitaan rakyat, mulai dari kenaikan BBM, sawit sebagai produk unggulan. Kita tahu sawit itu sangat ekspansif dan merampas lahan – lahan masyarakat. Lalu transmigrasi digalakkan. Artinya kan tetap saja pembangunan

“Dengan kenaikan BBM, kekhawatiran saya di depan mata, Jokowi tidak keluar dari *mainstream*. Kalau Jokowi belum membuktikan mampu mengelola sektor Migas.”

ini bias ke Jawa, bias kota, *nggak* ada pemerataan. Seperti yang dikatakan Jokowi dalam kampanye, akan membangun dari pinggiran. Apa coba karakternya, pinggiran itu kan luar Jawa, Indonesia timur, perbatasan. Pinggiran dalam pengertian geografis, tapi juga pinggiran dalam pengertian sektoral, pertanian, perikanan, sektor yang selama ini di tinggalkan. Ketika muncul transmigrasi, hal ini melekat kepada perkebunan sawit. Konflik di daerah itu luar biasa karena sawit dan transmigrasi, sehingga mengapa Papua menentang sedemikian keras menolak transmigrasi. *Nggak* sensitif Jokowi dalam hal ini.

Simpulan : Nggak sensitif Nggak kapabel atau nggak berani?

SP: Saya belum bisa simpulkan, belum teruji. Kalau saya melihat orientasinya memang lebih kepada kelas menengah. Kebijakan – kebijakan, penataan, segala macam. Ini kan lebih kepada orientasi kota yang untuk kelas menengah. Pembangunan dari semua ini yang diuntungkan adalah kelas menengah. Kita lihat jumlah kelas menengah di perkotaan kita kan meningkat pesat.

Simpulan : Bukankah itu yang menjadi tujuan ekonomi bu, menambah jumlah masyarakat ekonomi kelas menengah?

SP: Harusnya seperti itu, tapi kan kenyataannya tidak. Target penanggulangan kemiskinan kan tidak mengangkat mereka ke kelas menengah, cukup mengangkat mereka dari kubangan, bukan mengangkat kepada kelas menengah.

Simpulan : Jadi mempertanyakan Trisaktinya Jokowi?

SP: Menghawatirkan, tidak bisa jalan. Karena begitu kuatnya tekanan, desakan, kepentingan, korporasi dan juga para mafia.

Simpul : Kalau seperti itu, apa maknanya bu Trisakti itu?

SP: Harus ditanya kepada Jokowi itu, karena Trisakti itu untuk menarik suara hati rakyat. Sekarang kan sudah tidak bicara lagi, bahkan di forum dunia. Saya belum mendengar lagi bicara Trisakti pasca dilantik. Karena kalau bicara soal Trisakti, semua pendekatan itu akan berubah. Pengelolaan akan APBN berubah, penanggulangan kemiskinan akan berubah. Jokowi belum bicara soal desa loh. Kemarin kan bilang mau berangkat dari pinggiran.

Simpul : Bagaimana dengan tim pembantu Jokowi ?

SP: Saya selain sangsi dengan kabinet dari politik juga sangsi kepada kabinet yang dari korporasi, karena itu menyangkut perspektif. Kita contohkan saja, Menteri Pertanian latar belakangnya adalah pemilik bisnis perkebunan sawit dan pertambangan. Artinya dalam kabinet Jokowi ini juga ada konflik kepentingan, Menteri Pertanian ini juga memiliki usaha semen dan pestisida. Ini agak mengkhawatirkan karena berkaitan dengan perspektif, sudut pandangnya A kan tidak bisa memandang dari sudut pandang B. Kalau buat perspektif lainnya tidak masalah, kan belum tentu dari perspektif lainnya juga tidak bermasalah. Jadi tidak diurus oleh korporasi saja, biasanya ke korporasi, apalagi diurus korporasi. Kalau Trisakti ini kan basisnya rakyat. Kita lihat kemarin di era SBY, peningkatan pangan berbasis korporasi, bukan berbasis petani, petani cuman jadi tenaga kerja. Karena apa? Sistem kita, kita tidak punya perencanaan jangka panjang.

Simpul : RPJPN?

SP: Siapa yang membuat? Pemerintah kan? Suatu rezim yang punya kepentingan. Maksud saya adalah kepentingan segenap bangsa ini untuk tujuan jangka panjang sesuai dengan cita – cita negara ini. Sementara sistem ekonomi – politik kita, itu kan miskin negarawan. Sehingga pemerintahan ini orientasinya lima tahun saja. Sehingga dia tidak akan berpikir tentang pendekatan pembangunan yang dampaknya adalah jangka panjang. Ya cukup yang penting lima tahun atau paling panjang sepuluh tahun, yang penting pencitraan. Rakyat terus – menerus berjuang, pada akhirnya kita tidak membangun sistem supaya siapapun presidennya atau siapapun penguasanya itu berorientasi kepada konstitusi. Kita terus berjuang memikirkan bagaimana presidennya “berjuang” untuk meraih dalam sistem itu.

Simpul : Bagaimana peran pengawasan para dewan?



SP: Tambah lagi kekhawatirannya, dewannya tidak mewakili rakyat. Jadi beban rakyat *double*, satu peluang pembela – pembela rakyat hilang karena presidennya didukung kelas menengah. Yang kedua, DPR-nya seperti itu, yang tidak *representative* terhadap kepentingan rakyat. Ini mau damai atau mau belah, orientasinya bukan rakyat. Mereka damai bukan karena rakyat, mereka belah juga bukan karena rakyat, orientasinya kursi. Kalau orientasinya rakyat, mereka tidak akan memilih ketua DPR yang punya catatan. Bagaimana begitu gencar hanya untuk memilih DPR, sekian triliun beredar di DPR, untuk apa? Jadi ya itu tadi, kepentingan rakyat bukan lagi kepentingan yang menjadi porsi utama mereka. Kalau untuk rakyat

mereka juga tidak membuat Undang – Undang MD3. Semoga saja Jokowi melihat kepentingan jangka panjang negara ini, jangan sekedar menyelamatkan kursinya.

Simpul : Kalau seperti ini, siapa yang mengawasi? Civil Society Organization (CSO)?

SP: Demokrasi ini tidak hanya tiga pilar, tapi empat pilar. Pilar keempat kan media dan CSO. Semoga saja mereka tetap kritis meskipun mereka pendukung Jokowi.

Simpul : Apa harapan baru ?

SP: Harapan yang saya lihat ketika Jokowi mulai efisiensi birokrasi, mulai mengurangi



perjalanan dinas. Itu sangat *significant* karena itu sumbernya kok, bagaimana misalnya orang Jakarta jalan – jalan ke Jakarta, orang daerah jalan – jalan ke Jakarta. Rapat saja di hotel – hotel mewah. Coba lihat menjelang akhir tahun, penuh itu hotel – hotel. Setidaknya dengan efisiensi itu mengurangi hal itu. Artinya kan harapannya, ada perspektif orang yang berubah. Sekarang Menteri Perhubungan yang dahulunya adalah Dirut PT. KAI, dulu dia membenahi layanan kereta api dengan baik, tapi dia tidak punya perspektif tentang ekonomi kerakyatan. Dia habisi seluruh pedagang di stasiun – stasiun, tapi dia memberi ruang kepada pemodal besar, mulain dari Dunkin’ Donuts, McDonald, KFC, Alfamart, Indomaret. Dia melakukan pendekatan seperti itu, hilang semua pedagang kaki lima, itu yang saya maksudkan dengan perspektif. Orientasi kelas menengah ekonominya baik tapi ekonomi kerakyatan ini kan Jokowi sendiri mengatakan tidak bisa sepotong – sepotong, seluruhnya, di Kementerian ada aspek ekonominya, ada unsur kerakyatannya tidak bisa hanya persoalan perhubungan karena di sana ada ekonomi, di sana ada pedagang, bagaimana ini dipadukan.

Simpul : Tapi apa bisa pengelolaan dilakukan oleh rakyat banyak atau masyarakat bagaimana dengan manajemen, sistem kerja dan sebagainya ?

SP : Itulah kita tidak pernah percaya kepada diri kita sendiri, Norwegia dulu bagaimana? Mendatangkan korporasi tapi untuk alih teknologi, untuk mengajari rakyatnya, ada batasan, *oke* saya serahkan kepada korporasi dalam waktu sekian tahun harus kita ambil kembali, kita tidak punya pikiran seperti itu karena kita tidak punya kepercayaan diri. Kita sudah terlalu lama dilumpuhkan dalam sistem perbudakan bahwa kita cukup menyandang status atau melakukan kerja – kerja sebagai budak. Kepercayaan diri kita sudah dilumpuhkan. Kalau kita lihat di lapangan begitu banyak rakyat yang mampu mengelola ekonominya. Coba kebayang *ga*, orang Medan itu membangun bank – bank rakyat, kebayang *ga* hanya dibangun oleh satu orang, banyak kasus yang seperti itu. Yang kedua tingkat pemerataan manfaat bagi rakyat, energi ini mengatakan tidak. Pemanfaatannya tidak merata. Yang ketiga partisipasi rakyat menentukan manfaat SDA, artinya rakyat dimintai pendapat tentang partisipasinya.

Simpul : Bagaimana dengan peran koperasi yang diharapkan menjadi soko guru dan sesuai dengan pasal 33 UUD ?

SP : Coba lihat di mana letak kebijakan koperasi kita, sebelumnya pemerintah mengeluarkan Undang – Undang yang mengelola koperasi dengan sistem korporasi, gila kan itu. Saya kira dulu, karena

menteri koperasinya *nggak* paham. Tapi ternyata ini perkara orientasi, bagaimana dia membuat instruksi bahwa koperasi yang punya aset di atas 5 milyar harus membuat PT. Justru bagaimana Prancis terselamatkan krisis karena bank – banknya koperasi. Jepang itu perekonomian jadi seperti itu, pertaniannya seperti itu karena koperasi. Mall – mall seperti itu karena koperasi. Kita tidak pernahh diberikan informasi yang benar tentang koperasi. Yang terakhir penghormatan hak rakyat secara turun – temurun dalam pemanfaatann SDA. Artinya tidak boleh dirampas begitu saja hak mereka. Ini sudah diterjemahkan, saya tidak tahu apakah Jokowi juga tahu bahwa pasal 33 itu sudah di terjemahkan karena yang dimaksud dengan kemakmuran sebesar – besarnya untuk rakyat *ga* pernah dijelaskan apa artinya.

Simpul : Saran saudara untuk pemerintah baru ?

SP: Kalau memang orientasi dia hanya seperti presiden – presiden sebelumnya, hanya pertumbuhan ekonomi, saya tidak yakin dia akan membangun ekonomi kerakyatan. Karena apa, orientasi ekonomi itu mengandaikan pemodal besar, pertumbuhan ekonomi kan tidak mengandaikan pelaku penyumbang pelaku ekonomi. Siapa pun yang penting bisa pertumbuhan ekonomi cepat dia akan kasih. Nah, yang terjadi selama ini, seperti terlihat dari datanya, penyumbang ekonomi kurang dari satu persen korporasi, tentu saja pemodal besar. Kalau dia orientasinya adalah pemerataan, yang berkeadilan, membangun dari pinggiran, dia mau mengoreksi.

Simpul : Bagaimana dengan keterbatasan waktu?

SP: Waktunya memang tidak kelihatan, jangkanya mungkin akan jangka yang lebih panjang, seperti pendidikan, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Marcos di Filipina, sejelek – jeleknya Marcos dia membangun pondasi pendidikan Filipina itu lumayan. Marcos membangun pondasi pendidikan minimal SMA, Filipina mengunduh hasilnya sekarang, daya saing mereka tinggi sekali. Tapi ini kan pendekatan ekonomi tidak sepanjang pendidikan, tidak sejauh pendidikan. Dia merubah sedikit orientasi saja pada perekonomian sudah dirasakan. Harapan saya sebenarnya kalau Jokowi tidak mampu merubah, atau mengoreksi banyak kesalahan dari sebelumnya, paling tidak kurangilah hal – hal negatif yang kemarin. Tapi jangan melakukan langkah yang sama. Orang bilang *nggak* masalah meskipun modal asing. Ya jelas itu masalah lah.

Simpul : Kalau ada pertanyaan, kalau kita tidak undang investor dari luar, kita membangun modal dari mana?

“Norwegia dulu bagaimana?
Mendatangkan korporasi tapi untuk alih teknologi, untuk mengajari rakyatnya, ada batasan, oke saya serahkan kepada korporasi dalam waktu sekian tahun harus kita ambil kembali, kita tidak punya pikiran seperti itu.”

SP: Jokowi kan sudah pernahh bekerja di Solo kan. Dia pernahh menolak Mall kan, dia lebih memilih pedagang kaki lima. Apakah itu membuktikan hal yang sama, dia menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dua kali lipat. Artinya menggeser pelaku, bukan kepada pelaku besar tapi kepada pelaku kecil.

Simpul : Jadi tidak harus dengang kekuatan luar, kekuatan dalam negeri juga bisa ya bu?

SP: Justru itu kan yang harus dilakukan, *nggak* ada makan siang gratis. Belum – belum dia sudah menjanjikan, satu percepatan perizinan, kelancaran pembebasan lahan, tapi dia *nggak* bertanya lahannya siapa? Kalau kerangka dia masih seperti kemarin, semua lahan milik negara. *Nggak* ada bedanya dengan presiden kemarin. Yang saya kritis adalah sulitnya pemerintah memberikan sertifikat kepada rakyat. Kalau kita jalan di Kalimantan selalu ada plang – plang di tengah jalan yang diberikan kepada polisi, berisikan mari kita memberi rasa aman kepada investor. Tapi kita mengganggu hidup dan membuat rakyat menderita. Di Kalimantan itu waktu kampanye dia pergi dengan ongkosnya sendiri ke kampung – kampung memberikan pencerahan supaya memilih Jokowi, supaya tanah – tanah kita tidak dirampas, itu artinya cinta mereka bertepuk sebelah tangan karena Jokowi menjadikan sawit sebagai produk unggulan dan mereka harus siap menerima kenyataan itu. Kekhawatiran itu kan belum nyata, tetapi sudah ada indikasi – indikasi itu kan. Oleh karena itu harus berteriak. Tetap harus mengawal supaya itu tidak terjadi. Orang kan selalu bilang belum kerja *kok* sudah di kritik. Justru kita mengkritik supaya tidak terjadi. Masih ada media sosial, media masa. Tapi tetap ada kekhawtiran karena kelas menengah yang kritis lebih mendukung dia.



Dr. Telisa Aulia Falianty, SE, M.E.

Ketua Program Studi Magister Perencanaan
dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia

PEMBANGUNAN ADALAH PROSES MULTIDIMENSIONAL

Bagaimana seorang akademisi melihat Visi dan Misi Presiden Jokowi dan bagaimana pula Visi dan misi itu sebaiknya dilaksanakan, berikut pandangan Ketua Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Dr. Telisa Aulia Falianty, SE, M.E. (TAF) kepada Simpul.

Simpul : Bagaimana akademisi melihat proses penterjemahan visi misi presiden baru ke dalam RPJMN 2015-2019 ?

TAF : RPJMN yang sedang difinalisasi memang sedang mengakomodasi visi misi presiden baru. Tiga poin utama dari visi misi tersebut adalah berdikari di bidang ekonomi, berkedaulatan di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya. Draft RPJMN tersebut pada bulan Juli-Agustus 2014 pun belum difinalisasi karena menunggu visi misi Presiden terpilih. Di dalam setiap poin RPJMN dicoba dicari keselarasan dengan Nawa Cita tersebut. Dalam proses penterjemahan tadi juga dibutuhkan masukan masukan dari para akademisi yang biasanya membantu dalam pembuatan *background study* untuk RPJMN.

Simpul : Kalau ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)?

TAF : Rencana kerja pemerintah menterjemahkan visi misi presiden baru melalui proses yang sistematis dan runtun. Perlu dilihat irisannya dan perlu mempertimbangkan kontinuitas juga dengan program-program sebelumnya. Agar tidak bongkar pasang yang malah bisa jadi *counter productive*.

Simpul : Hubungan, sinergi dan integrasi dengan RPJP?

TAF : RPJP ditetapkan dalam undang-undang. Visi misi presiden baru justru harus sesuai dengan RPJP karena ini adalah amanat undang-undang. Di dalam jangka panjang kita tidak boleh lupa adanya peluang Indonesia terkena *middle income trap*.



“Tiga bidang utama dari presiden baru yaitu energi, pangan, dan maritim diharapkan dapat tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah meskipun tentu diharmonisasikan dengan kondisi di daerah.”

Simpul : Apa yang harus disesuaikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)?

TAF : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), di mana RPJM tentu mengacu pada visi misi presiden baru RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Tiga bidang utama dari presiden baru yaitu energi, pangan, dan maritim diharapkan dapat tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah meskipun tentu diharmonisasikan dengan kondisi di daerah. Salah satu poin dalam nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Ke depan peranan desa akan semakin meningkat



“Ada proses
penyelarasan
dan sinkronisasi.
Namun perlu
diperhatikan bahwa
jangan bongkar
pasang sehingga
sustainability
program menjadi
terganggu.”

dan makin perlu dikoordinasikan di masing masing daerah untuk meningkatkan kapasitas desa agar dana desa bisa terserap dengan baik.

Simpul : Kalau dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)?

TAF : Ada proses penyelarasan dan sinkronisasi. Namun perlu diperhatikan bahwa jangan bongkar pasang sehingga sustainability program menjadi terganggu. Visi misi tercermin

dalam RPJM pusat dan menjadi PRJM daerah dan RPJM Daerah kemudia dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Simpul : Apa implikasinya terhadap perencanaan pembangunan daerah ?

TAF : Perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat lebih baik. Salah satu bagian dari nawacita adalah membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dengan tata kelola yang semakin baik harusnya perencanaan pembangunan daerah juga semakin baik. Pada tahap awal, sektor utama yang akan diperkuat Bappenas adalah pangan, energi, dan maritim. Sehingga dibutuhkan peningkatan infrastruktur yang terkait agenda prioritas tersebut. Berdasarkan nawacita (sembilan agenda perubahan) yang dicanangkan pemerintahan baru, maka yang menjadi irisan dalam rangka mendorong industri berkelanjutan dan perlu untuk diperhatikan adalah pembangunan daerah, peningkatan produktivitas dan daya saing internasional, dan perwujudan kemandirian ekonomi. Untuk membangun daerah-daerah di



Indonesia rencana yang akan dilakukan yaitu dengan desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, penataan daerah ekonomi baru, dan implementasi UU Desa.

Simpul : Bagaimana hubungannya dengan visi misi Kepala Daerah?

TAF : Kepala Daerah di era desentralisasi memang di satu sisi memiliki otonomi untuk menentukan prioritas daerah selama *outcome* yang dihasilkan sejalan dengan program pemerintah pusat. Beberapa kepala daerah sudah mengeluarkan statement akan menyesuaikan visi misi daerah mereka dengan visi misi Presiden baru. Dibutuhkan proses penyesuaian yang tentu membutuhkan *effort* khusus.

Simpul : Apa yang berbeda dari rencana pembangunan sebelumnya ?

TAF : Nampaknya arah rencana pembangunan di pimpinan baru diarahkan agar jangan terlalu teknokratik dan lebih dekat dengan rakyatnya. Konsep pembangunan itu sendiri perlu diluruskan agar jangan hanya pembangunan ekonomi. Karena pembangunan adalah proses multidimensional. Ini juga seiring dengan peran Bappenas yang lebih kuat lagi dalam hal pembangunan dalam arti luas.

Kementrian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kini tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian tetapi langsung di bawah presiden. Perubahan itu tentu memudahkan alur koordinasi dengan presiden dan perannya menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Selain sebagai *think tank* presiden, Bappenas ditugasi untuk mengawal kebijakan kementerian yaitu dengan memberikan masukan sesuai dengan bidang kementerian masing-masing.

Strategic issues yang perlu semakin diperhatikan dalam rencana pembangunan saat ini adalah dalam bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah terutama adalah peningkatan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin (Kemenkeu, 2014). Dari data-data yang bersumber dari Kementerian Keuangan menunjukkan terjadi *trend* kapasitas fiskal yang semakin

“Strategic issues yang perlu semakin diperhatikan dalam rencana pembangunan saat ini adalah dalam bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah terutama adalah peningkatan kapasitas fiskal daerah.”

memburuk untuk pemerintah provinsi. Hal ini ditandai dengan terjadinya peningkatan jumlah provinsi yang memiliki indeks fiskal daerah rendah dari semula 21,21 persen di tahun 2010 menjadi 51,52 persen di tahun 2014. Dengan kondisi demikian maka perbaikan kapasitas fiskal daerah ke depan perlu dilakukan. Untuk itu kemampuan perencanaan pun perlu ditingkatkan.

Rencana pembangunan sekarang pun perlu memperhatikan lebih lagi terhadap masalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan bukan hanya antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur saja, tetapi juga ketimpangan antar wilayah sendiri.

Simpul : Apakah anda ada hambatan dan kendala dan bagaimana mengatasinya?

TAF : Untuk mengubah rencana kerja mungkin akan berkaitan dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Harmonisasi regulasi tentu perlu dilakukan dan ini bukan hal yang mudah. Selain itu sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi misi baru tersebut juga perlu direalokasikan dari anggaran dan sumber daya yang sudah ada sebelumnya.

Simpul : Bagaimana dengan dukungan dari DPR RI/DPRD?

TAF : Seharusnya DPR /DPRD RI dapat mendukung visi misi dan penerjemahan dalam rencana kerja pemerintah baik di pusat maupun daerah. Namun faktor politik kadangkala dapat menjadi hambatan. Kondisi yang kurang baik belakangan di DPR dikhawatirkan akan sedikit mengganggu realisasi dari program-program pemerintah. Sebagai apapun program yang dimiliki tanpa dukungan dari wakil rakyat nampaknya akan sulit untuk sukses.

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI



Simpulan : Siapa yang mengawasi penterjemahan dan pelaksanaan visi dan misi ini?

Wakil rakyat seperti DPR/DPRD, kemudian akademisi dan pengamat dapat mengkritisi dan memberikan masukan juga LSM. Pengawasan dalam arti memberikan masukan positif sehingga bisa lebih memberikan *feedback* untuk pelaksanaan pembangunan.

Simpulan : Bagaimana fungsi lembaga pengawasan di luar pemerintah (LSM, OMS)?

TAF : Fungsi lembaga pengawasan seperti LSM ataupun OMS sangat penting untuk memberikan kritisi dan masukan secara kontinu. Perbaikan dari program program pembangunan tentu perlu mendapatkan masukan dari masyarakat sebagai *stakeholder* utama pembangunan.

“DPR dikhawatirkan akan sedikit mengganggu realisasi dari program-program pemerintah. Sebagai apapun program yang dimiliki tanpa dukungan dari wakil rakyat nampaknya akan sulit untuk sukses.”



FX. Hadi Rudyatno
Walikota Solo

“Yang paling penting lagi, antara presiden dan wakil presiden ini tidak rebutan pekerjaan, tidak rebutan jabatan, apalagi uang.”

Sebagai orang yang telah menemani Presiden Jokowi selama tujuh tahun, ketika menjabat Walikota Solo, sebagai wakil walikota Solo, sejak 2005 tentu banyak mengenal model, cara dan kebijakan mantan pimpinannya. Bagaimana FX Hadi Rudyatno melihat dan memandang kebijakan pemerintah baru yang dipimpin Jokowi. FX. Hadi Rudyatno (HR), yang kini menjabat Walikota Solo, menyampaikan pikiran dan kesanya tentang kebijakan, visi dan misi Presiden Baru, Joko Widodo di Loji Gandrung, Solo kepada Simpul.

REVOLUSI MENTAL HARUS DI DAHULUI OLEH REVOLUSI SOSIAL

Simpul: Bagaimana Bapak melihat kebijakan presiden baru ?

HR: Tentu saja berbeda dengan ketika beliau menjadi Walikota Solo. Sekarang visi dan misi beliau dalam Nawa Cita itu berasal dari tiga itu kan maksudnya, Trisakti itu. Kita akan mendukung sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kita di Solo, dengan kabupaten kan beda. Terjemahan Trisakti di daerah juga harus disesuaikan. berdiri di atas sendiri bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berkepribadian dalam budaya, tentunya masing – masing wilayah itu berbeda. Misalnya di Solo, yang tidak punya persawahan, ketahanan pangan dan lain sebagainya kan belum bisa di definisikan. Karena kita tidak bisa produksi pangan. Termasuk di bidang kemaritiman, Solo tidak punya laut yang ada sungai dan untuk sungai kita baru mau optimalkan sungai bengawan Solo ini supaya kembali lagi berguna.

Simpul: Bagaimana dengan ide revolusi mental ?

HR: Sebetulnya kalau mau di jabarkan, menurut saya, revolusi mental beliau itu harus didahului oleh revolusi sosial dulu. Dengan revolusi sosial, mentalnya pasti akan ikut.

Simpul: Contohnya pak?

HR: Sekarang kita lihat kebutuhan rakyat itu apa? Di Solo itu programnya “Solo Berseri” tanpa korupsi. Kami ingin mewujudkan masyarakat yang *waras*. *Waras* itu artinya sehat. Dalam arti luas lagi, sehat *waras, wasis, warek*, mapan, papan. *Waras* secara keseluruhan, ya *waras* secara jasmaninya, rohaninya, sehat pikirannya, sehat pergaulannya, sehat keluarganya, jadi sehat secara keseluruhan.



Walikota Solo sedang berbincang dengan pengunjung rasa dan wartawan

Simpul: apa program dan intervensi pemerintah Solo untuk mewujudkan ini ?

HR: kebijakan pemerintahan melalui intervensi program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), ada pembangunan rumah sakit, ada pembangunan posko rawat inap, ada puskesmas pembantu, ada cek laborat gratis, bagi usia 40 tahun ke atas. Itu contoh intervensi pemerintah.

Simpul: Lainnya ?

HR: Meniadakan TPS di lingkungan penduduk, penyediaan sanitasi. SLBM itu, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, penyediaan air bersih. Lantas membangun infrastruktur yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat. Membangun jembatan, jalan diperhalus. Sehingga mempermudah dan memperlancar arus transportasi.

Simpul: Setelah “waras”?

HR: Wasis, pinter cerdas, mumpuni. Ya wasis bergaul, wasis berbicara, wasis mengelola lingkungan dan sebagainya. Intervensi program melalui bantuan pendidikan Surakarta, pembangunan sarana pendidikan yang memadai, pembangunan SDM.

Simpul: Kemudian ?

HR: Warek, artinya kenyang. Kenyang perutnya, kenyang pergaulannya, kenyang ilmunya, kenyang imannya. Untuk itu, kita banyak melakukan pembangunan rumah ibadah, itu salah satu yang menjadi contoh. Di Solo, kami juga melakukan revitalisasi pasar, penataan pedagang kaki lima. Menciptakan wisata kuliner, membentuk ruang terbuka hijau untuk sarana publik. Kita akan menjadi matang secara ekonomi dan hukum.

Simpul: Apa itu yang bapak sebut revolusi sosial?

HR : Ya, revolusi sosial. Revolusi mental itu didahului dengan revolusi sosial. Mapan secara aturan maupun ekonominya. Kita tidak boleh mengais rejeki dengan melanggar Perda. Masyarakatnya juga tidak boleh melakukan itu. Secara ekonomi, bisa menyekolahkan anak. Harus ada pula tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Untuk program ini, ada relokasi di bantaran sungai, relokasi dari tempat – tempat yang kumuh, membuat tempat yang kumuh itu untuk menjadi tempat tinggal yang layak untuk dihuni, di bawahnya ada tempat usaha.

“Revolusi mental itu didahului dengan revolusi sosial. Mapan secara aturan maupun ekonominya.”

Simpul: Sejak kapan program ini?

HR: Program ini sudah sejak tahun 2005. Sejak saya jadi wakil, (walikota Solo), *awak (badan)* dan *sikil (kaki)*, namun arah dan tujuannya adalah meningkatkan arah kesejahteraan rakyat. Itu saya dokumentasikan jadi Buku.

Simpul: Bagaimana dengan Nawa Cita Presiden?

HR: Program Nawa Cita Jokowi itu kan secara makro atau nasional. Tentu saja itu tidak akan sama dengan Kota atau Kabupaten dan disesuaikan dengan potensinya. Misalnya di Solo, saya menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa dari sumber daya alam. Namun, menggantungkan kepada pajak dan retribusi. Kalau Solo diminta untuk ketahanan pangan kita tidak bisa, kita tidak punya lahan pertanian yang cukup, energi juga tidak bisa. Kita hanya mengandalkan jasa dan perdagangan. Dari itu, tentunya yang harus dipahami secara keseluruhan, secara total, mempunyai niat dan cita – cita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, itu secara konseptualnya, tapi kalau di-*break down* membangun tol laut, membangun lahan pertanian sekian juta. Memberikan hak tanahnya kepada rakyat, melakukan penanaman dua milyar pohon, membuat irigasi dan sebagainya. Itu kan yang sebenarnya mau dilakukan beliau. Dari masing – masing kota atau kabupaten. Tidak mungkin kan semua rumah dibuatkan irigasi. Drainase juga. Lalu tentunya Solo dibuatkan penataan sungai. Sungai Bengawan Solo jangan sampai “riwayatmu kini” tapi “riwayatmu dulu”. Artinya bermanfaat kembali sebagai transportasi air, sebagai wisata air, itu mestinya kembali kesana lagi. Lah, bagaimana caranya? PU programnya apa? Membuat waduk. Lantas membuat tempat – tempat wisata air. Lalu juga yang berat,



“Program Nawa Cita Jokowi itu kan secara makro atau nasional. Tentu saja itu tidak akan sama dengan Kota atau Kabupaten dan disesuaikan dengan potensinya.”



Walikota Solo sedang memimpin pertemuan dengan peneliti dan Tim Simpul

melarang pengusaha membuang limbahnya ke sungai. Bisa atau tidak itu?

Simpul: Bagaimana dengan kebijakan dalam RPJMD Solo?

HR: Masih sama, tinggal saya teruskan yang dulu zaman Pak Jokowi.

Simpul: Apakah ada yang disesuaikan pak?

HR: Tentu saja ada dan ada juga terobosan – terobosan. Tapi terobosan – terobosan tidak boleh menyimpang dari RPJM yang sudah kami buat bersama.

Simpul: Bagaimana sinkronisasi dengan RPJM nasional dari Presiden yang baru?

HR: Ya, kita tunggu dari Bappenas. Beliau (Presiden Jokowi) ini punya program *Quick Win, Quick Win* itu percepatan yang luar biasa yang mau diambil, sebaiknya jangan lima tahun. Setahun saja biar sampai. Jadi program unggulannya dalam satu tahun apa saja dan tentu tidak semuanya. Jadi bukan lima tahun, kalau yang lima tahun ada RPJM Nasional. Sebenarnya saya sempat bertemu Kepala bappenas, tapi belum membicarakan hal itu. Kita tinggal

mengimplementasikan. Jadi harus disinkronkan supaya tidak berbeda dari atas ke bawah.

Simpul: Bagaimana pengalaman beliau di sini dan apakah akhirnya di bawah ke Jakarta (Jadi Gub dan skr jadi Presiden)?

HR: Saya yang mendampingi beliau selama tujuh tahun, jadi ilmunya juga ada yang dari saya toh (tertawa). Saya juga sering diundang kesana. Kemarin kan saya diundang ke istana, ke Jogja. Saya juga hanya memberikan masukan saja kepada presiden. Entah masukan saya akan disambungkan kepada para menterinya atau tidak. Saya sekolah saja *tidak*. Kelasnya kan saya anggap hanya kelas RT.

Simpul: Apa ada kebijakan Bapak yang baru di Solo setelah di tinggal Jokowi?

HR: Ya kurang lebih, kita mempunyai cita – cita ingin mensejahterakan masyarakat itu.

Simpul: Apakah pak Jokowi mampu menghadapi kendala dan tekanan di depan dalam jabatannya sebagai kepala negara?

HR: Jadi begini, pesan saya kepada beliau itu satu, membuat komitmen itu pekerjaan mudah, tapi untuk mempertahankan konsistensi komitmen itu sendiri butuh orang yang berani menyampaikan, berani memotong, berani mendampingi tanpa kepentingan. Nah sekarang di sana, kepentingannya di sana seperti itu. Saya jadi takut sendiri.

Simpul: Maksudnya?

HR : Pak Jokowi ini butuh orang yang mendampingi beliau yang tidak memiliki kepentingan pribadi, namun kepentingan adalah sama, yaitu Nawa Cita itu tadi, dan ingin mensejahterahkan rakyat. Saya juga sebenarnya sempat mengingatkan, harus ada orang – orang yang memberikan masukan seperti itu agar tetap konsisten. Karena secara nasional ini kan intervensinya tidak hanya dari masyarakat. Dari politisi, pemodal dalam dan luar negeri. Oleh karena itu terjemahkan dahulu, berdaulat dalam bidang politik. Ini maunya beliau apa sih. Kalau yang sudah bicara beliau sebagai presiden ini, yang di bawahnya akan enak. Tapi saya tidak bisa bicarakan berdaulat dalam bidang politik, karena saya kan pemimpin kota, berdaulat dalam bidang politik itu *piye*? Ini yang harus di – *macth* – kan terlebih dahulu. Jadi dengan Nawa Cita yang dari Trisaktinya Bung Karno, apa yang harus dilakukan dari awal dahulu kan penyiapan RPJMN itu kan. Itu target – target apa saja yang mau dicapai terlebih dahulu baru kita bisa bicara. Namun, kalau saya mau menanggapi itu takutnya saya *kualat*, saya levelnya pak RT mau melangkahi.



“Membuat komitmen itu pekerjaan mudah, tapi untuk mempertahankan konsistensi komitmen itu sendiri butuh orang yang berani menyampaikan, berani memotong, berani mendampingi tanpa kepentingan.”



“Presiden dan wakil presiden ini tidak rebutan pekerjaan, tidak rebutan jabatan, apalagi uang. Dengan itu maka Nawa Cita akan jalan. Tapi kalau tiga hal ini beliau tidak bisa menghindari, nawa cita *nggak* jalan.”

Simpul: Berdasarkan pengalaman bapak mendampingi beliau tujuh tahun saja. Katakanlah konsistensi menghadapi tekanan sewaktu menjadi walikota ?.

HR: Contoh, sewaktu ada permasalahan mau digeser cagar budaya dulu itu kan, saya juga membantu beliau. Pegangan saya Perda dan Undang – Undangnya. Tidak bicara seenaknya sendiri, ada Undang – Undang Otonomi Daerah. Punya aset di sini mau seenaknya, *nggak* bisa. Menurut saya, yang paling penting lagi, antara presiden dan wakil presiden ini tidak rebutan pekerjaan, tidak rebutan jabatan, apalagi uang. Dengan itu maka Nawa Cita akan jalan. Tapi kalau tiga hal ini beliau tidak bisa menghindari, Nawa Cita *nggak* jalan.

Simpul: Apa dahulu pernah rebutan?

HR : Pesan saya dulu, waktu mau naik menjadi calon walikota tanya mau cari jabatan, cari pekerjaan, cari kekuasaan. Kalau cari itu saya bilang cari saja yang lain. Kalau komitmennya melayani, syaratnya tiga tadi. Tidak rebutan jabatan, tidak rebutan pekerjaan dan uang. Kalau terjadi rebutan itu ya *gelut*. Itu yang menjadikan Solo rukun itu, disitu. Tidak semua orang mengikuti, karena tidak terima setoran dan tidak pernahh minta kok. Saya dapat honor saja kalau tidak ada SK-nya, saya kembalikan. Jadi ini sebetulnya kembali lagi, berdua menurut saya loh ya. Duduk berdua dulu, Nawa Cita ini ada sembilan cita – cita, kita harus membangun komitmen dan mengawal konsistensi ini. Kalau ini bisa di implementasikan beliau di Kementerian, bayangkan pak Jokowi itu akan melakukan perekrutan lebih dari tiga ribu



orang. Mulai dari Menteri, Dirjen, Direktur, sampai ke bawah berapa departemen? Di kira hanya 34 Menteri itu? Tidak. Saya inginnya begini, jadi revolusi mental itu di dahului oleh revolusi sosial. Mentalnya akan ikut. Oleh karena itu kalau rakyat itu sehat, pintar dengan minimal belajar 12 tahun, perutnya kenyang, pergaulan dan lain sebagainya, imannya dan lain sebagainya, menjadi masyarakat mapan secara ekonomi dan maupun aturan, mempunyai tempat yang nyaman untuk dihuni. Tentunya tidak bisa kita menyusun semua ini tanpa koordinasi dengan Kepala Bappenas. Kalau nanti saya diundang di sana untuk memberikan masukan, akan saya berikan semampu saya.



“Mentalnya masing – masing orang kan tidak bisa dirubah, kalau tidak dibarengi dengan sosial – ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Menterjemahkan untuk Solo, Waras, Wasis, Warek, Mapan itu reformasi mentalnya.”

Simpulan: Waktu di Solo, apakah juga ada revolusi mental pak?

HR : Saya tidak bicara revolusinya, saya bicara reformasi mental. Caranya bagaimana tindakan konkrit? Reformasi dulu sosialnya. Setelah itu kita beri macam – macam, tentang kedisiplinan PNS, infrastrukturnya seperti apa, saya ada *stock opname* itu reformasi semuanya. Masak ATK antara 2003 hingga beberapa tahun berikutnya sama terus? Ini kita lakukan. Reformasi sosial ini untuk mencegah ruang – ruang menuju pada ruang yang negatif, korupsi semisal. Tadi kan ATK dahulu, lalu berlanjut pada program dan proyek. Kalau mental yang dirubah itu kan sulit, tapi kalau sosial kan bisa itu. Mentalnya masing – masing orang kan tidak bisa dirubah, kalau tidak dibarengi dengan sosial – ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Menterjemahkan untuk Solo, Waras, Wasis, Warek, Mapan itu reformasi mentalnya. Kalau masyarakatnya sehat, tidak kekuarangan makanan, ada tempat tinggal yang layak, dan lain sebagainya maka beres.

Simpulan: Kalau di Trisakti itu semisal berani menolak pemodal besar seenaknya dan melindungi para pengusaha kecil. Kalau skala global apakah beliau mampu dan berani ?

HR : Yang dimaksud dengan kepentingan Jokowi seperti itu, perlu saya sampaikan menolak pemilik modal besar itu boleh, tapi solusi untuk pemilik modal kecil itu apa? Kan belum dijelaskan.

Jadi misalnya, saya menolak pemilik modal besar, solusinya satu, Bank Solo kalau para pengusaha kecil, itu bunganya enam persen setahun. Yang kedua, kita memberikan bantuan – bantuan modal tentang UMKM, membantu memasarkan. Solusinya ada. Dari beliau yang mau disampaikan itu, apa solusi konkrit itu harus disediakan.

Simpulan: Berarti tetap menunggu dari RPJMN itu ya Pak?

HR : *Inggih (iya)*, terjemahannya visi dan misi semuanya ada di sana. RPJMN itu nanti yang melaksanakan para Menteri, Dirjen, Deputi dan di bawahnya koordinasikan dengan Bupati, Walikota, Gubernur. Mestinya kalau mau benar, Bupati dan Gubernur diundang per provinsi. Kita sama – sama memberikan masukan, lalu di *godok* di Kementerian.



KH. Prof. Dr. Said Aqil Siradj, MA
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

NEGARA HARUS MELIBATKAN CIVIL SOCIETY

Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia yang memiliki anggota atau umat sekitar 70 juta, merupakan ormas terbesar yang telah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak kiprah NU dalam rangka ikut memperjuangkan kemerdekaan RI. Hingga saat ini NU juga terus ikut secara aktif membangun masyarakatnya melalui berbagai bidang, baik pendidikan, keagamaan, social, budaya dan beberapa anggota NU juga mendirikan partai politik sebagai sarana perjuangan membangun umatnya. Dalam usia yang memasuki hampir 88 tahun, sejak didirikan pada 31 Januari 1926, maka NU ikut berkepentingan dalam menjaga sekaligus berpartisipasi pembangunan nasional. Pergantian pemerintahan selalu memberikan perubahan dalam kebijakan pembangunan dan tentu saja pembangunan ini akan memberi dampak langsung atau tidak langsung kepada NU dan umatnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya "kader" NU sebanyak tujuh orang dalam jajaran kabinet dan pemerintahan baru, bagaimana NU memandang arah kebijakan pemerintahan baru? Apa saja harapan dan saran NU kepada pemerintah baru? Berikut adalah pandangan Ketua Pengurus Besar NU (PB NU). KH. Prof. Dr. Said Aqil Siradj, MA (KH) kepada Simpul di ruang kerjanya :

Simpul : Bagaimana NU melihat pemerintahan baru dengan Visi dan Misinya (Nawa Cita)?

KH : Sebelumnya saya ingin cerita tentang NU terlebih dahulu. Hampir tiap minggu, kantor ini kedatangan tamu dari Dubes. Utusan Kemenlu Amerika Serikat, Swedia, Prancis.

Simpul : Ada apa dengan mereka ?

KH : Mereka tertarik dengan NU karena NU adalah ormas mayoritas, yang konon katanya jumlahnya 70 juta tapi ternyata santun, tidak arogan bahkan mempelopori gerakan – gerakan damai. Biasanya kelompok mayoritas, suku, atau apapun, kalau di Amerika Serikat pasti arogan. Maka sikap toleran dan moderatnya NU itu yang dinilai luar biasa dari semua pengamat terutama dari eksternal. Ini perlu kita pelihara.

Simpul : Kenapa?

KH : Karena posisi Indonesia yang diapit dua negara besar Australia serta China, yang non muslim. Kalau kita tidak pandai – pandai *memanage* berbagai aliran Islam, bisa terjebak kepada kekerasan, kepada radikalisme. Itu yang diharapkan oleh mereka yang tidak senang dengan Islam dan ada alasan untuk menghantam. Alhamdulillah Indonesia mayoritas Islam, yang menunjukkan Islam adalah agama yang membawa rahmat, santun dan toleran. Bayangkan di Timur Tengah, itu sudah memalukan, apa yang kita harapkan dari kemajuan Islam atau syiar Islam atau peradaban dari negara semacam Irak yang setiap hari bom meledak, atau juga dari Lybia dan Yaman. Juga di Suriah yang sudah memasuki

tahun ketiga dengan 200 ribu lebih korbannya. Apa yang bisa kita harapkan, maka satu – satunya yang bisa diharapkan, kemajuan Islam dan budayanya itu adalah dari Indonesia.

Simpul : Apa peran NU dalam hal ini ?

KH: Di Indonesia ini *Ahlussunnah wal Jamaah* yang merupakan *rahmatullah*. NU ini adalah *Civil Society* yang menjadi perekat semua aliran yang ada. Pada Islam, semua aliran kita lindungi. Di samping NU juga mempunyai nasionalisme yang kuat. Para kyai itu nasionalismenya kuat bukan karena membaca bukunya Ernest Renan, bukan karena membaca literatur barat. Tapi mencintai tanah air sudah menjadi darah dagingnya. Contoh, pesantren – pesantren besar di Jombang dan Kediri, mereka tidak menonjolkan nama pesantrennya. Tebu Ireng itu namanya *Asslafiayah Asslaffinnah* jarang yang tahu itu, Den Anyar itu namanya *Manba'ul Ma'arif*, juga tidak semua orang yang tahu, begitu pula di Tambak Beras, *Baklul Ulum*

Simpul : Ini apa artinya?

KH: Para kyai menerima bahwa nama pondoknya tidak terkenal yang penting nama desanya. Itu betapa para kyai itu mencintai tanah air. Jangan dianggap sepele, itu masalah lokal, kecil tapi semangat nasionalisme itu mengalir dalam darah kyai. KH. Hasim Asyari berulang kali mengatakan antara Islam dan Indonesia ini jangan bertentangan. Islam mengisi spiritual nasionalisme, nasionalisme memperkuat Islam. Kalau Islam saja belum tentu memperkuat Islam. Contoh Afganistan, semuanya Islam tapi

“KH. Hasim Asyari berulang kali mengatakan antara Islam dan Indonesia ini jangan bertentangan. Islam mengisi spiritual nasionalisme, nasionalisme memperkuat Islam.”

berantakan negaranya. Semua perang saudara, karena tidak ada komitmen semangat mempertahankan persatuan negara, yang ada cuman Islam saja. Timur Tengah semuanya Islam tapi perang saudara semua. Artinya nasionalisme masih menjadi persoalan, masih dipertanyakan permasalahan nasionalisme itu. Oleh karena itu kita bersyukur, saya sebagai ketua PB NU meneruskan apa yang telah digariskan oleh KH. Hasyim Asyari oleh Gus Dur, kita hanya kelanjutan dari para beliau itu.

Simpul : Bagaimana dengan Pemerintahan Baru ?

KH: Mengenai pemerintahan sekarang, saya ucapkan selamat. Dengan doa semoga pemerintahan Jokowi – JK berhasil melakukan revolusi mental, perbaikan di bidang hukum, keadilan, ekonomi juga.

Simpul : Kondisi dan Situasi negara kita saat ini menurut NU?

KH: Di saat reformasi berbarengan dengan keterbukaan yang luar biasa. Indonesia negara Islam yang juga negara ketiga, yang paling terbuka, yang paling bebas. Bayangkan semua aliran silahkan masuk kesini. Baik yang kiri, sekuler, yang kanan ekstrim semua masuk. Bayangkan





orang – orang Yahudi datang kesini, buka pesantren, buka yayasan, madrasah. Sebaliknya jika kita NU mau *bikin* masjid di Saudi, sampai mati *nggak* bisa. Sampai sekarang pun Wisma Indonesia di Azziziyah, kalau haji dipakai sangat sibuk itu, masih atas nama pribadi orang Saudi yang keturunan Indonesia, kalau *nggak* salah orang Sumedang, KH. Husen. Nama kedutaannya *nggak* boleh, yang boleh itu cuman tanah khair itu saja. Kita ini sangat bebas, mau bicara apa, mau nulis apa, mau menyebarkan apa. Ini kalau tidak hati – hati maka suatu hari Indonesia bisa kehilangan jati diri, kehilangan karakter, kehilangan norma, kehilangan ketimurannya, agamanya, budayanya.

Simpul : Dengan situasi demikian apa yang harus dikerjakan ?

KH: Pertama, barangkali liberalnya untuk politik, *oke*, multipartai. Setelah orde baru yang tertutup lah. Lama – lama liberal budaya, liberal agama. Sekarang sudah ada kelompok yang menginginkan liberal ekonomi, pasar bebas. Sudah ada kelompok yang memperbolehkan kawin sejenis. Ini luar biasa ini, dan ini sudah menentang agama, ketimuran dan budaya kita. Kalau kita sudah kehilangan jati diri, tinggal tunggu bangkrutnya Indonesia ini.

Mudah – mudahan tidak. Oleh karena itu negara sekuat apapun harus menyertakan *civil society* seperti NU ini. *Civil society* yang besar, punya kekuatan sampai ke bawah, ke pelosok, *grassroot* ini harus dipertahankan.

Simpul : Yang Bapak sebutkan dan khawatirkan ini apakah memang rekayasa dan keinginan pihak luar ?

KH: Pertama di sini sudah ada. Yang menerima potensinya sudah ada. Kedatangan transnasional misalkan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Di sini memang sudah ada potensinya, kalau kita benar – benar akan mempertahankan kepribadian kita, pasti kita akan menolak. Budaya luar negeri yang memalukan, tidak cocok sebagai bangsa yang beragama dan beradab.

Simpul : Jadi karena tadi ada potensi itu?

KH: Iya, kemudian mudah sekali direspon. Setiap ada ide baru pasti akan diikuti oleh masyarakat. Misalkan adanya Nabi palsu, Mussadeq, sudah berapa tahun pengikutnya sudah 45 ribu, setelah saya ajak debat itu, bertaubat tahun 2009. Pengikutnya sudah ada



“Dengan tentara dan polisinya, juga segala birokratnya dengan institusinya, juga bersama *civil society*, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis. Negara dengan kekuatan sebesar apapun harus mengikut sertakan *civil society*.”

di Batam, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi begini, kalau betul – betul kita ingin menyelamatkan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat ayo kita bergandengan tangan. Jangan hanya mengandalkan tentara dan polisi atau partai politik, itu rapuh. Harus bersama – sama dengan pemerintahan, dengan tentara dan polisinya, juga segala birokratnya dengan institusinya, juga bersama *civil society*, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis. Negara dengan kekuatan sebesar apapun harus mengikut sertakan *civil society*.

Simpulan: Untuk lima tahun kedepan, menurut NU apa yang prioritas harus dilakukan?

KH: Dimulai dengan penegakan hukum, hukum kita sangat rapuh sekali.

Sudah berapa lama kita melalui reformasi. Bukan rahasia lagi kalau rakyat kecil mencari keadilan itu susah. Bisa saja hakim memutuskan salah jadi benar, benar jadi salah dengan hanya satu ketukan palu. Yang kaya jadi miskin yang miskin jadi kaya. Reformasi hukum harus dilakukan disemua instansi penegak hukum, polisi, jaksa. Yang kedua jelaslah ekonomi, selama rakyat ini masih kelaparan, masih banyak kelompok yang miskin, selama itu pula kita khawatir. Gejala yang tidak kita inginkan dalam bangsa ini. Oleh karena itu, yang konglomerat kita hormati, asalkan konglomerat punya komitmen menarik, mengangkat yang di bawahnya, kelas menengah. Kelas menengah menarik kelas di bawahnya, orang kecil.

Simpulan: Porsi pemerintah?

KH: Harus mempermudah, mempermudah fasilitas terhadap kelas menengah dan kecil. Sudah ada Menteri UKM, tapi pada prakteknya belum berjalan. Rakyat kecil itu susah mencari bantuan dari bank, harus ada agunan. Yang KUR juga tidak efektif. Saya keliling itu, Bondowoso, Ciamis Selatan, Indramayu Barat, masih banyak orang miskin yang belum tersentuh dengan bantuan – bantuan pemerintah.

“Kita bangun bangsa yang bermartabat, bangsa yang punya kredibilitas internasional. Jangan jadi bangsa kuli, bangsa budak, yang mengirim TKW – TKW ke Arab, pulang *pada* hamil semua, disiksa, diperlakukan semena – mena.”

Simpulan : Apa sebabnya ?

KH: Ketika akan menyampaikan kredit kepada rakyat kecil, mereka butuh biaya. Katakanlah BRI, untuk sampai ke bawah itu butuh biaya. Kenapa tidak dengan NU? Tanpa biaya besar. Anak muda kita ajak, santri kita ajak. Bisa itu, hanya sekedar uang bensin atau uang pulsa. Kalau petugas BRI yang turun ke bawah, anggarannya besar.

Simpulan : Bidang sosial ?

KH: Kalau sosial kita sebenarnya mempunyai filosofi yang luar biasa, kita harus bangga dengan tatanan sosial kita. Kita harus bangga dengan warisan, budaya, sosial yang kita warisi dari pendahulu kita. Bayangkan di luar negeri, sudah ada keretakan sosial. Kakak – adik sepupu saja sudah tidak kenal, anaknya paman dengan paman lainnya sudah tidak kenal. Kita *Alhamdulillah* masih erat, keluarga besar bisa kumpul ketika ada silaturahmi, lebaran, ada syukuran atau kegiatan lainnya. Bisa kumpul semua keluarga. Di Barat tidak ada itu, jangankan begitu, di Arab saja sudah sulit. Sudah putus, sudah hilang semangat silaturahmi, untuk berkumpul antar famili yang dari jauh sulit diatur, kecuali Mesir karena ada *Tariqod*. Kita *Alhamdulillah* kita melalui jalur apa saja, ada *Tariqod*, Dzikir bersama, ada ormas, Majelis *Taqlim*. Kita ini sebenarnya sebagai pelaku sosial, sebagai aktivis sosial tinggal memberikan dukungan, memberikan perhatian. Kita *nggak* mengharapakan honor dari

pemerintah. Kita ingin pemerintah mempermudah segala aktivitas kita, membuka jalan lah.

Simpulan : Kalau tantangan dari luar apa yang harus diantisipasi?

KH: Pertama kita harus bangga dengan produk dalam negeri, mari kita angkat hasil karya dan kreativitas bangsa kita. Yang kedua, konglomerat yang menyimpan uangnya di Singapura, Hongkong, Swiss, coba uang itu ditarik kesini. Kita betul – betul ingin mengangkat ekonomi dalam negeri. Karena kita ini terus terang saja kaya raya, sumber daya alam, sumber daya manusia sebenarnya kaya raya. Tapi yang sumber daya alam *dikangkangi* oleh pengusaha luar yang pengusaha dalam negeri menaruh uangnya di luar negeri. Kalau betul – betul cinta tanah air, ayo semua konglomerat yang menyimpan uang di luar itu yang jumlahnya ribuan triliun coba tolong tarik ke Indonesia. Dan harus dimulai siapa yang harus jadi panutan atau contoh. Kemudian kita bangga dengan produk dalam negeri, kita jangan hanya selalu menyukai produk luar negeri. Kalau dari segi budaya, kita bangun bangsa yang bermartabat, bangsa yang punya kredibilitas internasional. Jangan jadi bangsa kuli, bangsa budak, yang mengirim TKW – TKW ke Arab, pulang *pada* hamil semua, disiksa, diperlakukan semena – mena, tidak manusiawi, itu menjatuhkan nama bangsa kita.

Simpulan : Bagaimana dengan peran dan fungsi legislatif ?

KH: Saya juga heran kenapa perpecahan di dalam DPR sendiri kok belum selesai? Karena ketua MPR itu pernah menjamin minggu depan selesai. Sampai sekarang belum juga. Saya harapkan mari kita sadar, mari kita mendahulukan kepentingan bangsa ini. Semua juga mengerti lah, apa yang saya katakan, mari kita belajar berkorban. Kalau tidak bisa berkorban uang, berkorban nyawa, ya berkorban perasaan, berkorban ide, berkorban kepentingan. Kepentingan kita kurangi sekian persen, sehingga nanti akan ada titik temu dengan kepentingan dari kelompok lain. Kami juga PB NU belajar berkorban. Dengan teman – teman ketua – ketua kalau ada ketegangan, masing – masing saling sadar dan mengorbankan kepentingannya, walaupun tidak semuanya, demokrasi kan seperti itu.

Simpulan : Apa sebabnya mereka demikian ?

KH: Akibat Pilpres kemarin, dominasi parlemen dengan eksekutif berbeda. Jadi yang menang dari kelompok Jokowi – JK, yang kelompok di parlemennya lebih sedikit daripada yang kalah. Bukan sulit sebetulnya, kalau masing – masing ingin mendahulukan kepentingan bersama, saya kira bisa.



Simpulan : Apa dampaknya?

KH: Ya artinya berdampak kepada pembangunan, anggaran bertele – tele, anggaran *gak* putus – putus atau cair – cair. Yang merasakan rakyat kecil akibatnya. Pasti itu. Saya juga heran, kenapa DPR seperti itu. PPP pecah, Golkar mau pecah tapi selamat, saya khawatir nanti pecah kayak PPP. Partai manapun adalah aset bagi bangsa ini. Yang menang di eksekutif, Jokowi – JK itu pemimpin kita, yang di DPR pun wakil – wakil kita, apa sih bedanya. Ya kalau toh ada perbedaan itu wajar. Asalkan tidak sampai mengganggu tatanan permainan politik antara legislatif dengan eksekutif.

Simpulan : Lalu NU mengambil posisi yang seperti apa?

KH: NU tetap menjaga keutuhan bangsa, itu saja fungsi yang paling penting. Karena warga NU itu ada yang jadi tentara, jadi hakim, jaksa, di semua partai politik ada warga NU. Idrus Marham itu NU, Mujib Rahmat dari Golkar itu NU, kalau di PDIP itu ada Fallah Muttasim, di kabinet ada tujuh NU. NU itu akan menjadi kekuatan *civil society* yang selalu mementingkan dan mendahulukan keutuhan dan keselamatan bangsa ini. Kami sangat menolak kelompok yang ingin mengkonstitusikan agama.

“Partai manapun adalah aset bagi bangsa ini. Yang menang di eksekutif, Jokowi – JK itu pemimpin kita, yang di DPR pun wakil – wakil kita, apa sih bedanya. Ya kalau toh ada perbedaan itu wajar. Asalkan tidak sampai mengganggu tatanan permainan politik antara legislatif dengan eksekutif.”

Simpul : Bagaimana dengan kelompok – kelompok yang mengatas namakan agama?

KH: Kami tidak sependapat, bahwa Indonesia ini bukan negara agama, bukan Islam, Khatolik, Buddha, Hindu. Negara Indonesia ini ditinggali oleh sekian banyak agama. Bukan pula negara suku, kayak Saudi Arabia. Juga bukan negara keluarga seperti di Bahrain dan Qatar. Indonesia juga bukan negara Jawa, Sunda, Madura, Batak, Ambon, Melayu. Indonesia terdiri dari 1000 lebih suku, yang besar ada 30 suku. Terdiri dari enam agama, masih ada lagi agama lokal barangkali ada 20-an, *udah* selesai.

Simpul : Apakah ada pihak luar yang berkepentingan ?

KH: Pasti, demi Allah apa yang dilakukan ISIS itu bertentangan dengan Islam. Begitu pula dengan teman – teman kita di dalam negeri yang *ngebom* segala macam, itu bertentangan dengan Islam. Islam tidak begitu. Siapa pun yang melakukan kekerasan atas nama Islam itu bukan Islam. *Laaiqro' Hafiddin*, tidak boleh kekerasan dalam agama. Al – Qur'an itu begitu. Jadi dibalik juga bisa, *Laafiddini Wal Fil Iqro'*, tidak ada agama dalam kekerasan. Jadi kalau melakukan kekerasan itu bukan agama. Paus sendiri baru mengatakan tidak menarik Islam dalam kekerasan, malu. Saya pernah diundang di Korea, di depan orang – orang Korea, malu. Dalam benak mereka, Islam itu garis miring teroris, garis miring radikal.

Simpul : Label itu bisa dibuat oleh kelompok kecil yang membuat kita tercemar ya pak?

KH: Iya, dan itu diharapkan oleh orang – orang yang tidak berharap Islam mempunyai nama baik. Ditunggu betul oleh orang – orang yang berharap Islam itu jelek. Ketika *ngebom* 11 September itu menjadi alasan Amerika Serikat memasuki Afganistan. Apalagi ISIS yang semakin banyak pengikutnya, muslim Prancis 700, muslim Inggris 400. Tunisia 300, Indonesia 300 .

Simpul : Siapa dibalik mereka?

KH: Mereka (ISIS) banyak uangnya, mereka berhasil menguasai bank – bank, ladang minyak di Irak Utara, kilang – kilang minyak, sumber – sumber kekayaan. Kota – kota juga sudah dikuasai, Mosser, Kirkuk, Tikrit. Yang menentang, bunuh. *Nggak* ada diplomasi, *nggak* basa – basi. Satu suku Yazidi, habis dibunuh semua. Syiah menentang, bunuh semua. Tapi itu bukan Islam, sama sekali bukan. Islam di Indonesia, tidak begitu. Kita kan disuruh menjadi kelompok pemaaf, toleran, menghargai perbedaan, ajaran kyai begitu. Coba ya Saddam Husein kejam, bunuh orang 25 ribu ada lah, tapi begitu digulingkan

oleh NATO dan Amerika Serikat, sampai sekarang nyawa yang hilang karena konflik 700 ribu lebih. Masih mendingan Saddam Husein. Begitu pula Khadaffi, Hafid Assad. Katakanlah Hafid Assad yang dholim, membunuh rakyatnya, yang oposisi lah. Sekarang dibiarkan, di Suriah itu 200 ribu lebih nyawa melayang.

Simpul : Bagaimana dengan potensi radikalisme di Indonesia?

KH: Mungkin saja ada, tapi kita lihat reformasi di kita itu hanya tiga bulan setengah. Bayangkan sampai sekarang di Mesir belum selesai. Yang agak cepat itu Tunisia, Yaman belum selesai. Lybia semakin parah, Irak semakin parah. Kita paska turunnya Pak Harto, tiga bulan setengah selesai. Stabil, jadi artinya kita masih punya kepribadian yang kuat.

Simpul : Lalu himbauan dari NU kepada CSO lainnya?

KH: Sama seperti NU mengambil peran, *wal hasil* semua Ormas – Ormas sebelum merdeka, sebelum NKRI sama. Saya kira NU, Al – Irsyad, *Robbitu Allawiyah*, kita harap sama dengan NU hanya saja mereka kecil. Kalau Ormas lainnya setelah merdeka dan setelah reformasi harus menyesuaikan .



Leadership In Succesion And Talent Management MBS Australia

Oleh :
Wahyu Pribadi

Reformasi Birokrasi merupakan kata pertama yang ditekankan pada saat mengalami Diklat *Leadership in Succesion and Talent Management* di Melbourne Business School (MBS) Mt. Eliza Australia. Reformasi Birokrasi pada intinya adalah perubahan. Di mana perubahan yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan sehingga public atau masyarakat mendapat kepuasan atas "service" yang diberikan oleh pemerintah. Penekanan Reformasi Birokrasi terletak pada penguatan manajemen sumber daya manusia, penataan kelembagaan publik, dan perbaikan tatalaksana. Penguatan manajemen sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas aparatur sehingga mampu berpikir dan bertindak sebagai aparatur pemerintah yang melayani, sehingga mampu bekerja dengan semangat mengabdikan dan melayani masyarakat. Penataan kelembagaan diharapkan untuk membentuk sebuah organisasi publik yang ringkas dan berorientasi pada kualitas servis yang diberikan, dan dapat berperan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbaikan tata laksana ditujukan untuk menyederhanakan sistem operasi dan prosedur sehingga menjadi sebuah standar pelayanan publik efektif dan efisien.

Kerangka Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut di atas merupakan langkah-langkah antisipasi terhadap perkembangan dan perubahan zaman yang terus terjadi yang harus disikapi dengan

bijaksana. Kemampuan pemerintah dalam hal ini birokrasi dalam merespon tantangan dan peluang ke depan dengan baik dan tepat menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Pemerintahan baru yang dipilih melalui proses pemilihan yang demokratis, telah memberikan harapan dan semangat baru untuk mewujudkan cita-cita tadi.

Revolusi mental yang menjadi jargon pemerintahan baru, harus menjadi titik tolak dalam melakukan perbaikan menyeluruh dan di segala bidang untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera. Revolusi mental, dalam konteks Reformasi Birokrasi, harus menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak demi kejayaan bangsa. Revolusi mental, sekali lagi harus diterjemahkan lebih tegas dalam tatanan praktis ke dalam bentuk manajemen sumber daya manusia aparatur, pengembangan kelembagaan, dan peningkatan ketatalaksanaan.

Reformasi Birokrasi yang menitikberatkan pada perbaikan manajemen sumber daya manusia harus dipersiapkan dengan matang agar tidak mati suri. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, oleh beberapa pihak, dirasakan berjalan lamban. Percepatan reformasi kemudian dirasakan penting. Bank Dunia melalui SPIRIT program, merasa perlu membantu langkah-langkah percepatan Reformasi Birokrasi ini. Melalui program SPIRIT ini dilakukan penguatan kapasitas institusi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program SPIR-

IT dilaksanakan dengan memberikan beasiswa S2 dan S3 di dalam dan di luar negeri, serta memfasilitasi penyelenggaraan Diklat non gelar baik di dalam maupun di luar negeri pula.

Dalam rangka penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur ini pula, program SPIRIT memfasilitasi penyelenggaraan Diklat *Leadership in Succession and Talent Management*. Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama Pusbindiktren Bappenas dengan Melbourne Business School (MBS Mt. Eliza), Melbourne University, Victoria, Australia. Pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober s.d. 1 November 2014 di MBS Mt. Eliza Melbourne, Australia.

Kegiatan *Leadership in Succession and Talent Management Training* ini diikuti oleh 24 orang yang berasal dari dua instansi yaitu BKN dan Bappenas. Dalam pelatihan ini yang bertindak sebagai koordinator adalah BKN. Peserta Diklat terdiri dari para pegawai yang berhubungan dengan manajemen dan tatakelola sumber daya aparatur. Salah satu peserta pelatihan ini adalah Wakil Kepala BKN.

Selama lima hari, acara dimulai pada pukul 8.30 pagi dan berakhir pada pukul 18.00 sore waktu setempat. Dilihat dari jadwal yang ada (terlampir), terasa sangat padat. Namun demikian karena materi dan cara penyampaian yang sangat menarik, jadwal yang ketat dan padat, serta melelahkan menjadi tidak terasa. Lima hari pelatihan terasa menjadi sangat singkat. Pelatihan ini didukung oleh tenaga pengajar yang sangat profesional dan kaya pengalaman. Prof. Ian Williamson, Ass. Professor Carrol Gill, Sahera Sumar, Ian Fitzgerald, Damian, dan Michael Curtin merupakan fasilitator-fasilitator yang sarat dengan ilmu dan pengalaman praktis. Para pengajar ini telah mengajar di bidangnya di berbagai universitas di Australia dan pengalaman riset di berbagai perusahaan multinasional. Teori yang diberikan dipadukan pengalaman praktis narasumber menjadi daya tarik tersendiri.

Adapun silabus pelatihan *leadership in succession and talent management* ini adalah sebagai berikut.

Leadership and Human Capital

- *The strategic context of human capital*
- *How leadership impacts strategy and how leaders execute strategy*

Succession Management

- *Succession management – theory, purposes and strategy*
- *Case study on succession management*
- *Implementing succession management – operational, strategic, talent aspects*



“Reformasi Birokrasi yang menitikberatkan pada perbaikan manajemen sumber daya manusia harus dipersiapkan dengan matang agar tidak mati suri.”



Succession Management in Organization

- *Human capital frameworks : Individual capability, workforce capability, agency capability*
- *Setting up integrated talent management practices – structured dialogue*
- *Succession management: policy development, execution of the policy, desired future of succession management*
- *Critical elements of high impact succession management*

Leadership, change and succession management

- *Introduction to leading change practices*
- *Introduction to change leaderships*

Personal leadership, succession management and change

- *Introduction to change leadership case in-point*
- *Change leadership re-cap*
- *Culture and change, facing implementation difficulties*
- *Succession management driving organizational performance through succession management processes*
- *Succession management : moving from a 'replacement policy' to integrated succession and talent management*

Succession Management from plan to action

- *Succession management : operational and personal planning*
- *Leadership plans action planning*

Materi-materi yang disampaikan tersebut sangat komprehensif mulai dari kepemimpinan, *human capital*, perencanaan karir, sampai dengan pengelolaan sumber daya manusia potensial. Selama pelatihan juga diajarkan menyusun perencanaan manajemen suksesi sampai dengan menyusun rencana aksi. Hubungan antara *leadership*, *human capital*, dan *talent management* digambarkan secara.

Dari pelatihan tersebut terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan kepemimpinan, manajemen suksesi, dan manajemen SDM. Kepemimpinan yang responsif akan selalu melihat perubahan lingkungan strategis sebagai tantangan untuk berinovasi dan bertindak. Kepemimpinan yang baik akan memanfaatkan manajemen suksesi dan manajemen talent untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan. Sehingga manajemen suksesi dan manajemen talent akan selalu berusaha untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk menempati posisi yang diperlukan organisasi.

“Kepemimpinan yang baik akan memanfaatkan manajemen suksesi dan manajemen talent untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan.”

Manajemen suksesi dan manajemen talent menunjukkan bahwa pengelolaan pegawai harus dilakukan secara transparan, baik pada saat rekrutmen, pembinaan, mutasi, rotasi maupun promosi. Manajemen talent dan manajemen suksesi menjamin rekrutmen dilakukan secara fair sehingga organisasi mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan baik. Pada intinya, manajemen suksesi mengajarkan pada seluruh stakeholder untuk dapat beradaptasi pada perubahan. Dalam rangka adaptasi inilah, manajemen suksesi dan *talent* mempersiapkan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. Dalam pelatihan ini juga diingatkan bahwa dalam manajemen suksesi dan *talent* dapat menghindari pengkotakan unit-unit kerja dalam organisasi. Manajemen suksesi dan *talent* mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan organisasi merupakan keberhasilan seluruh unit kerja yang ada. Sebagai suatu sistem, unit-unit kerja merupakan subsistem-subsistem terpisah namun terikat dalam satu system organisasi yang lebih besar. Keberhasilan sebuah subsistem unit kerja bukan semata-mata hasil jerih payah sendiri, tetapi merupakan hasil kerja bersama dengan subsistem yang lain. Satu subsistem akan memberikan kontribusi pada subsistem yang lain.

Manajemen suksesi mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan yang baik akan memberikan ruang-ruang yang cukup bagi seluruh *stakeholder* untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada capaian organisasi. Kondisi ini memungkinkan adanya komunikasi yang intent antar unit sehingga bisa saling memahami persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi. Koordinasi dan komunikasi menjadi kunci bagi organisasi untuk mengembangkan manajemen suksesi dan *talent*.



Rapat Koordinasi SPIRIT Tahun 2014

Oleh :
Dwi Harini Septaning Tyas

Rapat koordinasi SPIRIT Tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak lima kali. Intensitas rapat koordinasi di tahun ini meningkat sebagai respon dari pelaksanaan *midterm review* pada bulan Mei yang bertujuan untuk memantau capaian target SPIRIT oleh seluruh *instansi sasaran* hingga tengah usia proyek. Beberapa hal krusial yang dibahas adalah kinerja program SPIRIT berupa capaian target jumlah peserta baik program gelar maupun non-gelar dan pengurangan *competency gap analysis*, realokasi anggaran, dan penyusunan *re-entry program*.

Hingga bulan Mei 2014, sebanyak 538 orang master dan doktoral yang diberangkatkan studi ke universitas di dalam maupun luar negeri. Dengan angka tersebut, maka pelaksanaan SPIRIT sudah mencapai 83 persen dari total target *Human Capital Development Plan (HCDP)*. Sedangkan untuk program non-gelar, hingga tahun 2014 telah diberangkatkan 492 peserta melalui pebiayaan SPIRIT. Apabila dibandingkan dengan program gelar, capaian program non-gelar lebih rendah yaitu hanya baru mencapai 39 persen dari target HCDP. Perlu perhatian khusus dari semua pihak untuk akselerasi pelaksanaan program non-gelar di sisa setengah usia proyek SPIRIT ini. Destinasi Diklat masih didominasi oleh universitas/ lembaga luar negeri, hal ini sesuai dengan perencanaan di masing-masing instansi sasaran dalam HCDP yang memprioritaskan pemilihan studi ke luar negeri. Hal tersebut dilatarbelakangi den-

gan asumsi bahwa studi ke luar negeri selain mendapatkan ilmu/ *academic knowledge*, namun karyasiswa juga akan mendapatkan pengalaman lainnya seperti pengembangan mental dan wawasan baru yang lebih luas.

Berdasarkan pemantauan terhadap pengukuran capaian target jumlah peserta program gelar dan non-gelar maka direkomendasikan untuk dilakukan realokasi anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran dan pemenuhan daya serap capaian target yang telah

“Intensitas rapat koordinasi di tahun ini meningkat sebagai respon dari pelaksanaan *midterm review* pada bulan Mei yang bertujuan untuk memantau capaian target SPIRIT oleh seluruh *instansi sasaran* hingga tengah usia proyek.”

direncanakan dalam HCDP. realokasi anggaran dilakukan melalui pengurangan anggaran dari instansi sasaran yang tidak dapat memenuhi target sehingga masih memiliki sisa dana yang tidak termanfaatkan yang kemudian akan diberikan kepada instansi sasaran yang kekurangan anggaran serta tingkat pengurangan competency gap yang masih rendah. Hasil realokasi anggaran ini akan dimanfaatkan untuk penambahan peserta pada program Master luar negeri, sesuai dengan arahan Ketua *Steering Committee* SPIRIT.

Program beasiswa SPIRIT sangat memperhatikan pemanfaatan kembali alumni yang sudah diDiklatkan, hal ini terbukti dengan diwajibkannya seluruh *instansi sasaran* menyusun *re-entry program*. Bahkan ketua *Steering Committee* telah mengundang seluruh pimpinan *instansi sasaran* dalam *breakfast meeting* untuk menunjukkan keseriusan dan dukungan terhadap keberhasilan penyusunan *re-entry program* tersebut. Status Perkembangan penyusunan di masing-masing *instansi sasaran* hingga saat ini sangat beragam, terdapat *instansi sasaran* dengan *re-entry program* yang sudah diformalkan namun juga terdapat *instansi sasaran* yang bahkan belum memiliki konsep *re-entry program*. Hal ini sangat disayangkan karena dikhawatirkan alumni SPIRIT nantinya tidak dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Guna mengakselerasi penyusunan *re-entry program*, maka pada awal tahun 2015 direncanakan pelaksanaan pendampingan dan workshop penyusunan *re-entry program* untuk para instansi sasaran sesuai dengan kebutuhannya.

Komitmen dan kerjasama seluruh *stakeholder* sangat diperlukan demi tercapainya target program beasiswa SPIRIT di sisa setengah usia proyek ini. Selain itu, penguatan koordinasi serta penentuan jadwal kerja yang tepat dan jelas juga diperlukan untuk keberhasilan penyelenggaraan program beasiswa SPIRIT ini. Diharapkan program beasiswa SPIRIT dapat mendukung peningkatan kapasitas instansi sasaran dan selanjutnya dapat memberikan dampak yang signifikan bagi keberhasilan dan keberlanjutan Reformasi Birokrasi di Indonesia.





Bridging Research To Policy

Oleh :
Shri Mulyanto

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para pegawai di lingkungan pemerintah, maka Bappenas mengirim beberapa pegawainya untuk mengikuti Training *Bridging Research to Policy* yang dilaksanakan di Brisbane, Australia. Training ini merupakan pelatihan yang berisikan cara-cara menjembatani penelitian untuk suatu kebijakan. Pelatihan ini memuat tata cara menyusun, membangun suatu *policy* yang didasarkan pada penelitian yang secara khusus memang mendukung penyusunan kebijakan tersebut. Pelatihan

Tujuan Pelatihan/Training

Peserta diharapkan dapat menghasilkan kertas kerja penelitian kebijakan *Policy Research Paper* atau Penjelasan Singkat tentang suatu Kebijakan (*Policy Brief*) sebagai *output* utama. Permasalahan penelitian kebijakan yang diajukan sebagai proposal kertas kerja dapat merupakan hasil kerja kelompok maupun individu, namun setiap peserta harus menyelesaikan kertas kerjanya/ *policy brief* sendiri sesuai dengan subject prioritas perencanaan yang merupakan tugas pokok fungsinya di Kementerian PPN/Bappenas. Peserta juga diharapkan membagi pembelajaran selama kursus kepada rekan-rekan lainnya setelah kembali ke Indonesia.

Produk - Hasil Akhir Pelatihan

Serangkaian proses pelatihan dan materi yang diberikan selama pelatihan akan menjadikan peserta memiliki kemampuan untuk

menyusun program kerja, dan untuk itu peserta juga diminta untuk mengembangkan rencana individu yang mengidentifikasi setidaknya satu bidang perubahan (sesuai dengan bidang kerjanya) yang dapat dilakukan peserta sekembali setelah pelatihan. Rencana ini disebut Kertas Kerja Kebijakan (*Policy Research Paper* (PRP)). Paper ini mencakup: deskripsi dari situasi saat ini, apa yang ingin dicapai, tindakan spesifik, kemungkinan resiko dan solusi, dan indikator sukses pada bidang kerja peserta.

Peserta dan Usulan Topik Kebijakan

Peserta *training* untuk batch 2 sebanyak 21 orang berasal dari beberapa kedeputian serta topik / rencana kebijakan yang diusulkan antara lain mencakup antara lain :

1. Isu berkaitan dengan pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan (yang akan disusun oleh peserta dari Kedeputian Regional dan 1 orang Kedeputian Kemiskinan)
2. Isu berkaitan dengan tariff dan investasi (disusun oleh peserta dari Kedeputian Ekonomi)
3. Isu berkaitan dengan Kebijakan BPJS (disusun oleh peserta dari Kedeputian SDM)
4. Isu berkaitan dengan Kebijakan Energi (disusun oleh peserta dari Kedeputaian SDA)

5. Isu berkaitan dengan Kebijakan Perikanan dan Maritim (disusun oleh peserta dari Kedeputusan SDA)
6. Isu berkaitan dengan Kebijakan Harmonisasi Regulasi (peserta dari Kedep. Polhukam)
7. Isu lainnya diluar Kedeputusan adalah terkait dengan kebijakan Diklat Perencana (oleh saya sendiri), Layanan Hukum dan Pengawasan (Peserta dari Biro Hukum dan Inspektorat)

Tim Pengajar Pelatihan

Team Leader pengajar, Mr. Honourable Paul Lucas adalah mantan pejabat di Queensland (Attorney General, Minister Local Government, Parliament member, Min. for Transportation) dengan latar belakang akademis Ekonomi dan Hukum. Mr Paul Lucas memiliki banyak pengalaman dalam pemerintahan sehingga banyak pengetahuan dan pembelajaran kasus-kasus tentang pelaksanaan kebijakan di Australia yang dapat di bagikan kepada peserta.

Wakil Pengajar adalah Mr John Ignatius yang memiliki karir pada *The Australian Public Service* khususnya dalam memberikan masukan, advis, manajemen kepada Penganggaran Negara khususnya pada kebijakan sosial. Saat ini beliau membantu pemerintah Indonesia untuk program tiga tahun dalam reformasi pelaporan keuangan dan penganggaran, yang berfokus pada anggaran berbasis kinerja, *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF), serta pelaporan keuangan berbasis standar internasional.

Anggota pengajar lainnya merupakan praktisi sesuai dengan topic bahasan di dalam sesi pelatihan dan sebagian merupakan akademisi /pengajar di Universitas Queensland.

Lesson Learned training Bridging Research to Policy

Manajemen pelatihan

Manajemen pelatihan ini dapat dicontoh untuk pelaksanaan pelatihan di Indonesia, khususnya bagi PusbinDiklatren. Mulai persiapan, dengan hanya staf yang terbatas mampu menyiapkan kesiapan dokumen administrasi dalam waktu yang relative cepat. Proses pelatihan dimulai dari pra training, workshop (berisi persiapan training), pelaksanaan training (dilengkapi berbagai informasi dan dukungan pelaksanaan) peserta diminta untuk presentasi usulan kebijakan, paska training (peserta diminta menyusun *paper policy* yang dapat

“Manajemen pelatihan ini dapat dicontoh untuk pelaksanaan pelatihan di Indonesia, khususnya bagi PusbinDiklatren. Mulai persiapan, dengan hanya staf yang terbatas mampu menyiapkan kesiapan dokumen administrasi dalam waktu yang relative cepat.”

menjadi bagian dari proses perencanaan secara menyeluruh) dan dipresentasikan kepada Pengajar, Pemberi Beasiswa serta Kementerian PPN/Bappenas.

Kunjungan ke beberapa instansi terkait.

Kunjungan ke beberapa instansi yang dirasakan sangat terkait dengan persoalan pembangunan di Indonesia antara lain adalah :

- a. LGAQ - Asosiasi Pemerintah Daerah

Local Government Association of Queensland (LGAQ) merupakan Asosiasi pemerintah local yang beranggotakan tenaga-tenaga ahli di bidang infrastruktur, planning, manajemen, training dan lainnya. Fungsi dari lembaga ini lebih merupakan dukungan pada senator distrik untuk mewujudkan dan mengusulkan proyek proyek yang layak (ekonomi, lingkungan, cost benefit, sosial fisik, dsb.)

- b. ACCC - Think Tank

ACCC (*Australian Competition, Consumer, Commission*) merupakan komisi di bawah Kementerian Perbendaharaan menyiapkan analisis kebijakan berkenaan dengan kompetisi, dan hak-hak konsumen. Dalam lembaga ini pegawai diberikan tanggungjawab untuk melakukan penelitian, riset terkait dengan kebijakan tertentu yang akan digulirkan kepada masyarakat, atau proyek-proyek yang

diusulkan oleh Kementerian terkait. Pembelajaran terkait dengan ACCC dapat disandingkan dengan peran, maupun tugas fungsi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

8. Kantor Penganggaran Parlemen – (*Parliamentary Budget Office*)

Penelaah budget di kantor parlemen – mendukung senator menyusun analisis kebijakan penganggaran (*feasibility, acceptability, dll*) relatif independen dengan parlemen. Institusi ini menjamin kualitas analisis atas program dan kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh pemerintah.

Di Indonesia penelaahan menjadi bagian parlemen yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR namun dalam pelaksanaan tugasnya masih kurang “independen” sebagaimana di Australia, sehingga berbagai kasus korupsi justru muncul dari hasil kinerja Banggar. Sedangkan di Australia peran *budget office* dapat sangat efektif dalam menentukan kebijakan terkait penganggaran.

9. Industri Pariwisata

Pariwisata di Australia rata-rata sudah menjadi Industri, mulai dari kemasan, strategi menjual, dan keterkaitan teknologi, visualisasi, iklan dan faktor lainnya.. Hal ini dapat dilihat pada event pariwisata di Brisbane, Queensland yang mengangkat cerita tentang prestasi kuda pacu yang dikemas sedemikian rupa menjadi bisnis wisata dan pertunjukan yang menjanjikan di wilayah Outback beserta jamuan kuliner “steak” khas Outback yang terkenal.

Opera House di Sydney dan jembatan kuno. Sebenarnya gedung opera tidak terlalu besar dan megah, namun dapat dijual dengan sedemikian mewah dan dahsyat. Indonesia memiliki gedung serupa Keong Emas, namun kurang dapat menjual paket wisata itu dan mengisinya dengan berbagai kegiatan serta keterkaitan dan dukungan teknologi baik visual maupun teknologi lainnya.

Gold Coast, kawasan pantai di Queensland yang dipenuhi dengan gedung pencakar langit namun dilengkapi dengan bangunan yang dapat melihat dan meneropong dari berbagai sisi menjadi daya tarik wisatawan ke wilayah pantai ini.

10. Transportasi yang terintegrasi

Seperti halnya berbagai negara maju lainnya, Australia, Brisbane khususnya sebagai salah satu kota di negara bagian Queensland



“Opera House di Sydney dan jembatan kuno. Sebenarnya gedung opera tidak terlalu besar dan megah, namun dapat dijual dengan sedemikian mewah dan dahsyat.”

telah mengembangkan jaringan transportasi terpadu yang menurut kami menarik adalah jalur Bus Way yang begitu integrated. Jalur ini tidak hanya sejalan dengan jalur transportasi umum, namun juga terdapat jalur-jalur khusus (terowongan, toll) khusus busway. Pelajaran yang patut diambil dari fasilitas ini antara lain adalah faktor pembiayaan proyek sudah disiapkan pada saat terjadi booming hasil penambangan batubara di Queensland. Dari hasil perhitungan yang dilakukan dipilihlah busway yang paling sesuai. Ketika ditanyakan mengenai seberapa penting jalur terowongan dan toll khusus bagi busway, ternyata hal itu juga sudah menjadi bagian perencanaan mereka, di mana jika pada tahun mendatang ternyata pemerintah memiliki anggaran yang cukup, maka perubahan kearah transportasi kereta menjadi tidak terlalu menyerap anggaran yang besar karena infrastrukturnya sudah dipersiapkan. Pelajaran dari hal

ini adalah bahwa perencanaan dalam bidang infrastruktur transportasi sudah demikian jauh ke depan. Dan tidak hanya teknologi saja terutama adalah skema pembiayaannya sudah pula dipikirkan secara matang. Integrasi transportasi itu juga diperlihatkan integrasi antar moda transportasi darat (bus) dan sungai (citycad/feri cepat)

Fasilitas pendukung lainnya

Selama pelatihan peserta memperoleh allowance sesuai kebutuhan harian yang mencakup kebutuhan makan dan transportasi serta penginapan. Berkenaan dengan hal itu berikut beberapa fasilitas yang diberikan kepada peserta selama training:

11. Auto cash passport

Peserta memperoleh kartu debit cash yang akan diisi oleh perusahaan /universitas setiap akhir minggu sesuai kebutuhan per minggu peserta dan ketentuan pelaksanaan training dari Austalian Awards (87AUD/hari)

12. Go Card

Berupa kartu untuk penggunaan fasilitas *public transport* berupa *city card* dan bis kota. City cad merupakan fasilitas transportasi feri di sungai yang membelah kota Brisbane.

13. SIM Card dan Modem Data

SIM card untuk sarana telekomunikasi seharga 20 AUD dan Modem Data dengan kapasitas 4 GB yang dapat digunakan sepanjang hari selama training baik di lingkungan Universitas maupun diluar universitas.

14. Fasilitas Apartemen

Apartemen menyediakan fasilitas kebutuhan rumah tangga (kitchen set, wash machine, dll) serta kebutuhan akses internet free selama tinggal di apartemen tersebut.

15. Informasi pendukung (booklet, buku panduan, dll)

16. Panitia telah mempersiapkan kedatangan peserta training dengan informasi terkait informasi toko/kios untuk kebutuhan sehari-hari dan makanan terdekat dengan apartemen, fasilitas Ibadah (masjid terdekat) baik di luar kampus maupun didalam kampus.

17. Fasilitas tempat sholat selama training dirasakan masih kurang

“Queensland telah mengembangkan jaringan transportasi terpadu yang menurut kami menarik adalah jalur Bus Way yang begitu integrated. Jalur ini tidak hanya sejalan dengan jalur transportasi umum, namun juga terdapat jalur-jalur khusus (terowongan, toll) khusus busway”.

tepat oleh peserta karena menyatu dengan ruang kelas, walaupun secara umum masih dapat ditolerir. Ke depan sepertinya perlu dipersiapkan lebih baik (misalnya dengan penyiapan penyekat ruang kelas dan ruang sholat yang lebih pantas dan lebar)

18. Makan siang disediakan selama pelaksanaan training dengan menu yang sangat variatif, walaupun di hari-hari awal masih sangat “western” dengan roti dan kejunya, hari-hari berikutnya sudah beragam dengan adanya nasi beserta lauk lainnya. Nasi masih merupakan menu favorit peserta selama training. FOTO

Semoga peserta dapat mengambil semua pelajaran baik dari sisi substansinya juga dari sisi pengelolaan pelatihan yang dapat diterapkan di masing-masing bidang kerjanya.



Tekad dan Semangat Berbuah Pengalaman Tak Terlupakan

Oleh: Wuri Indri
Alumni *Monash University*

Saya termasuk yang beruntung mendapatkan kesempatan beasiswa saat baru saja menjadi PNS selama tiga tahun. Setelah sebelumnya bekerja di sebuah institusi swasta, saya masih sibuk beradaptasi dengan ritme kerja di instansi pemerintah, sehingga mendapatkan beasiswa bukan prioritas saya saat itu. Sebelumnya saya sempat mendaftar beberapa program *short course* di LN namun sepertinya keberuntungan belum di pihak saya. Sampai akhirnya suatu hari saya dipanggil atasan untuk mengikuti tes SPIRIT di Bappenas. SPIRIT? Apa itu? Saya sudah cukup familiar dengan program linkage Bappenas, tapi SPIRIT? *I have no clue*. Beberapa bisikan dari kantor adalah program beasiswa ini sedikit 'berbeda'. Apanya yang berbeda? hhhmm, dilihat dari singkatannya saja, *Scholarship Program For Strengthening Reforming Institution*, ketebulan saat itu di instansi tempat saya bekerja sedang giat giatnya menggaungkan semangat Reformasi Birokrasi, apa karena itu? Kemudian setelah mengikuti

briefing akhirnya kami mulai memahami apa yang membuat program ini berbeda dari *scholarship* lainnya. SPIRIT ditujukan khusus untuk 11 Kementerian/Lembaga, karyasiswa dibebaskan memilih universitas di negara manapun dan yang terpenting adalah ada proses monitoring saat karyasiswa selesai study dan ditempatkan kembali di kantor lamanya. Sifatnya yang terbatas dengan peserta hanya dari 11 K/L membuat persaingannya tidak terlalu sulit, berbeda dengan *scholarship* lainnya yang pesertanya dari seantero Indonesia baik instansi pemerintah maupun swasta. Kebebasan memilih negara dan universitas juga merupakan nilai lebih karena karyasiswa diberikan kebebasan menentukan universitas yang paling pas sesuai dengan kualitas program studi yang diincarnya. Tapi yang membuat program ini berbeda adalah adanya proses monitoring setelah karyasiswa kembali bekerja. Setidaknya melalui program ini lembaga bisa mengukur sejauh mana dampak yang dibawa oleh para karyasiswa setelah kembali ke instansinya masing masing.



Sebagai karyasiswa SPIRIT Batch 1, banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi. Karena belum siapnya pihak penyelenggara saat itu, banyak kesimpangsiuran yang harus kami hadapi. Prosedur yang belum jelas, keberadaan konsultan yang tidak jelas hanya beberapa masalah yang terjadi. Ingin tertawa rasanya kalau ingat pengalaman saat persiapan keberangkatan dulu. Tidak percaya bahwa akhirnya bisa juga melewati fase - fase tersebut. Sebagai karyasiswa angkatan pertama, kami tidak diberikan fasilitas mengikuti EAP (*English for Academic Purposes*), jadi usaha mencapai IELTS atau TOEFL yang disyaratkan universitas merupakan upaya pribadi masing masing karyasiswa. Kami juga tidak diberikan program *Culture Introduction* sebagai program bridging untuk persiapan menetap di negara lain. Untungnya *Monash University* memberikan program serupa untuk semua calon mahasiswanya sehingga tergantikan. Saat keberangkatan tiba, *settling allowance* belum sampai ke tangan karyasiswa, sehingga setidaknya tiga orang karyasiswa berangkat ke negara tujuan tanpa membawa bekal apapun dari program SPIRIT, bahkan pengurusan deposit fee pun bermasalah saat berbenturan dengan sistem pengadministrasian yang kaku dari pihak penyelenggara. Karena masalah administrasi yang belum tertata dengan baik, uang *settling allowance* dan biaya hidup bulan pertama baru diterima dua

“Sistem pendidikan yang terstruktur, hubungan dosen dan mahasiswa yang tanpa jarak, dan support system uni secara keseluruhan sangat membantu proses pendidikan saya.”

minggu setelah karyasiswa sampai ke negara tujuan. Khusus untuk karyasiswa yang menetap di Negara Australia, pengaturan *living allowance* yang masih di bawah standar juga menjadi persoalan, sehingga untuk enam bulan pertama *living allowance* yang diterima hanya sebesar \$AUD900/month tanpa penggantian apapun. Keterlambatan *living allowance* dan *tuition fee* hingga sempat menerima surat peringatan dari kampus sudah pernah saya alami.

Tapi akhirnya dua tahun pun terlewati, hanya karena doa orang tua rasanya masa studi ini bisa terselsaikan tepat waktu dan dengan nilai yang cukup memuaskan. Selama dua tahun mengenyam pendidikan pada program studi *Master of Business Information System* di *Monash University*, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Sistem pendidikan yang terstruktur, hubungan dosen dan mahasiswa yang tanpa jarak, dan *support system unit* secara keseluruhan sangat membantu proses pendidikan saya Apakah perjuangannya selesai sampai di sini? Tentu Tidak. Menurut saya perjuangan karyasiswa yang sebenarnya justru baru dimulai saat kembali ke institusinya, bagaimana kami bisa *give back* dan memberikan manfaat sebesar besarnya buat institusi sebagai hasil proses pembelajaran selama dua tahun. Hari pertama kembali ke kantor, saya langsung diajak berdiskusi oleh atasan tentang ilmu yang saya pelajari selama studi. Tugas akhir yang saya buat mengenai *Repository Website* cukup menarik perhatian beliau, sehingga saat itu juga beliau meminta saya membuat bahan tayangnya dan diserahkan ke Sestama. Sekalipun kantor saya mengalami restrukturisasi organisasi, saya beruntung masih diberi kepercayaan menempati posisi yang sama, namun



kali ini tanggung jawab saya sedikit bertambah. Sebagai seorang *librarian*, saya bertugas langsung mendevlop SIM Perpustakaan yang kami bangun sendiri menggunakan SLiMS (*Senayan Library Information Management System*). Selain tugas kepastakawanan lainnya, saya juga diberi tanggung jawab tambahan mendevlop dan *maintenance* lima wesbsite lainnya, yaitu satu website utama (<http://bandung.lan.go.id>), tiga website unit (<http://litbang.bandung.lan.go.id>, <http://asesmen.bandung.lan.go.id> dan <http://Diklat.bandung.lan.go.id>) dan satu aplikasi unit (<http://jurnal.bandung.lan.go.id>). Saya memandang positif tugas tambahan ini karena artinya lembaga sudah mulai mengakui kompetensi saya. Seiring dengan program Reformasi Birokrasi yang sudah diterapkan di Lembaga Administrasi Negara sejak tahun 2013, setiap satker dituntut untuk memberikan inovasi baru dalam program kerjanya, dan Unit Perpustakaan tempat saya bekerja masuk daftar inovasi 2015 tersebut dengan dua program yaitu Website dan Aplikasi Perpustakaan SLiMS serta *Repository Website*.

Sekitar satu bulan setelah kembali ke tanah air, saya diundang Bappenas untuk datang dalam acara *Alumni Sharing Session* yang dihadiri oleh alumni SPIRIT, *World Bank*, Konsultan dan PIU. Dalam acara yang bertujuan menampung semua masukan, usulan perbaikan serta monitoring program penempatan kembali ada satu hal yang patut dicermati kembali. Nilai tambah dari program SPIRIT

adalah program penempatan kembali, tapi sayangnya belum ada definisi jelas tentang kesuksesan program tersebut. Apakah bila karyasiswa tersebut mendapatkan promosi/kenaikan jabatan? mampu menerapkan ilmunya? berkontribusi terhadap institusinya? Dari sekian alumni yang datang pada acara tersebut, sebagian masih ditempatkan di unit terdahulu, belum mendapatkan kesempatan mengaplikasikan ilmunya atau ditempatkan di unit yang tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Sekalipun niat program SPIRIT ini sangat baik yaitu memperkuat kapabilitas instansi melalui pemberdayaan SDM nya, namun kenyataan di lapangan, masih banyak institusi yang terbentur atau bahkan membatasi diri dengan kata sakti 'kebutuhan organisasi'. Ada beberapa karyasiswa yang sudah menempuh pendidikan tinggi tapi masih juga ditempatkan di unit teknis administratif atau bahkan jauh berbeda dengan bidang yang dipelajarinya dengan alasan organisasi masih membutuhkan dan belum ada penggantinya. Sepertinya masih banyak masalah yang perlu kita pikirkan bersama.



AKADEMIKA

PENGARUH PROGRAM PENDANAAN KOMPETISI AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (PPK IPM) TERHADAP PENCAPAIAN IPM DI JAWA BARAT

Oleh: DENI ISMAIL

Alumni MEPP-MET Universitas Padjadjaran Bandung
Fungsional Perencana Pertama pada Bappeda Kota Bandung

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang berhasil mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nasional, yang pada tahun 2011 berada diperingkat ketiga. Namun, tingkat pembangunan manusia yang dilihat dari indikator IPM masih menunjukkan kinerja yang kurang mengembirakan karena pada tahun 2011 masih berada pada urutan ke-16 secara nasional. Kondisi yang demikian terjadi pula pada sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang masih menunjukkan ketidakseimbangan antara pencapaian LPE dan IPM-nya.

Suatu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu memperlihatkan IPM yang tinggi pula, demikian pula sebaliknya. Pada tahun 2011 hanya Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok yang berada pada kuadran I yaitu yang capaian LPE dan IPM-nya berada di atas nilai LPE dan IPM Jawa Barat. Adapun yang berada di Kuadran II yaitu yang capaian LPE-nya berada dibawah LPE Jawa Barat tetapi IPM-nya berada di atas nilai IPM Jawa Barat terdapat 9 Kabupaten/Kota. Kabupaten Karawang merupakan satu-satunya daerah yang berada di Kuadran III yaitu yang capaian LPE-nya berada diatas LPE Jawa Barat tetapi IPM-nya berada dibawah nilai IPM Jawa Barat. Selanjutnya terdapat 13 Kabupaten/Kota yang berada di Kuadran IV yaitu yang capaian LPE dan IPM-nya masih berada dibawah nilai LPE dan IPM Jawa Barat.

Melihat kecenderungan masih terdapatnya kendala yang dihadapi daerah dalam merealisasikan pencapaian IPM serta untuk mewujudkan pencapaian target IPM 80 Tahun 2015, Pemerintah

Provinsi Jawa Barat secara khusus telah mengeluarkan kebijakan berupa Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) yang diluncurkan Tahun 2005 dan implementasi pendanaannya dimulai Tahun 2006 – 2008. Melalui PPK IPM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggalang peran serta stakeholders pembangunan di daerahnya masing-masing untuk bersama-sama menyusun strategi dan menjalankan upaya-upaya peningkatan IPM.

Peserta pelaksana PPK IPM yaitu Kabupaten/Kota pengusul yang mampu menyusun proposal sesuai dengan kriteria tahapan seleksi. Mekanisme seleksi PPK IPM terdiri dari lima tahapan, yaitu:

1. Tahap seleksi Proposal Evaluasi Diri
2. Tahap Konfirmasi Kunjungan Lapangan I
3. Tahap seleksi Proposal Komprehensif
4. Tahap seleksi Proposal Implementasi
5. Tahap Konfirmasi Kunjungan Lapangan II

Dalam proses seleksi digunakan Kluster Kabupaten/Kota. Kegunaan kluster adalah untuk menyandingkan suatu Kabupaten/Kota pada posisi yang adil dan seimbang dalam berkompetisi dengan Kabupaten/Kota lainnya dengan misi pendanaan sesuai klusternya. Tiap-tiap kluster mempunyai misi pendanaan tertentu yang disesuaikan dengan tingkat pencapaian IPM-nya. Adapun dasar pengklusteran PPK IPM adalah :

1. Pencapaian IPM oleh Kabupaten/Kota pada tahun 2003
2. Peningkatan IPM yang dicapai oleh Kabupaten/Kota selama periode tahun 1999 sampai dengan 2003
3. Pencapaian IPM Kabupaten/Kota saat tahun proses seleksi berlangsung terhadap target IPM Kabupaten/Kota yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data IPM tersebut dilakukan perhitungan menggunakan Analisis Kluster Metode K-Means dan diperoleh hasil Kluster Kabupaten/Kota yang memperoleh PPK IPM sebagai berikut.

Tabel 1.1 Kabupaten/Kota Penerima PPK IPM

Gelombang I Tahun 2006 – 2007		
Kluster 1	Kluster 2	Kluster 3
1. Kab. Ciamis 2. Kota Sukabumi 3. Kota Cirebon	1. Kab. Subang 2. Kab. Bandung 3. Kab. Tasikmalaya 4. Kota Tasikmalaya 5. Kab. Cianjur	Kab. Indramayu
Gelombang II Tahun 2007 – 2008		
1. Kota Bekasi 2. Kota Depok	1. Kab. Kuningan 2. Kab. Sukabumi 3. Kab. Sumedang	Kab. Karawang

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota penerima PPK IPM akan memperoleh dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang besarnya berbeda-beda disesuaikan dengan klusternya. Untuk kluster satu akan memperoleh anggaran maksimal sebesar Rp25 Miliar, kluster dua maksimal sebesar Rp20 Miliar, dan kluster 3 maksimal sebesar Rp15 Miliar. Setelah dua tahun pelaksanaan PPK IPM, dilanjutkan dengan dana pasca PPK IPM selama dua tahun yang masing-masing Kabupaten/Kota memperoleh anggaran maksimal sebesar Rp500 Juta. Dengan adanya PPK IPM ini, Kabupaten/Kota diharapkan dapat melaksanakan program/kegiatan yang inovatif dan kreatif berbasis pembangunan manusia serta berorientasi jangka panjang sehingga dapat mengungkit IPM Jawa Barat.

“Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing” merupakan Misi pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan Misi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk mengakselerasi pembangunan manusia karena nilai IPM Jawa Barat belum berada pada posisi sepuluh besar peringkat tertinggi IPM Provinsi di Indonesia.

“Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing” merupakan Misi pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.”

Kondisi ini memotivasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperhatikan pembangunan manusia dengan menargetkan pencapaian IPM 80 Tahun 2015 dan berupaya untuk menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi sebagai modal bagi keberhasilan pembangunan yang direfleksikan oleh nilai IPM. Perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pencapaian IPM 80 merupakan hal yang logis karena penguatan perekonomian Jawa Barat harus dibuktikan melalui kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Salah satu aspek penting lainnya dalam upaya peningkatan IPM di Jawa Barat adalah anggaran pemerintah, karena pengeluaran pemerintah merupakan salah satu jalur yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Besarnya pengeluaran pemerintah tersebut mencerminkan besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia (UNDP, 1996).

Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk bidang pendidikan dan kesehatan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi besarnya peningkatan pengeluaran pemerintah di beberapa daerah tersebut tidak disertai dengan peningkatan IPM.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi di atas, terdapat beberapa permasalahan yaitu masih terdapatnya ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hal ini tentu berdampak pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Selain itu peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan

kesehatan pada beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat tiap tahunnya ternyata masih belum bisa mendongkrak pencapaian IPM seperti yang diharapkan.

Selanjutnya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) apakah sesuai harapan dapat mengungkit pencapaian IPM atau sebaliknya?

Oleh karena itu dapat dirumuskan masalah bagaimana pengaruh Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM), pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pencapaian IPM di Jawa Barat?

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan melalui tiga jalur. Jalur pertama melalui kebijakan khusus yaitu PPK IPM. Jalur kedua melalui pertumbuhan ekonomi terutama yang ditopang oleh sektor jasa yang memiliki hubungan relevan terhadap pembangunan manusia. Adapun jalur ketiga melalui pengeluaran pemerintah, dalam hal ini yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

Besarnya alokasi anggaran dalam APBD untuk bidang pendidikan dan kesehatan akan menentukan tingginya pencapaian pembangunan manusia sehingga diharapkan peningkatan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (UNDP, 1996: Ranis et al, 2000). Selain dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, IPM juga dipengaruhi oleh program dana bantuan (Gomanee et al. 2005).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara PPK IPM, pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara matematis dapat diuraikan sebagai berikut:

$$IPM = f(DPPK, PDRB_{kap}, PP, PK)$$

dimana IPM merupakan Indeks Pembangunan Manusia, DPPK merupakan Dummy PPK IPM, PDRB_{kap} merupakan PDRB per kapita, PP merupakan Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan PK merupakan Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan.

“Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara PPK IPM, pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.”

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian sebelumnya, dibentuk hipotesis bahwa Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM), pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM di Jawa Barat.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Uji Hausman diperoleh hasil bahwa metode yang cocok untuk regresi dalam penelitian ini adalah model fixed effect, sehingga hasil regresi menggunakan model Fixed Effect Estimation Generalized Least Square (EGLS) dengan Cross-section weights dengan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Model

No	Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
1	<i>Intercept</i>	3.250851	18.59357	0.0000
2	DPPK	0.000314	0.181469	0.8562
3	LPDRBKAP	0.044436	3.419729	0.0008
4	LNPP	0.021263	6.78323	0.0000
5	LNPK	0.005263	2.784173	0.0059
6	R ²	0.963663		
7	F-Stat	213.1597		
8	<i>Durbin-Watson</i>	0.806758		

Sumber : Hasil regresi dengan Metode Fixed Effect Pooled EGLS (Cross Section Weight)

Pada penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,963663 yang berarti pencapaian IPM di Jawa Barat dalam rentang waktu tahun 2003 sampai 2011 dapat dijelaskan sebesar 96,37persen oleh variabel – variabel bebas sedangkan sisanya 3,63persen dipengaruhi oleh variabel lain.

Berdasarkan analisis diperoleh nilai F-stat sebesar 213,1597 lebih besar dari nilai F tabel dan nilai probability lebih kecil dari α pada tingkat 1persen dan 5persen. Ini berarti variabel bebas yang terdiri dari dummy PPK IPM, pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan besarnya pencapaian IPM di 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama periode dari tahun 2003 sampai tahun 2011.

Untuk variabel dummy PPK IPM didapatkan nilai t-stat sebesar 0,181469. Nilai ini lebih kecil dari nilai t-tabel dengan pada tingkat 1persen, 5persen dan 10persen. Hal ini berarti bahwa secara parsial, variabel dummy PPK IPM tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pencapaian IPM pada 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama periode tahun 2003 – 2011, dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Gomanee et al. (2005) dimana Gomanee et.al melakukan penelitian pengaruh dana bantuan terhadap indikator kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM dan Angka Kematian Bayi di 104 negara selama periode tahun 1980 – 2000 yang menunjukkan hasil bahwa dana bantuan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan yang diukur dengan IPM dan Angka Kematian Bayi.

Adapun tidak signifikannya PPK IPM terhadap IPM dalam penelitian ini dimungkinkan oleh beberapa hal seperti periode pemberian dana bantuan PPK IPM yang relatif singkat, jumlah dana bantuan PPK IPM yang tidak besar sehingga kurang berpengaruh terhadap pencapaian IPM. Selain itu terdapat permasalahan yang terjadi selama proses PPK IPM berlangsung sebagaimana termuat dalam Laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi PPK IPM yang diduga menjadi penyebab tidak berpengaruhnya PPK IPM terhadap IPM seperti manajemen pengelolaan kegiatan yang tidak baik, kesalahan program, salah sasaran kelompok atau individu penerima bantuan, tidak menaati prosedur yang telah ditetapkan, serta faktor-faktor lainnya.

Variabel PDRB perkapita memiliki nilai t-stat sebesar 3,419729. Nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel dengan pada tingkat 1persen,5persen dan 10persen. Hal ini berarti bahwa secara parsial,

“PPK IPM, pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan besarnya pencapaian IPM.”

variabel PDRB perkapita memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencapaian IPM pada 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama periode tahun 2003 – 2011 dengan asumsi *ceteris paribus*. Nilai koefisien sebesar 0,044436 menunjukkan bahwa jika PDRB per kapita meningkat sebesar 10persen maka akan mengakibatkan peningkatan IPM sebesar 4,4436persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chakraborty (2000) dan Brata (2002) yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap IPM.

Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki nilai t-stat sebesar 6,783230. Nilai t-stat dari variabel ini lebih besar dari nilai t hitung pada tingkat 1persen, 5persen dan 10persen yang berarti bahwa secara parsial, variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian IPM untuk 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama periode tahun 2003 – 2011 dengan asumsi *ceteris paribus*. Dengan nilai koefisien sebesar 0,021263 dapat dijelaskan bahwa setiap peningkatan sebesar 10persen pada pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan meningkatkan IPM sebesar 2,1263persen (*ceteris paribus*).

Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki nilai t-stat sebesar 2,784173. Nilai ini lebih besar dari nilai t hitung pada tingkatan satu persen, lima persen dan 10 persen. Hal ini berarti bahwa secara parsial, variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencapaian IPM pada 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama

periode tahun 2003 – 2011 dengan asumsi ceteris paribus. Untuk variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan diperoleh koefisien regresi sebesar 0,005263 yang berarti bahwa setiap peningkatan 10 persen pada pengeluaran pemerintah bidang kesehatan akan meningkatkan IPM sebesar 0,52633persen (ceteris paribus).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Gupta et al. (2002) dan Pradipta (2005) bahwa pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan kesehatan akan berpengaruh positif terhadap indikator pembangunan manusia.

Uji perbedaan rata-rata Dua Sampel Independen dilakukan sebagai pengujian analisis tambahan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan percepatan perkembangan IPM yang diukur melalui shortfall reduction pada 15 Kabupaten/Kota yang menerima PPK IPM dan 10 Kabupaten/Kota yang tidak menerima PPK IPM.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil t hitung sebesar -0,067 dengan probability 0,947. Dengan menggunakan $\alpha=5$ persen, hal ini menunjukkan uji perbedaan tidak signifikan yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan percepatan perkembangan IPM pada daerah yang menerima PPK IPM dan yang tidak menerima PPK IPM.

Adapun uji perbedaan rata-rata Dua Sampel Berpasangan dilakukan sebagai pengujian analisis tambahan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan percepatan perkembangan IPM yang diukur melalui shortfall reduction sebelum dan sesudah adanya PPK IPM pada 15 Kabupaten/Kota penerima PPK IPM di Jawa Barat.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil t hitung sebesar 0,897 dengan probability sebesar 0,385. Dengan menggunakan $\alpha=5$ persen, hal ini menunjukkan uji perbedaan tidak signifikan yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan percepatan perkembangan IPM sebelum dan sesudah adanya PPK IPM pada 15 Kabupaten/Kota penerima PPK IPM di Jawa Barat.

Kedua hasil uji perbedaan yang menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan percepatan perkembangan IPM pada daerah yang menerima PPK IPM dan yang tidak menerima PPK IPM serta tidak terdapatnya perbedaan percepatan perkembangan IPM sebelum dan sesudah adanya PPK IPM dapat dikatakan sejalan dengan uji t pada estimasi model regresi yang menunjukkan variabel dummy PPK IPM tidak signifikan yang berarti bahwa PPK IPM tidak berpengaruh terhadap pencapaian IPM atau dapat pula

“Sistem pada PPK IPM sebenarnya sudah baik, tinggal kesiapan pelaksanaan saja yang harus lebih dioptimalkan. Apabila diadakan lagi program sejenis perlu memikirkan waktu pelaksanaan yang bersifat berkesinambungan dan tidak sesaat.”

dikatakan bahwa PPK IPM belum berhasil sesuai harapan untuk mengakselerasi IPM di Jawa Barat.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan tidak berpengaruhnya PPK IPM terhadap pencapaian IPM di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya mengkaji ulang kembali program tersebut. Sistem pada PPK IPM sebenarnya sudah baik, tinggal kesiapan pelaksanaan saja yang harus lebih dioptimalkan. Apabila diadakan lagi program sejenis perlu memikirkan waktu pelaksanaan yang bersifat berkesinambungan dan tidak sesaat. Sebagai pembandingan, dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan untuk pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan secara kontinu ternyata berkontribusi positif terhadap pencapaian IPM di Jawa Barat. Selain itu juga perlu mengalokasikan dana yang besar agar manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarakat. Dan yang penting lagi ialah mengkaji dan bila perlu merevisi kembali target IPM Jabar sebesar 80 tahun 2015 yang dirasakan cukup berat agar menjadi lebih realistis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar



terhadap pencapaian IPM di Jawa Barat, hal ini mendorong pemerintah setempat untuk melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Upaya ini dapat dilakukan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota harus terus berusaha mewujudkan dan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan untuk daerahnya, hal ini berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20persen baik dari APBN maupun dari APBD.

Pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar secara optimal, terutama untuk bidang pendidikan dan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai serta terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis kuadran, pemerintah daerah hendaknya merencanakan program kegiatan sesuai dengan kondisi daerahnya, terutama untuk Kabupaten/Kota yang posisi terakhirnya berada

di Kuadran 4, sebaiknya memprioritaskan pembangunan sosial, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan mengingat pembangunan sosial akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Dalam hal ini, program PPK IPM yang sudah dilaksanakan sebaiknya dilanjutkan kembali, seperti Program Siap Kerja dan Program Gema Smart di Kabupaten Sumedang yang diharapkan dapat menstimulus pembangunan manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) terhadap pencapaian IPM di Jawa Barat. Berdasarkan hasil estimasi pada model persamaan dapat disimpulkan bahwa:

Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) tidak signifikan dalam mempengaruhi pencapaian IPM di Jawa Barat. Waktu pelaksanaan yang dapat dikatakan relatif singkat, alokasi anggaran yang kurang memadai, serta permasalahan yang terjadi selama proses PPK IPM berjalan seperti manajemen pengelolaan kegiatan yang tidak baik, kesalahan program, salah sasaran kelompok atau individu penerima bantuan, tidak menaati prosedur yang telah ditetapkan, serta faktor-faktor lainnya dimungkinkan menjadi penyebab tidak efektifnya kebijakan PPK IPM di Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pencapaian IPM. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akses terhadap sarana prasarana pendidikan dan kesehatan akan lebih mudah dijalankan.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan alokasi anggaran pendidikan yang memadai dapat menunjang penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan program pendidikan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Alokasi anggaran kesehatan yang memadai dapat menunjang penyediaan sarana dan prasarana kesehatan terutama kesehatan dasar, serta pelaksanaan program kesehatan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun

ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH UNTUK ARAHAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN GARUT

(Regional Economic Growth Analysis as Direction of Coastal Development in Garut Regency)
 Sumber: Tesis Dudu Sudarya

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil penelitian Gumilar (2009), dalam kurun waktu tahun 2001-2007, tingkat disparitas wilayah di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks Williamson dari sebesar 0,2628 pada tahun 2001 menjadi 0,4154 pada tahun 2007. Kecamatan-kecamatan di wilayah Pengembangan Garut Utara merupakan wilayah yang relatif berimbang dengan nilai disparitas paling rendah. Sementara kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir yang berada di Wilayah Pengembangan Garut Selatan merupakan wilayah yang relatif tertinggal dan mengalami peningkatan disparitas pembangunan paling tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan Indeks Williamson dari 0.2864 pada Tahun 2001 menjadi 0.3075 pada Tahun 2007.

Kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir sebenarnya memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian wilayah-wilayah di sekitarnya. Menurut Rustiadi (2003), secara alamiah kawasan pesisir pada dasarnya bukan semata-mata merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus merupakan titik temu antara aktifitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan lautan. Nilai strategis wilayah pesisir Kabupaten Garut dapat dilihat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Perda No. 29 Tahun 2011) di mana wilayah pesisir Kabupaten Garut ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Kabupaten (KSK) yang dianggap memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten.

Penetapan kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir sebagai kawasan ekonomi strategis merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan strategi perencanaan yang matang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh sebab itu, diperlukan suatu penelitian untuk menganalisis potensi dan tingkat perkembangan ekonomi wilayah. Hal ini sejalan dengan pendapat Morrissey dan O'Donoghue, (2012) bahwa analisis ekonomi wilayah penting dilakukan untuk menyediakan akses bagi pemegang kebijakan terkait dampak sektor ekonomi. Analisis juga bisa digunakan untuk kebijakan wilayah regional masa depan untuk memastikan keberlanjutan sektor secara ekonomi dan lingkungan.

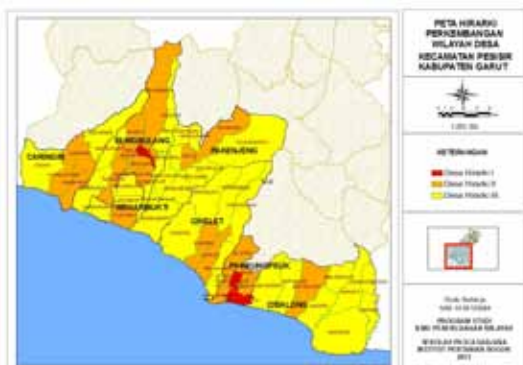
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui tingkat perkembangan ekonomi wilayah di kecamatan pesisir; (2) mengetahui sektor ekonomi unggulan; (3) Mengetahui hirarki dan efisiensi wilayah; dan (4) merumuskan arahan pembangunan wilayah dan sektor ekonomi kecamatan pesisir.

Perkembangan Ekonomi Wilayah

Dari hasil analisis entropi terhadap nilai PDRB tiap sektor, dapat diketahui bahwa tingkat keberagaman (diversitas) dan keberimbangan sektor-sektor ekonomi di Kecamatan Bungbulang, Pameungpeuk dan Cibalong cukup baik dibandingkan dengan Kecamatan Cikelet, Caringin dan Mekarmukti. Bila dibandingkan dengan nilai entropi rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Garut, ternyata perkembangan ekonomi semua kecamatan di

“Kawasan pesisir pada dasarnya bukan semata-mata merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus merupakan titik temu antara aktifitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan lautan.”

wilayah pesisir masih berada di bawah rata-rata. Nilai entropi rata-rata seluruh kecamatan sebesar 0.1141, sementara nilai entropi tertinggi di kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Bungbulang hanya 0.1111. Peta perkembangan ekonomi wilayah disajikan pada Gambar 1.



Ketimpangan perkembangan wilayah juga terjadi bila diperbandingkan antara tingkat perkembangan wilayah dengan total kemampuan maksimumnya. Berdasarkan analisis entropi perkembangan wilayah (Stot/Smaks), dapat diketahui bahwa nilai entropi kecamatan di wilayah pesisir hanya sebesar 0.7168. Itu berarti kecamatan di wilayah pesisir memiliki tingkat perkembangan sebesar 72persen dari total kemampuan maksimumnya. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Garut yang memiliki tingkat perkembangan sebesar 0.8074 atau sebesar 81persen dari kemampuan maksimumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa

kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir memiliki perkembangan wilayah yang relatif tertinggal dibanding Kabupaten Garut sebagai induk wilayah sehingga perlu didorong agar ekonominya tumbuh lebih baik.

Keunggulan Komparatif Wilayah

Analisis keunggulan komparatif wilayah dilakukan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi basis dan non basis sebagai dasar bagi penetapan arahan dan strategi pembangunan kecamatan di wilayah pesisir. Menurut Tarigan (2004), sektor ekonomi basis adalah sektor yang merupakan kekuatan ekonomi suatu wilayah yang sudah mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri dan diekspor keluar wilayah.

Dari hasil analisis *Location Quotient* (LQ), dapat diketahui bahwa kecamatan di wilayah pesisir umumnya masih mengandalkan basis ekonominya pada kelompok sektor primer seperti pertanian dan pertambangan/penggalan. Kelompok sektor sekunder seperti industri pengolahan, listrik dan air serta bangunan unggul di dua kecamatan yaitu Pakenjeng dan Cikelet. Sektor basis di kelompok sektor tersier unggul di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet dan Cibalong, itupun terbatas hanya di sektor pengangkutan dan perdagangan. Secara kewilayahan, Kecamatan Caringin, Bungbulang dan Mekarmukti masih berciri kawasan perdesaan di mana sektor basisnya masih berada di sektor primer dalam bentuk pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung. Sebaliknya, Kecamatan Pakenjeng, Cikelet, Pameungpeuk dan Cibalong sudah mulai mengalami transformasi mengarah kawasan perkotaan di mana sudah terjadi pergeseran sektor ekonomi ke sekunder dan tersier.

Keunggulan Kompetitif Wilayah

Analisis keunggulan kompetitif wilayah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi dari suatu sektor dibandingkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam dua titik waktu. Pergeseran struktur ekonomi tersebut dapat menjelaskan kemampuan berkompetisi (*competitiveness*) dari suatu sektor ekonomi serta menjelaskan kinerja sektor tersebut.

Hasil analisis SSA menunjukkan bahwa struktur ekonomi kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir yang sudah mulai menunjukkan perkembangan. Hal ini bisa terlihat dari hasil analisis di mana pertumbuhan tiap sektor di wilayah pesisir mulai menunjukkan

"Dari hasil analisis skalogram terhadap jarak serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan, dapat diketahui bahwa sebagian besar perdesaan di kecamatan pesisir berada pada tingkat perkembangan yang rendah."

pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor primer rata-rata mengalami pertumbuhan yang lambat dengan nilai SSA antara 0.16-0.27. Sebaliknya sektor sekunder dan tersier mengalami pertumbuhan yang cukup cepat antara 0.30-0.63. Secara umum, sektor yang paling cepat tumbuh di kecamatan pesisir terjadi di sektor sekunder yaitu di sektor listrik, gas dan air minum serta sektor industri pengolahan. Untuk sektor tersier, yang paling cepat tumbuh secara umum terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa.

Hasil analisis keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memprioritaskan pembangunan sektor ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryawardana (2006) bahwa dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pemerintah seharusnya mengarahkan pengeluaran anggaran pada sektor-sektor unggulan. Selain itu, investasi diharapkan agar diarahkan pada sektor unggulan sehingga akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Hirarki Perkembangan Wilayah

Perkembangan suatu wilayah bisa dilihat salah satunya dari ketersediaan jumlah dan jenis sarana pelayanan di wilayah tersebut.

Melalui pendekatan konsep wilayah nodal, dapat diketahui wilayah yang menjadi pusat-pusat (inti) dan wilayah yang menjadi pendukung atau *hinterland* (Saefulhakim, 2004). Dalam kaitannya dengan strategi pengembangan wilayah, perlu diidentifikasi wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan yang mampu menggerakkan ekonomi wilayah di sekitarnya. Melalui pendekatan konsep wilayah nodal, dapat diketahui wilayah yang menjadi pusat-pusat (inti) dan wilayah yang menjadi pendukung (*hinterland*). Identifikasi terhadap wilayah inti dan hinterland penting dilakukan untuk menentukan prioritas wilayah pembangunan. Fokus pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi inti wilayah akan memudahkan dalam penetapan prioritas wilayah pembangunan di mana pelaksanaan pembangunan pada wilayah inti diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya.

Dari hasil analisis skalogram terhadap jarak serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan, dapat diketahui bahwa sebagian besar perdesaan di kecamatan pesisir berada pada tingkat perkembangan yang rendah. Dari 65 desa yang dianalisis, hanya ada 3 desa atau sekitar 4,6persen yang masuk kategori Hirarki I. Desa yang masuk Hirarki II berjumlah 22 desa atau sekitar 33,9persen. Sisanya sebanyak 40 desa atau sekitar 61,5persen termasuk Hirarki III. Diantara 7 kecamatan, hanya ada dua kecamatan yang desa-desanya bisa dianggap cukup berkembang yaitu Kecamatan Pameungpeuk dan Kecamatan Bungbulang. Peta hirarki perkembangan desa disajikan pada Gambar 2.



Efisiensi Wilayah Pembangunan

Selain dilihat dari ketersediaan fasilitas pelayanan, perencanaan pengembangan wilayah juga bisa didekati melalui analisis efisiensi wilayah. Tujuannya adalah untuk menganalisis seberapa efisien pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lahan dalam

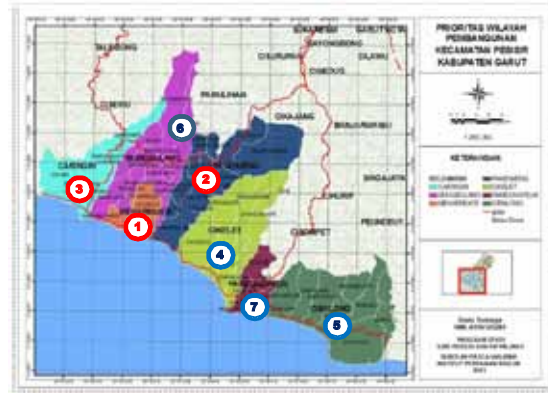
mendorong pencapaian PDRB. Hal ini sejalan dengan pendapat Spurgeon (1999) bahwa ekonomi bisa didefinisikan sebagai “studi efisiensi alokasi sumberdaya”. Pemerintah menghadapi tantangan bagaimana memaksimalkan pendapatan ekonomi melalui penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki (tenaga kerja, modal dan sumberdaya alam). Berdasarkan hasil analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA), dapat diketahui bahwa dari sisi serapan tenaga kerja tiap sektor, terdapat empat kecamatan yang belum efisien yaitu Kecamatan Bungbulang, Mekarmukti, Pakenjeng dan Cikelet. Sementara dari sisi efisiensi pemanfaatan lahan, terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Caringin dan Cikelet yang belum efisien. Untuk meningkatkan efisiensi wilayah, wilayah-wilayah yang tidak efisien harus merujuk (*peer*) pada pola pembangunan wilayah yang efisien.

Arahan Wilayah Pembangunan

Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi wilayah pesisir, pembangunan harus dilakukan berdasarkan prinsip prioritas. Hal ini sejalan dengan pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2005) bahwa perencanaan pembangunan wilayah dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, namun tetap berpegang pada asas prioritas. Arahan prioritas pembangunan wilayah kecamatan dilakukan berdasarkan pada hasil analisis perkembangan ekonomi, perkembangan sarana prasarana dan efisiensi wilayah.

Kriteria penetapan prioritas wilayah pembangunan tingkat kecamatan ditetapkan berdasarkan prinsip keberimbangan pembangunan di mana wilayah yang kurang berkembang perlu diprioritaskan untuk dibangun. Berdasarkan sintesis tersebut, ditetapkan tiga kriteria pemilihan prioritas wilayah yaitu: (1) wilayah yang memiliki diversitas dan keberimbangan ekonomi yang rendah, (2) wilayah yang memiliki perkembangan desa yang relatif lambat, dan (3) wilayah yang belum efisien dari sisi pemanfaatan sumberdaya.

Dari hasil analisis MCDM-TOPSIS, urutan prioritas wilayah pembangunan adalah: (1) Kecamatan Mekarmukti, (2) Kecamatan Pakenjeng dan (3) Kecamatan Caringin. (4) Kecamatan Cikelet, (5) Kecamatan Cibalong, (6) Kecamatan Bungbulang dan (7) Kecamatan Pameungpeuk. Peta prioritas pembangunan kecamatan disajikan pada Gambar 3.



Arahan pembangunan untuk tingkat desa dilakukan berdasarkan pada tingkat hirarki perkembangan wilayah. Hal ini sejalan dengan pendapat Kronen *et al.* (2010) bahwa strategi dan manajemen pembangunan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan pemanfaatan sumberdaya membutuhkan pendekatan hirarki dan terintegrasi berdasarkan hasil identifikasi pada level wilayah lokal. Berdasarkan teori tersebut, maka untuk mendorong peningkatan ekonomi wilayah, sasaran pembangunan desa harus didasarkan pada hirarki tingkat perkembangan masing-masing desa. Arahan pembangunan untuk tiap desa perlu disesuaikan dengan tingkat hirarki masing-masing. Pendekatan pembangunan untuk desa yang merupakan inti wilayah atau pusat pertumbuhan harus dibedakan dengan pendekatan pembangunan bagi desa-desa *hinterland*. Hal ini disebabkan karena wilayah inti cenderung memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah *hinterland*.

Melalui pendekatan konsep wilayah nodal, maka dapat ditetapkan prioritas pengembangan desa untuk masing-masing wilayah. Kriteria bagi arahan pembangunan sarana prasarana desa adalah sebagai berikut:

- Wilayah Inti sebanyak 25 desa yang terdiri dari Desa-desa Hirarki I dan II yang perlu diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah dan jenis sarana pelayanan. Sasaran pembangunan terutama ditujukan untuk desa-desa hirarki II yaitu desa-desa yang memiliki tingkat perkembangan sedang. Pembangunan perlu difokuskan pada desa-desa tersebut agar desa tersebut bisa berkembang menjadi wilayah Hirarki I yaitu wilayah inti atau pusat pertumbuhan yang mampu menggerakkan ekonomi wilayah-wilayah di sekitarnya.
- Wilayah Pendukung (*hinterland*) sebanyak 40 desa yang terdiri

dari desa-desa Hirarki III. Wilayah ini merupakan wilayah desa yang berpotensi sebagai penyedia sumberdaya atau wilayah *hinterland* di mana fokus pembangunan lebih diprioritaskan pada pembangunan sumberdaya alam terutama di sektor primer seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan pertambangan/penggalan. Desa-desa tersebut perlu diperkuat dari sisi sarana prasarana produksi sebagai penyedia dan pemasok sumberdaya alam untuk mendukung perkembangan desa-desa di WP-1.

Peta arahan pengembangan desa disajikan pada Gambar 4.

Arahan Pengembangan Sektor Ekonomi

Dalam mendorong peningkatan ekonomi wilayah pesisir, perlu dilakukan pemilihan alternatif sektor ekonomi yang perlu diprioritaskan untuk dikembangkan. Pemilihan didasarkan pada hasil analisis dan persepsi *stakeholder*. Persepsi *stakeholder* menjadi bahan pertimbangan karena menurut pendapat Sharp *et al.* (2002) bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, pembangunan perlu didasarkan pada pertimbangan aktif masyarakat, dukungan sektor swasta serta hubungan lebih baik antara masyarakat dan pemerintah.

Arahan prioritas pengembangan sektor ekonomi dilakukan dengan menetapkan empat kriteria yaitu (1) sektor tersebut merupakan sektor yang unggul secara komparatif di banyak kecamatan, (2) sektor tersebut merupakan sektor unggul secara kompetitif di banyak kecamatan, (2) sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi, dan (4) sektor yang paling banyak dipilih berdasarkan persepsi *stakeholder*. Dengan menggunakan analisis MCDM-TOPSIS dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan perkembangan ekonomi wilayah di kecamatan pesisir, urutan prioritas pembangunan sektor ekonomi diarahkan pada (1) sektor pertanian, (2) industri pengolahan, (3) sektor perdagangan, hotel dan restoran, (4) sektor listrik, gas dan air minum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat perkembangan ekonomi kecamatan di wilayah pesisir relatif belum berkembang di mana tingkat keberagaman (diversitas) dan keberimbangan sektor-sektor ekonominya masih berada di bawah perkembangan rata-rata dengan tingkat perkembangannya sebesar 72persen dari total kemampuan maksimumnya.

2. Dari sisi keunggulan komparatif wilayah, kecamatan pesisir secara umum memiliki basis ekonomi yang kuat di sektor primer. Dari sisi keunggulan kompetitif, sudah terjadi pergeseran struktur ekonomi di mana sektor sekunder memiliki tingkat pertumbuhan yang paling tinggi.
3. Sebagian besar perdesaan di kawasan pesisir berada pada tingkat perkembangan yang rendah. Dari 65 desa yang dianalisis, hanya ada 3 desa yang masuk kategori Hirarki I, sebanyak 22 desa masuk kategori Hirarki II dan 40 desa masuk kategori Hirarki III. Sejumlah kecamatan masih menunjukkan efisiensi yang rendah dari sisi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lahan.
4. Arahan wilayah pembangunan kecamatan adalah: (1) Kecamatan Mekarmukti, (2) Kecamatan Pakenjeng dan (3) Kecamatan Caringin. Arahan pembangunan wilayah desa adalah sebanyak 25 desa diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan fasilitas pelayanan dan 40 desa diarahkan sebagai pemasok sumberdaya melalui peningkatan sumberdaya manusia, sarana produksi dan efisiensi pemanfaatan lahan. Arahan pembangunan sektor ekonomi diprioritaskan pada (1) sektor pertanian, (2) industri pengolahan, (3) sektor perdagangan, hotel dan restoran, (4) sektor listrik, gas dan air minum.

Saran

1. Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melalui perumusan kebijakan, penetapan strategi dan penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis pada potensi ekonomi wilayah.
2. Sehubungan dengan keterbatasan data yang tersedia yang digunakan dalam penelitian ini, disarankan agar dilaksanakan penelitian lebih lanjut berdasarkan data terbaru. Penelitian lanjutan bisa dikembangkan dengan menganalisis keterkaitan antar sektor (*forward dan backward linkage*) dan analisis interaksi ekonomi antar wilayah.



MENGEVALUASI DAMPAK PNPM MANDIRI PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT

Oleh: Ali Mahmudin

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Jawa Barat per September 2011 sebesar 4.650.810 orang atau meningkat 0,05 persen dari hasil pendataan Maret 2011. Dengan kata lain ada kenaikan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sekitar 2.180 orang selama periode Maret – September 2011, pertambahan ini terbesar di wilayah perkotaan di Indonesia (BPS, 2011). Salah satu penyebabnya adalah urbanisasi yaitu banyaknya penduduk yang datang ke kota. Kepala BPS Jawa Barat Lukman Ismail menyebutkan, hasil pendataan jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 sebanyak 4.648.630 orang. Tingginya urbanisasi akibat banyaknya pendatang yang masuk ke kota-kota di Jawa Barat mengakibatkan penambahan angka kemiskinan itu karena mereka belum mendapat pekerjaan (Bogor news 2012).

Hal ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Faktor Pertama*, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. *Faktor kedua*, yang dapat

mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Cianjur dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi

Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Cianjur tahun 2007 dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program

“Strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan penguatan kelembagaan masyarakat.”

Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di pedesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan

PNPM juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen sektor. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Cianjur. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Cianjur akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang PNPM Mandiri Perkotaan dengan judul “*Evaluasi Dampak Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat.*”

Program PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu dari program pengentasan kemiskinan disamping program-program lainnya seperti PDMDKE, BLT, PPK, P2KP dan lain-lain yang tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan. Faktanya menunjukkan

bahwa program PNPM MP di Cianjur dengan alokasi anggaran yang semakin meningkat dari Rp.4.980.000.000 pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 7.845.000.000 pada tahun 2010 (Korkot, 2011), akan tetapi angka kemiskinan di Cianjur malah meningkat juga dari 14,10persen pada tahun 2009 menjadi 14,32persen pada tahun 2010 (BPS, 2011).

Karakteristik Masyarakat Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, melalui program yang berbentuk bantuan langsung masyarakat merupakan bentuk paradigma program pembangunan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Peran Pemerintah menurut pengalaman empirik di berbagai negara, mengalami kegagalan yang dampaknya lebih dari kegagalan pasar. Strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan penguatan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat tersebut, bertujuan menciptakan kemandirian dan keberkelanjutan kemampuan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman

Karakteristik masyarakat peserta program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Cianjur yang mempengaruhi pendapatan masyarakat dalam PNPM MP, meliputi karakteristik : usia, status kependudukan, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota rumah tangga, pengetahuan tentang BKM. Serta peran-peran pihak terkait yang mempengaruhi karakteristik, meliputi : peran pemerintah daerah, peran pengurus desa (RT/ RW), peran kordinator kota (korkot/konsultan) dan pelayanan yang diberikan oleh BKM. Hal ini dijelaskan teknik analisis deskriptif kuantitatif seperti dengan distribusi frekuensi dan multivariat tabulasi silang.

Tabel 5.1. Karakteristik Responden di Kelurahan Sayang dan Desa Babakan Karet Tahun 2012

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (persen)
1	Usia		
	a. < 20	1	0,83
	b. 20-35	16	13,33
	c. > 35	46	38,33
2.	Status Kependudukan		
	a. Pendatang	12	10,00
	b. Penduduk Asli	108	90,00
3.	Jenis kelamin		
	a. Laki-laki	67	55,83
	b. Perempuan	53	44,17

4.	Tingkat Pendidikan		
a.	SD	37	30,83
b.	SMP	33	27,50
c.	SMA	50	41,67
5.	Jumlah ART (orang)		
a.	1 orang	1	0,01
b.	2 orang	6	0,05
c.	3 orang	41	0,34
d.	4 orang	36	0,30
e.	5 orang	22	0,18
f.	> 5 orang	14	0,20
6.	Pekerjaan		
a.	Buruh	30	25,00
b.	Pedagang	35	29,17
c.	Ibu Rumah Tangga	33	27,50
d.	Tani	10	8,33
e.	Wiraswasta	12	10,00
7.	Pengetahuan tentang PNPMP	6	5,00
a.	Tidak Tahu	41	37,70
b.	Tahu sebatas perkreditan	73	60,83
c.	Tahu pasti peran & fungsi		

Sumber : Hasil Analisis Data (2012)

Peran dari pihak terkait memiliki peran yang sangat penting terutama membantu karakteristik masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pihak-pihak tersebut mempunyai pengaruh dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut meningkatkan pendapatan masyarakat dalam PNPMP Mandiri Perkotaan. Oleh karena itu kepada responden diberikan pilihan jawaban yang menilai tingkat peran masing-masing pihak tersebut. Dalam hal ini pihak terkait yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah Peran Pemerintah Daerah, Peran Pengurus Kelurahan/Desa (RT/ RW), Peran Kordinator Kota (Korkot/Konsultan) dan Pelayanan yang Diberikan oleh BKM.

Tabel 5.2. Peran Pihak-Pihak Terkait Yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Sayang dan Desa Babakan Karet Tahun 2012

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Peran Pemda		
a	Sangat Bagus	31	25,83
b	Bagus	47	39,19
c	Cukup bagus	34	28,33
d	Kurang bagus	7	5,83
e	Tidak bagus	1	0,83
2	Peran Kelurahan (RT/RW)		
a	Sangat Bagus	44	36,67
b	Bagus	53	44,17
c	Cukup Bagus	18	15,00
d	Kurang Bagus	3	2,50
e	Tidak bagus	2	1,67
3	Peran Konsultan/Korkot		
a	Langsung tanpa diminta	57	47,50

b	Diminta dulu	35	29,17
c	Kadang-kadang bila diminta	12	10,00
d	Kurang memberi penjelasan	7	5,83
e	Tidak pernahh penjelasan	9	7,50
4	Peran Pelayanan BKM		
a	Kurang memuaskan	4	3,33
b	Standar/Rata-rata	67	55,83
c	Memuaskan	49	40,83

Sumber : Hasil Analisis Data (2012)

b. Evaluasi Dampak Program PNPMP Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Cianjur

Untuk mengetahui dampak program PNPMP terhadap tingkat pendapatan masyarakat digunakan model Regresi Linear Berganda dengan variabel Dummy. Berdasarkan hasil pengolahan (Estimasi) dengan menggunakan program SPSS for Windows dan MS Excel (Lampiran 3 dan 4) diperoleh struktur sebagai berikut :

$$Y = 6,004 + 0,001 X_1 + 0,142^{**} D_1 + 0,152^{**} D_2 + 0,113^{**} D_3$$

(145,755) (0,831) (3,871) (4,157) (3,094)

Dampak bantuan program PNPMP Mandiri Perkotaan di Kabupaten Cianjur dan tambahan pengalaman kerja terhadap pendapatan masyarakat akan meningkat bagi peserta program dibandingkan dengan yang tidak menjadi peserta program bantuan PNPMP MP.

R-squared (R^2) yang diperoleh adalah sebesar 0,204 yang artinya bahwa variabel independen (X_1 /tambahan pengalaman kerja, D_1 /bantuan KSM Ekonomi, D_2 /bantuan KSM Lingkungan, D_3 /bantuan KSM Sosial) hanya mampu menjelaskan variasi (naik turunnya) pendapatan masyarakat PNPMP MP di Kabupaten Cianjur sebesar 20,4persen. Sedangkan sisanya sebesar 79,6persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi. F_{hitung} yang diperoleh sebesar 7,351 lebih besar dari $F_{(0,01; 3,116)} = 3,95$. Hal ini berarti bahwa X_1 (tambahan pengalaman kerja), D_1 (bantuan KSM Ekonomi), D_2 (bantuan KSM Lingkungan) dan D_3 (bantuan KSM Sosial) secara bersama-sama mempengaruhi pendapatan masyarakat program PNPMP MP di kabupaten Cianjur dengan tingkat kepercayaan 99 persen.

Berdasarkan uji t-statistik (uji secara parsial), maka dapat diketahui bahwa semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat PNPMP MP di kabupaten Cianjur. Hasil estimasi memperlihatkan t-hitung untuk β_0 sebesar 145,755 signifikan pada tingkat keyakinan 99persen. Hasil estimasi memperlihatkan t-hitung variabel X_1 (tambahan pengalaman kerja) sebesar 0,831 tidak signifikan pada tingkat keyakinan 99persen. Hasil estimasi memperlihatkan t-hitung variabel D_1 (bantuan KSM Ekonomi) sebesar 3,871 signifikan pada tingkat keyakinan

99persen. Berdasarkan pengolahan data menunjukkan t-hitung variabel D_2 (bantuan KSM Lingkungan) sebesar 4,157 dan signifikan pada tingkat keyakinan 99persen. Sementara itu t-hitung variabel D_3 (bantuan KSM Sosial) sebesar 3,094 signifikan pada tingkat keyakinan 99persen.

Dengan melakukan berbagai macam Uji Asumsi Klasik dan hasilnya ternyata bebas dari pelanggaran asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam menaksir pendapatan masyarakat program PNPM MP di kabupaten Cianjur sudah baik "BLUE".

Implikasi Kebijakan

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, diantaranya :

- 1) Karakteristik masyarakat peserta program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur yang terdiri dari : usia (31-40 tahun) berarti masuk usia produktif, status kependudukan (penduduk asli) berarti dia sudah dianggap menguasai lapangan usaha, jenis kelamin (laki-laki) berarti merupakan kepala rumah tangga, pendidikan (SMP-SMA) berarti sudah baik dari segi SDM, pekerjaan (buruh dan pedagang) berarti sudah tepat sasaran program, jumlah ART (masih relatif sedikit yaitu 3 orang), dan pengetahuan tentang BKM (hanya tahu hanya sebatas perkreditan) perlu sosialisasi yang berkesinambungan. Karakteristik masyarakat tersebut merupakan modal dasar yang baik, oleh karena itu pemda harus memelihara kondisi ini untuk pengembangan program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
- 2) Peran pihak terkait yang mempengaruhi karakteristik masyarakat memiliki peran yang sangat penting terutama membantu masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan masyarakat diantaranya peran (a) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinergi program dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cianjur (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dengan stake holder yang ada sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien; (b) peran pengurus kelurahan (perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan dalam meningkatkan program), (c) peran konsultan (sebaiknya fasilitator selalu berada di lokasi kegiatan untuk mendampingi masyarakat dalam rangka meningkatkan

“Dampak bantuan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Cianjur serta tambahan pengalaman kerja (experience) terhadap pendapatan masyarakat akan meningkat bagi peserta program dibandingkan dengan yang tidak menjadi peserta program bantuan PNPM Mandiri Perkotaan.”

pendapatan masyarakat miskin. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kembali pendampingan kepada masyarakat miskin khususnya dalam membantu anggota KSM Ekonomi dalam melakukan manajemen usaha dan kualitas produknya sehingga dapat bersaing di pasar kerja dan (d) peran pelayanan yang diberikan oleh BKM (Perlu dibentuk lembaga formal (independen) yang tugasnya melakukan kontrol sosial terhadap kerja BKM yang anggotanya dari tokoh masyarakat, pemerhati sosial, dan dari aparat pemerintah).

- 3) Dampak bantuan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Cianjur serta tambahan pengalaman kerja (experience) terhadap pendapatan masyarakat akan meningkat bagi peserta program dibandingkan dengan yang tidak menjadi peserta program bantuan PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Cianjur harus mampu meningkatkan anggaran perbaikan infrastruktur dan layanan sosial guna mendorong kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Usia produktif harus didorong untuk membuka lapangan usaha dengan meningkatkan bantuan ekonomi bergulir sehingga masyarakat bisa lebih berpengalaman dalam berusaha.
- 4) Peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan dana untuk modal usaha yang benar-benar diperuntukkan bagi keluarga miskin. Hal ini sudah



dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan melalui kegiatan ekonomi. Pemberian modal usaha ini perlu dimonitoring dan dibina secara kontinu oleh pihak BKM, konsultan dan aparat pemerintah sampai masyarakat miskin sudah bisa mandiri dalam menjalankan usahanya.

- 5) Perlu adanya program lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan, sehingga masyarakat miskin dapat lebih ditingkatkan khususnya dari segi pendapatan masyarakat. Diantaranya dengan program Pemerintah yang siap menampung (membeli) dan menyalurkan produksi dari masyarakat miskin (KSM/UMKM) sehingga lebih terjamin distribusi barang dan pemasarannya. Pemerintah daerah menekankan kepada pihak minimarket dan supermarket untuk menerima dan memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat miskin serta pihak SKPD terkait (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, serta Dinas Kesehatan) untuk membina kualitas produk dan manajemen pemasarannya.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil kajian Evaluasi Dampak Program PNPM Mandiri Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Sasaran di Kabupaten Cianjur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Karakteristik masyarakat peserta program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Cianjur yang terdiri dari : usia, status kependudukan, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jumlah ART, dan pengetahuan tentang BKM; serta peran pihak terkait yang mempengaruhi karakteristik masyarakat memiliki peran yang sangat penting terutama membantu masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan masyarakat diantaranya : peran pemerintah daerah, peran pengurus kelurahan, peran konsultan dan peran pelayanan yang diberikan oleh BKM.
- b. Evaluasi dampak bantuan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Cianjur serta tambahan pengalaman kerja (experience) terhadap pendapatan masyarakat akan meningkat bagi peserta program dibandingkan dengan yang tidak menjadi peserta program bantuan PNPM Mandiri Perkotaan.
- c. Kenyataan ini mengharuskan Pemerintah Daerah Cianjur harus memelihara kondisi karakteristik ini untuk pengembangan program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di kemudian hari. Pemerintah Daerah Cianjur harus mampu meningkatkan anggaran perbaikan infrastruktur dan layanan sosial guna mendorong kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pemda Cianjur perlu



melakukan koordinasi dan sinergi program dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cianjur, perlu ditingkatkan kembali pendampingan kepada masyarakat miskin khususnya dalam membantu anggota KSM Ekonomi dalam melakukan manajemen usaha dan kualitas produknya sehingga dapat bersaing di pasar kerja, serta perlu adanya program lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan, sehingga dapat lebih ditingkatkan khususnya dari segi pendapatan masyarakat miskin.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka saran yang dapat disampaikan untuk evaluasi dampak program PNPM MP terhadap peningkatan pendapatan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Karakteristik masyarakat tersebut di atas merupakan modal dasar yang baik, oleh karena itu pemda dan pihak terkait harus memelihara kondisi ini untuk pengembangan program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di kemudian hari. Pemda Cianjur beserta stake holder (BKM dan masyarakat) terkait harus melakukan penyamaan persepsi tentang kriteria masyarakat miskin, diantaranya program satu data satu kabupaten *by name by address* untuk masyarakat miskin sehingga dapat lebih mudah dalam penanganan program pengentasan kemiskinan di daerah.
- b. Adanya bantuan PNPM MP (ekonomi, lingkungan dan sosial) serta tambahan pengalaman kerja (*experience*) dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Cianjur maka perlu ditingkatkan kembali bantuan PNPM MP di kemudian hari sehingga masyarakat Kabupaten Cianjur dapat lebih meningkat pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri dalam pengelolaan

usahanya dan pada akhirnya masyarakat lebih sejahtera. Salah satunya yaitu program pencetakan 1000 lapangan kerja baru (berwirausaha baru) khususnya bagi masyarakat usia produktif dengan pemberian dana stimulus (bergulir) dan dilakukan bimbingan yang intensif dalam berusaha oleh pihak terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, serta dinas terkait lainnya.

- c. Perlu ditingkatkan kembali kinerja pemerintah daerah Kabupaten Cianjur yang terkait dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*). Koordinasi dan sinergi program oleh *stakeholder* terkait atau berkepentingan serta perlu ada program lanjutan setelah program PNPM MP guna melanjutkan program pemberdayaan masyarakat miskin. Salah satunya melakukan koordinasi program Rp.10 juta per RT dan bedah kampung, program Komunitas Belajar Masyarakat serta program sejenisnya dapat terintegrasi dengan baik.

Selingan

Skills

Personal Development

Knowledge

Terus Belajar Untuk Mengembangkan Diri

Proses belajar dalam rangka pengembangan diri tersebut merupakan prasyarat dan bagi mereka yang ingin menggapai sukses dalam kehidupannya. Proses belajar bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja dan dalam bidang apa saja sesuai dengan potensi masing-masing individu. Dalam beberapa kasus, tidak semua kesuksesan di peroleh dari proses belajar formal dengan meraih gelar tinggi tertentu. Kita ambil contoh dalam stuktur anggota Kabinet Pemerintahan Sekarang, Siapa yang tidak kenal Ibu Menteri Susi Pudjiastuti. Dengan proses belajar dan kerja kerasnya dia menjadi seorang menteri yang “inspirasi” bagi sebagian masyarakat. Proses belajar dan pengembangan diri Ibu Susi di tempa di lapangan dan langsung pada persoalan dihadapi. Meski tidak semua akan bisa melalui proses tersebut, namun proses belajar dan pengembangan diri menjadi wajib bagi kita semua. Dalam sebuah artikel (<http://aquariuslearning.co.id>) ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam rangka pengembangan diri kita. Semua orang yang ingin sukses harus bisa berkembang. Perkembangan bisa dilakukan dari berbagai aspek, bisa aspek kualitas diri (sikap dan mental), finansial, karir, dan lain sebagainya. Dari semua aspek, hal yang paling penting untuk dikembangkan adalah kualitas diri.

Kualitas diri tidak dapat dibentuk dengan instan, semua harus dilalui dengan proses yang panjang dengan berbagai dinamikanya.

Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk senantiasa menjaga kualitas diri kita dan bahkan meningkatkannya sebagai bagian pengembangan diri adalah :

1. Membaca Buku

Untuk mengembangkan diri, hal pertama yang harus

berkembang adalah dari sisi mindset atau pola pikir. Mindset atau pola pikir adalah fondasi dasar kesuksesan seseorang. Menurut ahli motivasi, seseorang jika ingin sukses harus memiliki pola pikir orang sukses. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menanamkan *mindset* sukses dalam diri, salah satunya adalah dengan membaca buku pengembangan diri apapun profesi kita.

Membaca (khususnya buku pengembangan diri) dapat membuka wawasan dan pengetahuan kita. Sebuah buku ditulis oleh seseorang yang telah memiliki pengalaman, paling tidak dalam bidangnya sendiri. Sebuah buku dapat menjelaskan pandangan, opini, dan kiat sukses seseorang secara mendalam. Melalui buku kita bisa belajar dengan penulis tanpa bertemu dengan orangnya.

Kita bisa memilih buku yang paling tepat untuk kebutuhan Anda.

2. Mencoba Hal Baru

Untuk menjadi orang yang berkembang, kita perlu memiliki wawasan yang luas, selain dengan membaca, kita juga bisa melakukannya dengan mencoba hal baru, tentu saja hal yang positif. Sebagai contoh, bagi mereka yang memiliki hobi masak. Untuk meningkatkan pengetahuan masaknya, maka dia harus sering berwisata kuliner dan mencoba hal makanan baru. Dengan demikian dia akan mendapatkan ide atau inspirasi dari makanan baru yang dicicipnya dan hal ini sangat bermanfaat untuk menambah ide masaknya.

Kita bisa melakukan hal baru yang sesuai dengan hobi dan kesukaan kita, dan kita juga tidak perlu terlalu ekstrim untuk melakukan hal baru, misalnya dengan belajar bahasa asing, bahasa yang baru bagi kita. Selain itu, kita juga bisa mencoba kunjungi tempat-tempat baru seperti pegunungan, pantai atau tempat wisata tertentu.

Bagi kita yang kebetulan seorang pegawai, mungkin kita bisa mencoba usaha apa saja. Kita pasti akan mendapatkan banyak inspirasi saat kita mulai berusaha. Tentu saja kita juga akan menemukan banyak tantangan yang bermula dari rasa takut dan ragu bahkan “kegagalan”.

Sering kali ketika ingin mencoba hal baru, hati kecil berkata, “*apa saya bisa?*” Ketakutan dan keraguan seperti ini akan menjadi penghambat bagi diri kita. Meski demikian tetaplah mencoba. Walaupun kita melakukan kesalahan kita tetap bisa belajar dari pengalaman tersebut. Dengan demikian kita semakin memperkaya pengalaman hidup.

3. Tingkatkan Skill Anda

Jika kita ingin berkembang, kemampuan yang kita miliki saat ini perlu kita tingkatkan. Misalnya, kita bisa berbicara di depan umum atau menulis, tetapi masih belum begitu bagus. Kita bisa belajar atau sering melatih diri berbicara di depan umum dan menulis seperti laporan kerja, artikel untuk majalah internal dan lainnya

Sebaliknya, jika kita merasa punya kekurangan dalam kemampuan tertentu, padahal kita membutuhkan kemampuan tersebut untuk kesuksesan kita, maka kita wajib mengembangkan kemampuan tersebut. Misalnya jika kita seorang yang bekerja di bidang penjualan, padahal Anda merasa sangat sulit untuk menghadapi orang baru, bernegosiasi atau menawarkan suatu produk. Kita wajib meningkatkan kemampuan kita di bidang tersebut dengan belajar.

Kita bisa belajar dengan membaca atau mengikuti seminar atau workshop. Saat ini ada banyak penyelenggara seminar-seminar *softskill*. Kita bisa memilih seminar atau workshop yang paling kita butuhkan. Dengan mengikuti pelatihan *softskill* akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, tidak hanya saat ini tetapi di masa yang akan datang.

4. Olahraga

Mengembangkan diri bukan soal pikiran dan mental saja, tetapi juga soal fisik. Contoh, jika kita dalam situasi baru pulang kerja dan lelah karena sudah lembur di kantor, apakah kita masih ingin membaca buku-buku pengembangan diri? Tentu kita lebih memilih tidur atau istirahat.

Kondisi fisik berpengaruh terhadap kondisi mental, begitu juga

sebaliknya. Dalam psikologi dikenal istilah psikosomatis yaitu sakit fisik yang ditimbulkan oleh faktor psikologis. Contohnya, ketika Anda diminta berbicara di depan umum, 5 menit sebelum naik panggung, tiba-tiba Anda merasa perut mules. Perut mules yang disebabkan oleh rasa takut atau cemas ini terjadi karena hendak berbicara di depan panggung.

Jadi memang ada kaitan yang kuat antara faktor fisik dan psikologis (mental).

5. Minta Masukan dari Teman

Untuk mengukur diri, kita bisa bertanya kepada teman kita, bagaimana performa kita akhir-akhir ini. Mintalah masukan dengan pikiran terbuka. Saat meminta masukan dari teman, lakukanlah dengan natural jangan membuat teman kita merasa canggung dengan pertanyaan Anda.

Dalam situasi ini kita harus siap menerima masukan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan masukan yang positif, tetaplah bersikap bersahaja, jangan tinggi hati. Semua masukan dari teman akan menjadi bahan evaluasi.

Kita bisa memulai dengan bertanya kepada rekan kerja tentang prestasi kerja kita selama ini. Misalnya, apa yang dia rasakan saat bekerja sama dengan kita? Apakah dia merasa nyaman atau tidak? Dengan demikian, kita bisa mengevaluasi kinerja kita. Masukan ini sangat bagus untuk perbaikan kita di masa depan dan menyadarkan kita bahwa kita sudah memiliki perubahan ke arah yang positif.

Itulah kira-kira lima cara yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kualitas diri, tentu saja masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan sesuai dengan kesukaan dan pilihan masing-masing. Kita memang tidak harus mencoba semua hal ini, kita bisa memilih cara yang paling tepat untuk membantu pengembangan diri kita.

Proses pengembangan diri adalah proses seumur hidup, setiap waktu setiap saat adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dengan terus meningkatkan kualitas diri, kita akan segera mencapai kesuksesan. Tentu saja ukuran kesuksesan sangat bervariasi dan kadang subyektif, apapun itu kita yang tahu dan merasakannya.

Tiok (berbagai sumber)

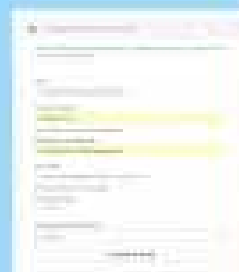


Proses Registrasi Program Beasiswa PUSBINDIKLATREN BAPPENAS VIA ONLINE

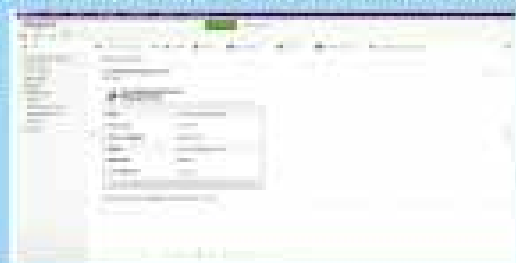
(1) Silahkan masuk ke Menu **DAFTAR**
di <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>



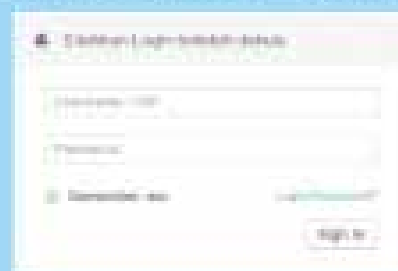
(2) Masukkan NIP Anda lalu klik **CEK**



(3) Kemudian silahkan Anda cek di email untuk melihat
notifikasi pembentahan aktivasi akun Anda, lalu
klik link aktivasi nanti akan diarahkan ke halaman lain



(4) Kemudian silahkan Login dengan NIP dan
Password yang sebelumnya sudah dibuat



(5) Silahkan klik **DIKLAT GELAR/NON GELAR**



(6) Lalu isikan formulir yang sudah tersedia



(7) Setelah formulir diisikan semua lalu klik **DAFTAR/UBAH**



(8) Dan untuk mendapatkan formulir yang sudah diisikan
klik **LINDUH DISINI**



ATTENTION

WASPADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN PUSBINDIKLATREN BAPPENAS



**Program - program Pusbindiklatren Bappenas
TIDAK dikenai biaya apapun**

Apabila ada penawaran program - program Pelatihan yang mengatASNamakan Pusbindiklatren dan Staf Pusbindiklatren dengan meminta Nomor Rekening dan mencantumkan Nomor HP personal Mohon untuk diwaspadai karena ditengarai PENIPUAN



**Informasi Lebih Lanjut Silahkan Hubungi
Pusbindiklatren Bappenas**

Telepon: (021) 31928279, 31928280, 31928285

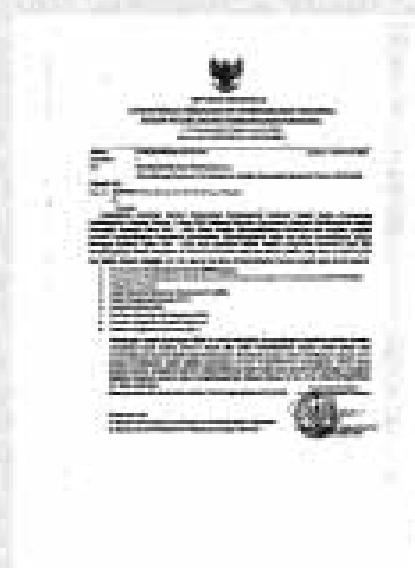
Faksimili: (021) 31928281

Email: pusbindiklatren@bappenas.go.id

Atau silahkan konsultasi langsung ke Pusbindiklatren Bappenas di Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320



Contoh Surat Penipuan





Lokakarya PusbinDiklatren Bappenas
Garut, Jawa Barat, 19 Desember 2014
Dok. Tim Simpul



Public Speaking Pusbindiklatren
Malang, 22 Oktober 2014



Rakor Prodi Pusbindiklatren
dengan Universitas Mitra
Yogyakarta, 27 November 2015



Opening Ceremony
Training Program for The Professional
Human Resource Development Project-III

Pembukaan Diklat non Gelar
Pusbindiklatren Luar Negeri (Jepang)
15 Agustus 2014

INDONESIA

WARGA
SIKAP
BERSIH

PINTARKERJA

BANGKIT TRIMARTA

JAMSOS

BEBASAKTIF KEMAMAL

LANDREFORM WARGA

DAYASAINGBERSIH

PATRIOTISME SISTEM

SISTEM 2015 KARAKTER

NAWA CITA

TRISAKTI

PATRIOTISME DEMOKRATIS

PRODUKTIVITAS MAJU BERSIH TERPERCAYA

HEKTAR JAMSOS LANDREFORM BUDI

KARAKTER BEBAS KORUPSI KESATUAN BANGKIT

PINGGIRAN DIALOG EFEKTIF REVOLUSI MENTAL BEBAS

INDONESIA

SIKAP
BERSIH

BEBAS
KORUPSI
SISTEM

SEJAHTERA

TRIMARTA
EFEKTIF

BERSIH KESATUAN PINTAR MAJU MAJU

PUBLIK

WARGA LANDREFORM

KARAKTER
BERSIH

REFORMA

BERSIH BANGKIT

BEBAS
KORUPSI

